



# PRANATA SOSIAL

**Dr. Paisol Burlian, S.Ag, M.Hum**

**Editor : Dr. Hamidah, M.Ag**





Dr. Paisol Burlian, S.Ag, M.Hum

Kutipan Pasal 44, Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik

## PRANATA SOSIAL

Tentang Hak Pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1997  
tentang HAK Cipta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Undang No. 7 Tahun 1997 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1997,  
bahwa:

1. Berangsur dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Berangsur dengan sengaja menyalin, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



RAFAH  
PRESS



Kutipan Pasal 44, Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik  
Indonesia tentang HAK CIPTA

Tentang Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982  
tentang HAK CIPTA, sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Undang No. 7 Tahun 1987 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1997,  
bahwa:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan  
atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk  
itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)  
tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus  
juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,  
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau  
barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud  
dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5  
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-  
(lima puluh juta rupiah).



## PRANATA SOSIAL

Editor

Dr. Hamidah, M.Ag



RAFAH  
PRESS



*Pranata Sosial*

Dr. Paisol Burlian, S.Ag. M.Hum

© 2013, Rafah Press

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak terbit pada Rafah Press

Anggota IKAPI

Setting dan tata letak: Rafah Press

Editor. Dr. Hamidah, M.Ag

Design Cover: Muhtarom, S.Pd.I

Cetakan I : 2013

ISBN : 978-979-1339-95-7

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)



Rafah Press

Jl. Prof. K.H. Z. Abidin Fikry KM 3,5 Palembang

KATA PENGANTAR EDITOR

Manusia merupakan makhluk dinamis dalam hakekatnya sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, kehidupan manusia bermasyarakat diperlukan tata aturan yang disebut pranata sosial. Pranata sosial atau lembaga sosial (*Sosial Institution*) atau organisasi sosial, adalah suatu himpunan norma yang mengatur segala tindakan dan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan bermasyarakat. Norma adalah sejumlah ukuran atau patokan mengenai perilaku anggota masyarakat yang dijadikan pedoman dalam mengatur kehidupan bersama. Semua norma yang mengatur perilaku manusia bermasyarakat berkembang menjadi suatu pranata sosial.

Buku belajar ini merupakan bagian awal dari pembahasan tentang sistem sosial. Materi tentang sistem sosial akan dimuat dalam empat bahan belajar, yaitu pranata sosial, interaksi sosial, perubahan sosial, dan konflik sosial. Segala tindakan dan hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok memerlukan suatu wadah yang dapat mengatur hubungan tersebut melalui berbagai pranata sosial. Mengingat beragamnya kebutuhan manusia, maka memerlukan macam-macam pranata sosial yang mengaturnya.



Pada buku ini, Anda akan mempelajari tentang pranata sosial yang meliputi: pengertian pranata sosial, ciri dan fungsi pranata sosial, proses pertumbuhan pranata sosial, dan ragam pranata sosial. Dengan demikian, setelah Anda mempelajari bahan belajar ini diharapkan memiliki kompetensi dalam memahami tentang pranata sosial. Secara lebih rinci, kompetensi yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pengertian pranata sosial
2. Menjelaskan ciri-ciri pranata sosial
3. Menjelaskan fungsi pranata sosial bagi masyarakat
4. Menjelaskan pengertian norma sosial
5. Menjelaskan jenis norma sosial
6. Menjelaskan ragam norma sosial yang ada dalam masyarakat
7. Menjelaskan proses norma sosial menjadi pranata sosial
8. Menjelaskan macam-macam pranata sosial

Dengan demikian, Anda akan memperoleh manfaat dari buku ini yang bermakna serta terhindar dari keraguan dan kesia-siaan dalam belajar khusus mempelajari masalah pranata sosial

Palembang, Juni 2013  
Editor

Dr Hamidah, M.Ag

## KATA PENGANTAR PENULIS

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan bimbinganNya, saat ini kami bisa menyelesaikan buku yang berjudul "Pranata Sosial".

Buku ini disusun berdasarkan fakta dengan menggunakan beberapa referensi yang membahas tentang topik ini. Buku ini disusun untuk memenuhi usulan-usulan/saran-saran dari mahasiswa mata kuliah Pranata Sosial di Kota Palembang diharapkan dapat memberi penjelasan mengenai apa itu Pranata Sosial bisa menjadi sistem filsafat bangsa Indonesia.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.



Semoga buku ini bisa memberikan informasi mengenai Pranata Sosial dan bermanfaat bagi para pembacanya. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan untuk membuat buku ini kami ucapkan terima kasih.

Palembang, 12 Juli 2013

Penulis

Dr. Paisol Burlian, S.Ag.M.Hum

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar Editor	v
Kata Pengantar Penulis	ix
Daftar Isi	xi
<b>Bab 1 Pendahuluan</b>	1
A. Mukaddimah	1
B. Ruang Lingkup	5
C. Tujuan	5
<b>Bab 2 Pranata Sosial : Pengertian Dan Perbedaan Pranata Sosial Dengan Lembaga Sosial</b>	7
A. Pengertian sosial dan Pranata Sosial	7
B. perbedaan pranata sosial dengan lembaga sosial	22
C. proses Pertumbuhan Pranata Sosial dan Cara Mempelajarinya	24
<b>Bab 3 ciri-ciri dan tipe-tipe Pranata sosial</b>	37
A. Ciri-Ciri Pranata Sosial	37
B. Tipe-Tipe Pranata Sosial	42
<b>Bab 4 Tujuan Fungsi Pranata Sosial</b>	49



A. Tujuan Pranata Sosial	49
B. Fungsi Pranata Sosial	50
<b>Bab 5 Macam-Macam Pranata Sosial</b>	53
A. Macam-Macam Pranata Sosial	53
B. Fungsi Pranata Pendidikan	85
C. Fungsi Tersembunyi Pranata Pendidikan	87
D. Fungsi Nyata Pendidikan	87
E. Manfaat Pendidikan	87
F. Jenis-Jenis Pendidikan	87
G. Jenis Pendidikan Lainnya	88
H. Jalur Pendidikan	90
I. Jalur Pendidikan Sekolah	91
a. Pendidikan demokrasi	
b. Visi Pendidikan Demokrasi	
c. Misi Pendidikan Demokrasi	
<b>Bab 6 Hubungan Pranata Sosial Dengan Geografi</b>	
A. Mukaddimah	201
B. Hubungan Antara Manusia Dengan Lingkungan	208
C. Pengaruh manusia Pada Alam	
Lingkungan Hidupnya	232
D. Sumber Alam	234
E. Manusia Sebagai Penentu Nilai	236
F. Individu Dengan Golongan	237
G. Interaksi Manusia Dengan Golongan	237

Kesimpulan	243
Daftar Pustaka	245
Indeks	255
Biwayat Hidup Penulis	261
Biwayat Hidup Editor	263

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun dalam kehidupannya harus berkelompok dan bermasyarakat. Manusia tidak dapat berdiri sendiri, namun bergantung kepada orang lain. Manusia tanpa manusia lainnya tidak akan bisa bertahan hidup. Dalam kehidupannya dengan manusia lain manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan orang lain, karena manusia mempunyai naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Dengan demikian manusia itu merupakan bagian dari suatu pranata sosial, karena hampir seluruh kegiatan yang dilakukan oleh manusia berkaitan dengan orang lain. Tentunya manusia memiliki tujuan dalam hidupnya. Untuk memenuhi tujuan itu, manusia melakukan berbagai macam cara. Salah satunya adalah membentuk pranata-pranata sosial atau organisasi-organisasi sosial. Di sekitar kita terdapat banyak sekali pranata sosial, baik itu pranata resmi maupun pranata sosial yang ilegal.

Berbagai macam pranata sosial itu dibentuk tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan pranata sosial tidak lepas dari adanya nilai dan norma dalam masyarakat. Di mana nilai merupakan sesuatu yang baik, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh masyarakat. Oleh karenanya, untuk mewujudkan nilai sosial, masyarakat menciptakan aturan-aturan yang tegas yang disebut norma



sosial. Nilai dan norma inilah yang membatasi setiap perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Sekumpulan norma akan membentuk suatu sistem norma. Inilah awalnya lembaga sosial terbentuk.

Sekumpulan nilai dan norma yang telah mengalami proses menghasilkan lembaga sosial. Organisasi sosial manusia mewujudkan diri dalam bentuk pranata sosial. Dalam hubungan antar manusia dengan manusia lain yang terpenting adalah reaksi yang timbul akibat hubungan-hubungan timbal balik antara sesama manusia. Reaksi tersebut menyebabkan tindakan seseorang menjadi bertambah luas wawasannya. Manusia sejak dilahirkan sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok yaitu Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya yaitu masyarakat, dan keinginan untuk menyatu dengan alam yang ada disekelilingnya untuk dapat menghadapi dan menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan tersebut, manusia menggunakan akal, pikiran dan perasaannya. Pranata sosial atau *social institution*<sup>1</sup> di dalam

<sup>1</sup>Lembaga Sosial sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu Social institutions Pertanyaan: Apakah istilah lembaga sama dengan badan/institusi (yang berasal dari bahasa Inggris tsb?). Ada perbedaan istilah: Lembaga: Sistem norma atau aturan<sup>2</sup> mengenai aktivitas masyarakat yang khusus Institusi/badan: kelompok orang yang terorganisasi dan bertugas melaksanakan aktivitas di dalamnya. Definisi menurut tokoh: Prof. Dr. Koentjaraningrat: "Lembaga sosial merupakan satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat" Bruce J. Cohen: "Lembaga sosial merupakan sistem pola sosial yang tersusun rapi dan secara relatif bersifat permanen serta mengandung perilaku tertentu yang kokoh dan terpadu demi pemuasan dan pemenuhan

kehidupan manusia ini, merupakan himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Pranata sosial adalah dimana terdapat suatu struktur organisasi dan suatu faktor, dimana dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu sehingga hubungan antara mereka bertambah erat<sup>3</sup>. Faktor-faktor itu terdiri dari anggota yang memiliki nasib yang sama, kepentingan yang sama, ideologi yang sama, dan politik yang sama. Hal ini merupakan ikatan yang bersifat pokok untuk jangka waktu tertentu. Diperlukan beberapa persyaratan tertentu, antara lain yaitu adanya kesadaran pada setiap anggota kelompok bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain, adanya faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antara mereka bertambah erat, yang dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi yang sama, berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku, bersistem dan berproses.

Selama manusia satu dengan manusia lain menganggap sebagai sesama warga atau anggota masyarakat, berarti masing-masing telah menyadari dan menghargai

kebutuhan manusia. Hal-hal penting yang dapat disimpulkan, adalah... Bahwa pengertian Lembaga Sosial: Berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan bermasyarakat Organisasi yang relatif permanen/tetap Organisasi yang tersusun atau terstruktur Merupakan cara bertindak yang mengikat

<sup>3</sup>Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1979, hlm. 78



adanya lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah terbentuk. Dengan demikian, kita perlu mempelajari lembaga kemasyarakatan karena lembaga kemasyarakatan itu sendiri mempunyai fungsi sebagai pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan; menjaga kebutuhan masyarakat; memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*) yang artinya system pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Berkaitan dengan seseorang atau kelompok adalah merupakan bagian dari orang atau kelompok yang lain, ada cerita sederhana yang dapat diangkat dalam tulisan ini, yaitu ketika dalam perjalanan pulang kuliah, perut terasa lapar, apa yang kita lakukan?. Mungkin kita akan mampir ke restoran atau kita akan menahan lapar hingga sampai di rumah. Tentunya ada beberapa hal yang dipertimbangkan jika makan di restoran atau makan di rumah. Misalnya, jika kita makan di restoran, tentunya harus membayar sejumlah uang apa yang telah dimakan pada restoran tersebut. Namun, jika makan di rumah, tentunya tidak perlu membayar apa yang telah dimakan di rumah.

Peristiwa tersebut sekilas sangat sederhana. Namun, jika dikaji lebih jauh, banyak hal yang dapat dipelajari. Ketika kita makan di restoran, berarti kita sedang berhubungan dengan sebuah pranata. Oleh karena itu, kita harus mematuhi aturan-aturan yang terdapat dalam pranata tersebut. Salah satunya adalah kita harus membayar apa yang telah dimakan. Sementara itu, jika kita makan di rumah,

berarti kita berhubungan dengan keluarga. Tentunya yang dipakai adalah aturan-aturan atau fungsi dan tujuan yang ada dalam pranata keluarga tersebut.

Dari contoh peristiwa tersebut, dapatkah kita menyimpulkan pengertian pranata sosial?. Oleh karena itu untuk membahasnya lebih lanjut mengenai pranata sosial. Pada Makalah ini, kita akan membahas tentang : Pengertian Pranata Sosial, Perbedaan Pranata Sosial dengan Lembaga Sosial, Ciri-Ciri Pranata Sosial, Tipe-Tipe Pranata Sosial, Tujuan dan Fungsi Pranata Sosial, Macam-Macam Pranata Sosial, dan Hubungan Pranata Sosial dengan Geografi.

## B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian pranata sosial?
2. Bagaimana tujuan dan fungsi pranata sosial?
3. Bagaimana karakteristik pranata sosial?
4. Bagaimana penjelasan tentang tipe-tipe pranata sosial?
5. Apa hubungan antara pendidikan dan pranata sosial?
6. Bagaimana fungsi pendidikan sebagai lingkup pranata sosial?

## C. Tujuan

Tujuan penulisan buku ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengertian pranata sosial.
2. Mengetahui perbedaan pranata sosial dengan institusi sosial.
3. Mengetahui tujuan dan fungsi pranata sosial.
4. Mengetahui tipe dan macam pranata sosial di dalam masyarakat.



## BAB II

### PRANATA SOSIAL : PENGERTIAN DAN PERBEDAAN PRANATA SOSIAL DENGAN LEMBAGA SOSIAL

#### A. Pengertian Sosial dan Pranata Sosial

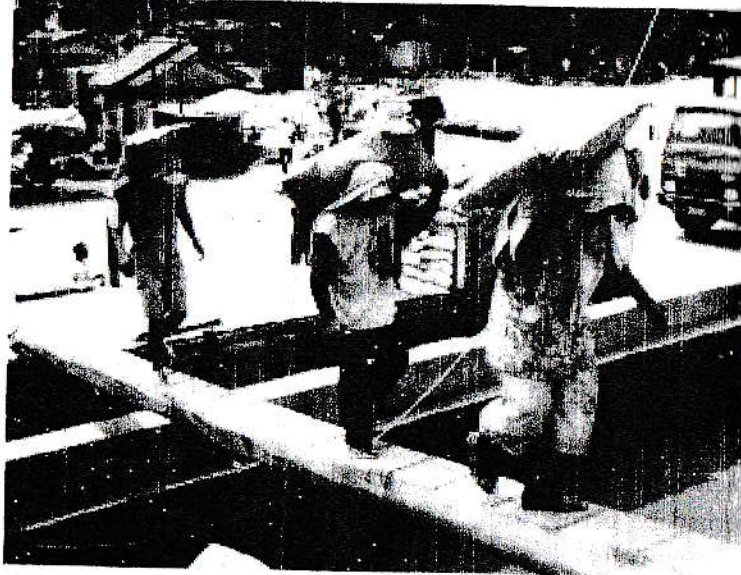
##### A.1. Pengertian Sosial.

Di kehidupan kita sebagai anggota masyarakat istilah sosial sering dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan manusia dalam masyarakat, seperti kehidupan kaum miskin di kota, kehidupan kaum berada, kehidupan nelayan dan seterusnya. Dan juga sering diartikan sebagai suatu sifat yang mengarah pada rasa empati terhadap kehidupan manusia sehingga memunculkan sifat tolong menolong, membantu dari yang kuat terhadap yang lemah, mengalah terhadap orang lain, sehingga sering dikatakan sebagai mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Pada dunia pendidikanpun istilah sosial dipakai untuk menyebut salah satu jurusan yang harus dipilih ketika memasuki jenjang sekolah menengah atas atau pilihan ketika memasuki perguruan tinggi, dan jurusan tersebut adalah jurusan yang berkaitan dengan segala aktivitas yang berkenaan dengan tindakan hubungan antar manusia.

Lebih jauh lagi terdapat dua bidang ilmu yang ada di dunia ini yaitu ilmu pengetahuan alam dan humaniora, kedua bidang tersebut mempunyai perbedaan kajian, yaitu bahwa ilmu pengetahuan alam mengarah pada kajian-kajian yang bersifat alam dan pasti, sedangkan humaniora berkaitan dengan kemanusiaan, atau sering orang mengartikannya



sebagai seni, bahasa, sastra. Sosial merupakan bidang yang berada di antara humaniora dan ilmu pengetahuan alam. Atau juga Ilmu pengetahuan alam dilawankan dengan ilmu pengetahuan sosial atau ilmu sosial.



Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan sosial dari kenyataan-kenyataan tentang istilah tersebut di atas. Dilihat dari sasaran atau tujuan dari istilah tersebut yang berkaitan dengan kemanusiaan, maka dapat diasumsikan bahwa semua pernyataan tersebut pada dasarnya mengarah pada bentuk atau sifatnya yang humanis atau kemanusiaan dalam artian kelompok, mengarah pada hubungan antar manusia sebagai anggota masyarakat atau kemasyarakatan. Sehingga dapat dimaksudkan bahwa social merupakan rangkaian norma, moral, nilai dan aturan yang bersumber dari kebudayaan suatu masyarakat atau komuniti yang digunakan sebagai acuan dalam berhubungan antar manusia.

Sosial disini yang dimaksudkan adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai acuan dalam berinteraksi antar manusia dalam konteks masyarakat atau komuniti, sebagai acuan berarti sosial bersifat abstrak yang berisi simbol-simbol berkaitan dengan pemahaman terhadap lingkungan, dan berfungsi untuk mengatur tindakan-tindakan yang dimunculkan oleh individu-individu sebagai anggota suatu masyarakat. Sehingga dengan demikian, sosial haruslah mencakup lebih dari seorang individu yang terikat pada satu kesatuan interaksi, karena lebih dari seorang individu berarti terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing individu yang saling berfungsi satu dengan lainnya. Dalam konteks ini, manusia diatur hak dan kewajibannya yang menunjukkan identitasnya dalam sebuah arena, dan sering disebut sebagai status, bagaimana individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah ada dalam perangkat pedoman yang ada yang dipakai sebagai acuan.

Dengan adanya pedoman yang menjadi acuan dalam bertindak dan berinteraksi antar sesama manusia sebagai anggota masyarakat maka keharmonisan dan fungsi dari masing masing hak dan kewajibannya akan dapat terwujud dalam konteks nyata. Perwujudan dari hak dan kewajiban berupa status tersebut dalam tindakan yang ada disebut juga sebagai peran-peran yang tampak. Status dengan demikian merupakan kumpulan dari hak serta kewajiban yang dikenakan pada seorang individu pada satu arena tertentu dan suasana tertentu, artinya bahwa status seorang individu akan berlaku pada satu arena tertentu dan tidak berlaku pada arena lainnya.

Dalam kehidupan suatu masyarakat atau komuniti, seorang individu akan berhubungan dengan individu lain



yang juga anggota masyarakat atau komuniti yang bersangkutan, dan hubungan tersebut tidak hanya dalam satu arena tertentu saja akan tetapi sangat berkaitan dengan kebutuhan dari manusia itu sendiri. Kebutuhan-kebutuhan manusia dalam rangka kehidupannya terwujud dalam bentuk-bentuk mata pencaharian, kesenian, bahasa dan struktur kemasyarakatan, kekerabatan, teknologi dan agama. Wujud pelaksanaan kebutuhan tersebut merupakan elemen dalam kebudayaan manusia, oleh karena itu masing-masing elemen tersebut memunculkan suasana-suasana tertentu yang sesuai dengan aktivitasnya.

Dengan dasar suasana dan arena yang manusia tersebut harus terlibat, maka otomatis, seorang individu sebagai anggota suatu masyarakat akan mempunyai banyak status berkaitan dengan suasana dan elemen budaya yang ada.

#### Contoh Kisah

Ketika Pak Bani sedang kesulitan uang untuk modal kerja, dia bermaksud untuk menghubungi Pak Kms. Hasan yang dikenal di kampungnya sebagai saudagar yang berhasil dan sangat dermawan. Maka dicarilah kesempatan untuk bertemu Pak Kms. Hasan. Kebetulan, pada suatu sore Pak Kms. Hasan datang ke rumah Pak Bani untuk bertemu dengan Pak Dirman kakak Pak Bani yang mempunyai keahlian sebagai tukang bangunan. Pak Kms. Hasan pergi mengunjungi Pak Dirman karena Pak Dirman adalah temannya bermain sejak kecil, dan sampai sekarang Pak Kms. Hasan masih bersahabat dengan Pak Dirman.

Pak Kms. Hasan mengunjungi Pak Dirman untuk meminta tolong dibetulkan pagar rumahnya yang rusak karena diseruduk kerbau. Mengetahui keperluan Pak Kms. Hasan kepada Pak Dirman, maka Pak Bani tidak jadi mengutarakan maksudnya untuk meminjam uang kepada Pak Kms. Hasan. Hal ini disebabkan karena Pak Kms. Hasan tidak dalam posisi sebagai saudagar yang sedang menjalankan aktivitasnya, akan tetapi sebagai orang yang sedang meminta tolong.

Dari kisah di atas, maka dapat ditengarai bahwa Pak Kms. Hasan menduduki dua status yaitu sebagai saudagar kaya di kampung dan sebagai seorang penduduk kampung teman Pak Dirman. Pak Kms. Hasan dengan statusnya sebagai teman Pak Dirman, ia mewujudkan peranannya meminta tolong kepada Pak Dirman, dan ketika sedang dalam suasana tersebut, Sodin tidak mungkin mengalihkan peran Pak Kms. Hasan menjadi seorang saudagar sekaligus dalam satu waktu.

#### Contoh Kisah

Seorang direktur sebuah perusahaan bernama Pak Yono, pada suatu waktu Pak Yono sedang berbicara dengan kliennya bernama Pak Samsudin. Keduanya terlibat pembicaraan mengenai perusahaan dalam bentuk perdagangan. Pada saat mereka berbicara, terdengar suara hand phone Pak Yono, kemudian Pak Yono memegang hand phone tersebut dan menjawab salam dari mana orang yang menelepon. Ternyata Pak Yono disibuk oleh adiknya yang bernama Pak Amir, dan menanyakan perihal ayah mereka. Keduanya, Pak Yono dan Pak Amir terlibat pembicaraan mengenai keluarga.

Dari kisah tersebut dapat kita tela'ah bahwa Pak Yono memerankan dua status sekaligus dalam satu waktu, yaitu sebagai rekan kerja dari Pak Samsudin dan kakak dari Pak Amir. Dari kenyataan tersebut maka status akan terikat pada pranata apa yang mengikat individunya dalam arena tertentu.

Kumpulan hak dan kewajiban atau status yang dimiliki oleh manusia tersebut pada dasarnya dapat terbagi dalam dua bagian besar yaitu perolehan (*ascribed*) dan pencapaian (*achieved*). Sebagai status perolehan, manusia tidak akan dapat merubahnya karena sudah secara kodrati diterima. Status perolehan ini akan diwujudkan oleh individu



yang menyandanginya, seperti laki-laki dan perempuan, anak si Pak Kms. Hasan, bapak si Pak Dirman, ibu si Syamsudin, pemuda atau pemudi berusia 25 tahun, orang tua, anak-anak dan seterusnya. Individu yang menyandanginya tidak akan dapat merubahnya, dan ini akan diwujudkan dalam bentuk nyata sebagai peran-peran sesuai dengan status yang disandanginya.

Di pihak lain, status pencapaian adalah kumpulan hak dan kewajiban yang disandang seseorang ketika orang tersebut berada pada status tertentu yang diperolehnya sehingga orang tersebut akan merubah tindakan dan tingkah lakunya dengan dasar status yang disandanginya, seperti seorang pemain badminton di sebuah kampung, dan karena seringnya dia berlatih kemudian mengikuti pertandingan tingkat nasional dan menjadi juara badminton tingkat nasional maka statusnya menjadi berubah, dari seorang pemain badminton tingkat dusun menjadi seorang juara badminton nasional. Sehingga otomatis tingkah laku dan tindakannya akan mengikuti hak dan kewajiban yang baru disandanginya.

Sering terjadi pertentangan dari peran-peran yang dilakukan oleh dua orang individu dalam satu arena interaksi. Pertentangan antar peran yang ada dalam individu berkaitan dengan pola yang ada dalam masyarakat dapat menjadi permasalahan yang dapat mengganggu pola yang sudah ada sebelumnya seperti adanya nepotisme.

#### Contoh Kisah

*Pak Yono dan Pak Amir adalah dua orang kakak beradik, Pak Yono adalah seorang pengusaha dan Pak Amir adalah seorang sarjana teknik lingkungan yang baru lulus. Pada suatu waktu Pak Yono*

*mendeklarasikan dirinya ahli mekanik untuk keperluan beraktivitasnya di perusahaan ayahnya. Dalam rangka tersebut, Mikail kemudian membuka sebuah usaha penitipan tenaga kerja ahli untuk menangani bagian produksi Pak Amir kemudian mendaftar di perusahaan Pak Yono. Tidak lama kemudian mereka telah memberikan pesan agar sesama saudara harus saling membantu.*

*Dari pembahasan penerimaan tenaga kerja, ternyata yang berhasil lebih banyak dua orang yang memenuhi kualifikasi penyalangan ijazah (pendidikan dan kemampuan umum (bahasa Inggris, pengetahuan umum), sehingga berinteraksi beberapa mekanik bernama Ayub dan seorang lagi Pak Amir. Dengan kondisi demikian maka muncul kebingungan dalam diri Pak Yono. Apabila mengikuti kepentingan perusahaan, maka yang berhak diterima adalah Pak Ayub karena sesuai dengan keperluan yang ada yaitu ahli mekanik di pabrik lain. Pak Yono dibebankan oleh keluarganya agar mereka anggota keluarga harus saling menolong, artinya dia harus menerima Pak Amir sebagai tenaga kerjanya walaupun tidak sesuai dengan bidang yang ada.*

Dari cerita tersebut maka dapat dilihat bahwa Pak Yono menduduki dua status sekaligus dalam satu waktu, sebagai pimpinan perusahaan atau sebagai kakak. Dengan adanya dua status yang ada, maka otomatis akan terdapat beberapa peran yang saling bertentangan satu dengan lainnya, peran-peran yang harus diwujudkan dalam konteks statusnya sebagai kakak dan peran-peran dalam konteks statusnya sebagai pimpinan perusahaan.

Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa satu status akan terdiri dari banyak peran atau peranan. Peran-peran yang diwujudkan oleh individu akan berupa tindakan-tindakan yang terkait dengan pranata sosial yang melingkupinya. Dalam konteks di atas apakah Pak Yono mewujudkan peran berkaitan dengan pranata keluarga, atau berkaitan dengan pranata mata pencaharian. Dari kenyataan tersebut maka tindakan yang muncul akan dapat



menggambarkan sedang mewujudkan pranata sosial apa si individu yang berinteraksi tersebut.

Untuk menggambarkan kehidupan suatu masyarakat, atau untuk menerapkan suatu bentuk pembangunan guna meningkatkan kehidupan masyarakat maka perlu adanya penelaahan terhadap sosial. Dalam konteks ini, sosial hanya dapat dipahami dengan melihat wujud nyatanya berupa tindakan-tindakan yang tampak yang dimunculkan oleh individu-individu sebagai anggota masyarakat yang bersangkutan. Dengan melihat dan mengidentifikasi tindakan-tindakan yang tampak maka kita dapat merekonstruksi pola-pola yang menyebabkan munculnya tindakan yang bersangkutan. Pola-pola yang terwujud tersebut akan mengacu pada pranata sosial yang membentuknya.

Pola-pola yang muncul dari pemahaman terhadap tindakan yang muncul yang digambarkan oleh individu-individu sebagai anggota masyarakat pada dasarnya tidak dapat dipahami dari sudut pandang peneliti dari luar masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu untuk dapat memahami pola-pola yang berupa sosial dalam masyarakat perlu bagi orang luar masyarakat untuk dapat hidup dan tinggal bersama masyarakat yang ditelitinya agar makna dari sosial yang berlaku dapat dipahami dengan mudah. Biasanya untuk memudahkan suatu program pengembangan masyarakat hal yang paling cepat memberikan hasil adalah dengan mengidentifikasi masalah sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Dengan melihat masalah sosial berarti akan tampak ketimpangan-ketimpangan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan melanggar 'pakem' atau pola yang sudah ada dalam masyarakat. Sehingga dengan demikian

menggambarkan suatu bentuk kehidupan sosial masyarakat dapat diidentifikasi dengan jelas dan fungsional dalam sistem yang sudah ada dan bekerja sebelumnya.

Pemetaan sosial' pada dasarnya adalah usaha untuk menggambarkan, mendeskripsikan mengidentifikasi norma, moral, nilai dan aturan yang digunakan oleh manusia sebagai anggota masyarakat untuk mengatur hubungan interaksi yang terjadi di dalamnya. Norma, moral, nilai dan aturan yang terwujud dalam konteks masyarakat biasanya berupa pranata-pranata yang berlaku dalam masyarakat dan bersumber dari kebudayaan yang dipakai oleh masyarakat yang bersangkutan, sehingga bersifat abstrak.

Pemetaan sosial adalah sebuah cara untuk memperoleh gambaran untuk mengenal kondisi sosial masyarakat. Pemetaan sosial adalah alat untuk mencari, mendeskripsikan, menganalisis dan memprediksi kondisi sosial suatu masyarakat. Dengan pemetaan sosial, pelaku program bisa memanfaatkan hasilnya untuk merancang program Community Development yang lebih sesuai kebutuhan dan tepat sasaran sehingga mengurangi resiko kegagalan. Perlu dicatat bahwa tidak ada aturan dan bahkan metoda tunggal yang secara sistematis dianggap paling unggul dalam melakukan pemetaan sosial. Prinsip utama bagi para praktisi pekerjaan sosial dalam melakukan pemetaan sosial adalah bahwa ia dapat mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dalam suatu wilayah tertentu secara spesifik yang dapat digunakan sebagai bahan membuat suatu keputusan terbaik dalam proses pertolongannya. Mengacu pada Netting, Kettner dan McMurtry (1993:68) ada tiga alasan utama mengapa para praktisi pekerjaan sosial memerlukan sebuah pendekatan sistematis dalam melakukan pemetaan sosial



Usaha melakukan pemetaan sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara atau metode penjarangan data atas gejala yang tampak, yaitu bisa dengan cara kuantitatif atau juga dengan kualitatif. Tetapi agar supaya gejala sosial yang diidentifikasi tersebut dapat tergambar dengan jelas dan berkaitan dengan kebudayaan yang dipegang oleh masyarakat yang bersangkutan, maka akan lebih baik lagi menggunakan metode kualitatif yang berisi tentang kualitas dari data yang diperoleh. Walaupun demikian, data-data sekunder tetap diperlukan untuk melihat perkembangan secara historis keadaan kenyataan yang terdeteksi dan pengalaman dari masyarakat dalam menghadapi keadaan-keadaan nyata yang pernah dialaminya.

Kejadian-kejadian nyata yang dialami oleh anggota masyarakat biasanya tercatat dalam buku catatan yang bersifat permanen dan berisi tentang data-data empiris pada masanya. Catatan-catatan ini biasanya berkenaan dengan jumlah penduduk, kepadatan penduduk, pola migrasi, angka kematian dan kelahiran serta kepemilikan yang ada pada masyarakat. Kedua data ini yaitu kualitatif dan kuantitatif menjadikan penggambaran kehidupan masyarakat dapat bersifat menyeluruh atau holistik. Yaitu menggambarkan secara keseluruhan aspek dari keadaan masyarakat dari setiap pranata yang ada di dalamnya. Selain penggambaran keadaan masyarakat secara keseluruhan baik secara diakronis atau historis juga tergambar secara sinkronis atau fungsional hubungan antar pranata yang berlaku di dalamnya yang berisi tentang kebiasaan-kebiasaan dari anggota-anggota masyarakat dalam mewujudkan status dan perannya dalam setiap pranata yang berlaku.

Pemetaan sosial secara mendalam sering dilakukan oleh para peneliti sosial khususnya antropologi dalam menggambarkan kehidupan secara menyeluruh suatu masyarakat suku bangsa dengan mengorbankan waktu berbulan-bulan untuk tinggal bersama masyarakat yang diteliti. Usaha yang dilakukan oleh para antropolog tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah data etnografi.

### A.3. Pengertian Pranata Sosial.

Dalam kehidupan sehari-hari, pengertian pranata sosial sering bias atau rancu dengan pengertian kelompok sosial atau asosiasi. Apalagi kalau menggunakan istilah lembaga sosial, organisasi sosial, atau lembaga kemasyarakatan. Pada uraian ini akan dijelaskan, bahkan ditagaskan, tentang pengertian pranata sosial, dan perbedaannya dengan kelompok sosial atau asosiasi.

Kita memaklumi jika dalam kehidupan masyarakat banyak terdapat institusi sosial, karena kegiatan manusia terdiri dari beragam bentuknya yang harus diatur agar terjaga keteraturan sosial. Apakah sesungguhnya pranata sosial? Banyak para ahli sosiologi yang memberikan pengertian tentang pranata sosial atau lembaga sosial. Di antaranya adalah Robert Mervin dan C.H. Page, sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto<sup>1</sup>, mengartikan pranata sosial adalah lembaga sosial sebagai prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat.

---

<sup>1</sup>Baca buku, Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1984, hlm. 69



Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat Leopold Von Wiese dan Becker<sup>5</sup>, lembaga sosial adalah jaringan proses hubungan antar manusia dan antar kelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu serta pola-polanya sesuai dengan minat dan kepentingan individu dan kelompoknya. Sedangkan W.G. Sumner<sup>6</sup>, melihat lembaga dari sudut pandang kebudayaan. Pranata sosial adalah lembaga sosial yang merupakan perbuatan, cita-cita, sikap, dan perlengkapan kebudayaan yang mempunyai sikap kekal serta yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Pengertian ini juga sejalan dengan pendapat Koentjaraningrat<sup>7</sup>, dimana lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia.

Berdasarkan pengertian pranata sosial seperti diungkapkan di atas, Anda dapat mengambil kesimpulan dan cobalah rumuskan tentang pengertian pranata sosial. Horton dan Hunt<sup>8</sup>, mendefinisikan pranata sosial sebagai lembaga sosial, yaitu sistem norma untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting. Di dalam sebuah pranata sosial akan ditemukan seperangkat nilai dan

<sup>5</sup>Ibid, hlm.51

<sup>6</sup>Ibid, hlm.69

<sup>7</sup>Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Jakarta: PT. Gramedia, 1974, hlm. 75.

<sup>8</sup>Paul B Horton, dan Chester L Hunt, 1991, *Sosiologi*, Edisi 6, Terj. Aminudin, Jakarta: Erlangga, 1991, hlm. 186.

pranata sosial yang berfungsi mengorganisir (menata) aktivitas dan hubungan sosial di antara para warga masyarakat dengan suatu prosedur umum sehingga para warga masyarakat dapat melakukan kegiatan atau memenuhi kebutuhan hidupnya yang pokok. Koentjaraningrat<sup>9</sup>, menyatakan bahwa pranata sosial adalah sistem-sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan warga masyarakat untuk berinteraksi menurut pola-pola atau sistem tatakelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.

Terdapat tiga kata kunci dalam setiap pembahasan tentang pranata sosial, yaitu: (1) nilai dan norma sosial, (2) pola perilaku yang dibakukan atau yang disebut dengan prosedur umum, dan (3) sistem hubungan, yaitu jaringan peran serta status yang menjadi wahana untuk melaksanakan perilaku sesuai dengan prosedur umum yang berlaku. Pranata sosial pada dasarnya bukan merupakan sesuatu yang kongkrit, dalam arti tidak selalu hal-hal yang ada dalam suatu pranata sosial dapat diamati atau dapat dilihat secara empirik (kasat mata). Tidak semua unsur dalam suatu pranata sosial mempunyai perwujudan fisik. Bahkan, pranata sosial lebih bersifat konsepsional, artinya keberadaan atau eksistensinya hanya dapat ditangkap dan difahami melalui pemikiran, atau hanya dapat dibayangkan dalam imajinasi sebagai suatu konsep atau konstruksi yang ada di alam pikiran. Beberapa

<sup>9</sup>Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1979, hlm. 10



unsur pranata dapat diamati atau dilihat, misalnya perilakuperilaku individu atau kelompok ketika melangsungkan hubungan atau interaksi social dengan sesamanya.

Hal penting yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa seorang individu atau sekelompok orang dapat saja datang dan pergi dalam suatu lembaga, tetapi fungsi individu atau kelompok dalam pranata hanyalah sebagai pelaksana fungsi atau pelaksana kerja dari suatu unsur lembaga sosial. Kedatangan atau kepergian individu atau sekelompok individu tidak akan mengganggu eksistensi dari suatu lembaga sosial. Individu atau sekelompok individu di dalam pranata sosial, kedatangannya atau kepergiannya hanyalah berfungsi saling menggantikan.

Pranata sosial berasal dari istilah bahasa Inggris *social institution*. Istilah-istilah lain pranata sosial ialah lembaga sosial dan bangunan sosial. Walaupun istilah yang digunakan berbeda-beda, tetapi *social institution* menunjuk pada unsur-unsur yang mengatur perilaku anggota masyarakat.

Pranata juga berasal dari bahasa latin *instituere* yang berarti mendirikan. Kata bendanya adalah *institution* yang berarti pendirian. Dalam bahasa Indonesia *institution* diartikan institusi (pranata) dan institut (lembaga). Institusi adalah sistem norma atau aturan yang ada. Institut adalah wujud nyata dari norma-norma. Pranata adalah seperangkat aturan yang berkisar pada kegiatan atau kebutuhan tertentu. Pranata termasuk kebutuhan sosial. Seperangkat aturan yang terdapat dalam pranata termasuk kebutuhan sosial yang berpedoman kebudayaan. Pranata merupakan seperangkat aturan, bersifat abstrak.

Jalan lanjut menurut Koentjaraningrat<sup>10</sup>, Pranata sosial pada hakikatnya bukan merupakan sesuatu yang bersifat empirik, karena sesuatu yang empirik unsur-unsur yang terdapat didalamnya selalu dapat dilihat dan diamati. Sedangkan pada pranata sosial unsur-unsur yang ada tidak semuanya mempunyai perwujudan fisik. Pranata sosial ialah suatu yang bersifat konsepsional, artinya bahwa dimengerti hanya dapat ditangkap dan dipahami melalui pikiran pikir, dan hanya dapat dibayangkan dalam imajinasi sebagai suatu konsep atau konstruksi pikir.

Unsur-unsur dalam pranata sosial bukanlah individu-individu manusianya itu, akan tetapi kedudukan-kedudukan yang ditempati oleh para individu itu beserta aturan tingkah lakunya. Dengan demikian pranata sosial merupakan bangunan atau konstruksi dari seperangkat peranan-peranan dan aturan-aturan tingkah laku yang terorganisir. Aturan tingkah laku tersebut dalam kajian antropologi sering disebut dengan istilah "norma-norma sosial".

Herskovits<sup>11</sup>, mengatakan bahwa pranata sosial itu tidak lain adalah wujud dari respon-respon yang diformulasikan dan disistematiskan dari segala kebutuhan hidup. Secara lebih rinci mendefinisikan pranata sosial itu sebagai satu konsep yang kompleks dan sikap-sikap yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antara manusia tertentu yang tidak dapat dielakkan, yang timbul karena dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan elementer individual,

<sup>10</sup>Ibid, hlm. 107

<sup>11</sup>Melville, J. Herskovits, *Cultural Anthropology*, New York: Alfred A. Knopf, 1955, p.157



kebutuhan-kebutuhan sosial yang wajib atau dipenuhinya tujuan-tujuan sosial penting. Konsep-konsep itu berbentuk keharusan-keharusan dan kebiasaan, tradisi, dan peraturan. Secara individual paranta sosial itu mengambil bentuk berupa satu kebiasaan yang dikondisikan oleh individu di dalam kelompok, dan secara sosial pranata sosial itu merupakan suatu struktur. Kemudian Elwood pranata sosial itu dapat juga dikatakan sebagai satu adat kebiasaan dalam kehidupan bersama yang mempunyai sanksi, yang disistematiskan dan dibentuk oleh kewibawaan masyarakat. Pranata sosial yang penting adalah hak milik, perkawinan, religi, sistem hukum, sistem kekerabatan, dan edukasi.

#### B. Perbedaan Pranata Sosial dengan Lembaga Sosial

*Institution* (pranata) adalah sistem norma atau aturan yang menyangkut suatu aktivitas masyarakat yang bersifat khusus. Sedangkan *institute* (lembaga) adalah badan atau organisasi yang melaksanakannya. Lembaga sosial merupakan wadah/tempat dari aturan-aturan khusus, wujudnya berupa organisasi atau asosiasi. Contohnya KUA, mesjid, sekolah, partai, CV, dan sebagainya. Sedangkan pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan yang mengatur perilaku dan hubungan antara anggota masyarakat agar hidup aman, tenteram dan harmonis. Dengan bahasa sehari-hari kita sebut "aturan main/cara main". Jadi peranan pranata sosial sebagai pedoman kita berperilaku supaya terjadi keseimbangan sosial. Pranata sosial merupakan kesepakatan tidak tertulis namun diakui sebagai aturan tata perilaku dan sopan santun pergaulan. Contoh: kalau makan tidak berbunyi, di Indonesia pengguna jalan ada di kiri badan jalan, tidak boleh melanggar hak orang lain, dan sebagainya.

lembaga sosial bersifat konkret, sedangkan pranata sosial bersifat abstrak, namun keduanya saling berkaitan.

Pranata adalah seperangkat aturan yang berkisar pada kegiatan atau kebutuhan tertentu. Pranata termasuk kebutuhan sosial, seperangkat aturan yang terdapat dalam pranata termasuk kebutuhan sosial yang berpedoman kebudayaan. Pranata merupakan seperangkat aturan, bersifat abstrak. Wujud nyata dari pranata adalah lembaga. Untuk jelasnya lihat tabel berikut ini:

Tabel  
Pranata dan Lembaga

No	Kegiatan dan Kebutuhan	Pranata	Lembaga
1	Makanan, pakaian, perumahan	Perdagangan	Keluarga Abimanyu
2	Peran serta politik	Pemilihan umum	Komisi Pemilihan Umum
3	Pengembangan keturunan	Pernikahan	KUA, Catatan Sipil, Gereja



### C. Proses Pertumbuhan Pranata Sosial dan Cara mempelajarinya.

#### Pertumbuhan Pranata Sosial

Keberadaan pranata sosial dalam kehidupan masyarakat, bukanlah merupakan sesuatu yang bersifat statis. Karena fungsinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang beraneka ragam dan selalu berubah-ubah, maka pranata sosial pun dapat mengalami perubahan sesuai dengan fungsinya tersebut. Perubahan pada pranata sosial dapat terjadi pranata sosial tertentu sudah tidak memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara keseluruhan, maka pranata sosial tersebut harus diubah.

Proses perubahannya itu berlangsung dalam interaksi di dalam masyarakat. Perubahan pranata sosial tidak dapat dilakukan oleh seseorang, sekalipun orang tersebut memiliki kekuasaan. Karena itu, walaupun pranata sosial bisa berubah tetapi dalam kenyataannya sulit dilakukan. Hal ini sangat tergantung pada beberapa hal seperti:

1. Proses internalisasi pranata sosial yang dialami sejak lahir sampai meninggal, merupakan proses waktu yang relatif lama.
2. Adanya kontrol sosial, yang pada dasarnya merupakan suatu mekanisme dalam kehidupan masyarakat yang dijalankan untuk menjamin agar individu mematuhi norma-norma yang berlaku.

Dalam hal ini antara internalisasi dan kontrol sosial mempunyai kaitan yang sangat erat dimana keduanya berlangsung dalam suatu proses interaksi sosial. Sedangkan perbedaannya internalisasi menghasilkan kepatuhan pada individu baik melalui paksaan atau rayuan berbagai pihak dalam masyarakat.

#### Kontrol Sosial

Contohnya Anda sudah tidak merasa asing dengan norma sosial atau lebih dikenal dengan aturan-aturan dalam masyarakat. Sebelum mempelajari norma sosial, Anda harus memahami terlebih dulu perbedaan antara norma dengan nilai. Norma merupakan pedoman atau patokan bagi perilaku dan tindakan seseorang atau masyarakat yang berdasarkan pada nilai. Sedangkan nilai adalah merupakan hal yang dianggap baik atau buruk atau sebagai penghargaan yang diberikan masyarakat kepada segala sesuatu yang mempunyai daya guna bagi kehidupan bersama. Dengan kata lain, norma adalah wujud konkrit dari nilai yang merupakan pedoman, berisi suatu keharusan bagi individu atau masyarakat, dapat juga norma dikatakan sebagai cara untuk melakukan tindakan dan perilaku yang dibenarkan untuk mendapatkan nilai-nilai.

Contoh:

Pak Dadang mengendarai motor dengan kecepatan 80 km/jam. Pa Bagja mengendarai mobil di jalan tol dengan kecepatan yang sama.

Dari dua contoh tersebut, siapakah yang melanggar norma? Marilah kita buat kesimpulan tentang norma sosial. (1) perilaku sama tetapi norma dapat berbeda; (2) perilaku sama mendapatkan/ tidak sanksi; (3) norma sosial tidak berlaku universal; (4) norma sosial dibatasi waktu dan tempat; dan (5) norma sosial ada yang bersifat universal. Anda telah mengetahui bahwa nilai adalah 'ukuran' yang dihargai oleh masyarakat. Jadi nilai adalah sesuatu yang abstrak. Oleh karena itu, untuk melaksanakan nilai, diperlukan norma sebagai pedoman berperilaku, baik berupa suatu keharusan, anjuran maupun larangan. Dengan kata



lain, norma sosial ialah ukuran sosial yang menentukan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dimiliki, dipercaya, dan dikehendaki oleh seseorang sebagai anggota suatu masyarakat.

Norma merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Bila nilai adalah sesuatu yang baik, diinginkan dan dicita-citakan oleh masyarakat, maka norma merupakan aturan bertindak atau berbuat yang dibenarkan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Norma dianggap positif apabila dianjurkan atau diwajibkan oleh lingkungan sosialnya. Sedangkan norma dianggap negatif, apabila tindakan atau perilaku seseorang dilarang dalam lingkungan sosialnya. Karena norma sosial sebagai ukuran untuk berperilaku, maka diperlukan adanya sanksi bagi individu yang melanggar norma. Mengapa seseorang yang melanggar norma harus diberikan sanksi? Karena seseorang yang melanggar norma harus diberikan penyadaran bahwa perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan aturan.

Norma merupakan patokan berperilaku agar terjadi keteraturan di masyarakat. Norma muncul dan tumbuh dari proses kemasyarakatan, sebagai hasil dari proses bermasyarakat. Pada mulanya, norma-norma yang terdapat dalam masyarakat terbentuk secara tidak sengaja. Namun, lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Contoh: dahulu di dalam jual-beli, seorang perantara tidak harus diberi bagian dari keuntungan. Akan tetapi, lama-kelamaan terjadi kebiasaan bahwa perantara harus mendapat bagiannya, bahkan selanjutnya ditentukan siapa yang harus menanggung pembagian tersebut, penjual atau pembeli; contoh lain, misalnya dahulu orang meminjamkan uang didasarkan pada saling percaya, tetapi

akibat terjadinya penyelewengan-penyelewengan maka dibuatlah surat perjanjian tertulis sebagai jaminannya.

Ukuran pokok norma sosial adalah tekanan sosial terhadap setiap anggota masyarakat untuk menjalankan norma. Apabila di masyarakat terdapat suatu aturan, tetapi tidak dikuatkan oleh desakan sosial, maka aturan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai norma sosial. Karena itu aturan dapat dikatakan sebagai norma sosial apabila mendapat sifat kemasyarakatan yang dijadikan patokan dalam tindakan atau perilaku. Masyarakat memiliki dua arti norma, yaitu: norma budaya sebagai aturan terhadap perilaku individu atau kelompok yang diharapkan oleh masyarakat; dan norma statis suatu ukuran perilaku yang sebenarnya berlaku di masyarakat, baik yang disetujui atau tidak.

Norma sosial kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma yang lemah dan kuat, berdasarkan kekuatannya tersebut, terdapat empat jenis norma, yaitu:

1. Cara (*usage*), penyimpangan terhadap cara tidak akan mendapat hukuman yang berat, tetapi hanya celaan. Contohnya orang yang makan dengan bersuara, cara makan tanpa sendok dan garpu.
2. Kebiasaan (*folkways*), perbuatan yang diulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar dibandingkan dengan cara. Bila tidak dilakukan dapat dianggap menyimpang dari kebiasaan umum dalam masyarakat. Contohnya, memberi hormat kepada orang tua yang lebih tua, mendahulukan kaum wanita waktu antri.



3. Tata kelakuan (*mores*), kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku saja, tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur.
4. Adat istiadat (*custom*), yaitu tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih besar, sehingga apabila dilanggar maka mendapat sanksi dari masyarakat. Walaupun kekuatan norma bersifat mengikat dan memaksa akan tetapi pengetahuan dan keadaan yang baru dapat menyebabkan perkembangan norma sosial. Karena itu, norma sosial bukan sesuatu ketentuan yang tetap tetapi berubah dari waktu ke waktu.

Dalam masyarakat dikenal tiga norma yang mengatur pola perilaku setiap individu, yaitu:

- 1) Norma tidak tertulis yang dilakukan (*informal*) masyarakat dan telah melembaga, lambat laun akan menjadi peraturan tertulis. Walaupun sifatnya tidak baku tetapi tergantung pada kebutuhan di masyarakat, hal ini dapat juga merupakan gabungan dari *folk-way* dan *mores*, seperti pembentukan keluarga, cara membesarkan anak. Dari lembaga sosial terkecil sampai masyarakat, akan mengenal norma perilaku, nilai cita-cita dan sistem hubungan sosial. Karena itu suatu lembaga akan mencakup:
  - a) seperangkat pola perilaku yang telah distandarisasi dengan baik;
  - b) serangkaian tata kelakuan, sikap dan nilai-nilai yang mendukung; dan

3) membentuk tradisi, ritual, upacara simbolik dan pakuatan alat serta perlengkapan yang lain.

2) Norma tertulis (*formal*), biasanya dalam bentuk peraturan atau hukum yang telah dibakukan dan berlaku di masyarakat. Contoh:

a) Norma ini umumnya berhubungan dengan kepentingan dan ketentraman warga masyarakat banyak, seperti mengganggu gadis yang lewat, bergerombol di gang.

b) Norma ini bertujuan mengatur dan menegakkan kehidupan masyarakat, agar merasa tentram dan aman dari segala gangguan yang dapat meresahkannya. Norma ini disebut juga peraturan atau hukum. Seseorang yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan dan disetujui masyarakat, maka orang yang bersangkutan akan dikenakan sanksi.

3) Tindakan atau perbuatan yang dilakukan individu atau sekelompok masyarakat berupa iseng atau meniru tindakan orang lain. Norma ini akan mengaturnya sepanjang perbuatan tersebut tidak menyimpang dari norma masyarakat yang berlaku. Contoh: Individu meniru pakaian atau penampilan anggota kelompok musik tertentu, sebagai idolnya; Potongan rambut gondrong atau dikucir, dan lain-lain, yang sifatnya berupa mode atau fashion yang setiap waktu senantiasa mengalami perubahan.

Terdapat lima norma yang umumnya berlaku dalam kehidupan masyarakat, yaitu:



### 1. Norma kesopanan/etika

Adalah norma yang berpangkal pada aturan tingkah laku yang diakui di masyarakat, seperti cara berpakaian, cara bersikap dan berbicara dalam bergaul. Norma ini bersifat relatif, berarti terdapat perbedaan yang disesuaikan dengan tempat, lingkungan, dan waktu. Dengan kata lain, norma ini merupakan suatu aturan yang mengatur agar masyarakat berperilaku dengan sopan. Jika terjadi pelanggaran pada norma etika, maka tentu saja akan mendapat sanksi berupa teguran atau hukuman.

### 2. Norma kesusilaan

Norma ini mengatur bagaimana seseorang dapat berperilaku secara baik dengan pertimbangan moral atau didasarkan pada hati nurani atau ahlak manusia. Norma ini bersifat universal, dimana setiap orang di seluruh dunia mengakui dan menganut norma ini. Akan tetapi, bentuk dan perwujudannya mungkin berbeda. Contoh: tindakan perkosaan tentu ditolak oleh masyarakat di manapun.

### 3. Norma agama

Didasarkan pada ajaran atau akidah suatu agama. Norma ini menuntut ketaatan mutlak setiap penganutnya. Dalam agama terdapat perintah dan larangan yang harus dijalankan para pemeluknya. Apabila seseorang melanggar perintah Tuhannya, maka ia akan mendapat dosa. Demikian sebaliknya, apabila ia melaksanakan perintah-Nya, maka ia akan mendapatkan pahala sebagai ganjarannya. Karena agama didasarkan pada suatu keyakinan, maka bagi masyarakat yang agamis norma ini akan sangat efektif untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat.

### 1. Norma hukum

Norma ini merupakan jenis norma yang paling jelas dan tegas dasarnya karena merupakan norma yang baku. Berdasarkan pada perintah dan larangan yang mengatur tata laku dalam suatu masyarakat dengan ketentuan yang sah dan melalui proses hukum sebagai pihak yang berwenang menetapkan sanksi. Contoh: seorang terdakwa yang terbukti pembunuhan berencana divonis oleh hakim dengan hukuman minimal 15 tahun.

### 2. Norma kebiasaan

Berdasarkan pada hasil perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama, sehingga menjadi suatu kebiasaan. Contoh: Mudik di hari raya.

Pada dasarnya, setiap anggota masyarakat mengetahui, mengerti, menghargai, dan menginginkan keberadaan norma yang mengatur pola perilaku dalam masyarakat demi terciptanya kehidupan yang tertib dan aman. Namun, dalam pelaksanaannya selalu ada penyimpangan. Karena itu, norma harus selalu diinternalisasikan, sehingga tumbuh kesadaran bersama dari seluruh anggota masyarakat untuk menaati norma tersebut.

Selain hal-hal di atas, agar aturan-aturan atau norma-norma sosial dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat, maka norma-norma tersebut harus melembaga (*institutionalized*). Agar norma sosial bisa melembaga, maka sebelumnya harus diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai oleh warga masyarakatnya.



a) Diketahui

Gejala awal dari suatu aturan sosial yang telah melembaga adalah apabila norma-norma tersebut telah diketahui oleh setiap anggota masyarakat, namun taraf pelebagaannya masih lemah. Contoh: seorang murid tentu akan mengetahui tata tertib di sekolah.

b) Dipahami

Taraf pelebagaan akan meningkat apabila setiap anggota masyarakat memahami fungsi dari suatu lembaga sosial. Contohnya: setiap anggota masyarakat memahami bahwa sekolah bukan hanya sebagai lembaga sosial yang memuat peraturan dan tata tertib yang harus ditaati oleh seluruh siswa. Sebagai perwujudan lembaga pendidikan, sekolah juga harus memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh masyarakat.

c) Ditaati

Menaati norma dalam bentuk sikap dan perilaku yang selaras aturan-aturan sosial merupakan indikasi bahwa taraf pelebagaan suatu norma berkembang pada taraf yang lebih tinggi. Norma sosial senantiasa dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan.

d) Dihargai

Pelebagaan suatu norma dikategorikan mencapai taraf sempurna, apabila norma sosial telah tertanam dalam diri setiap anggota masyarakat. Dengan kata lain, setiap anggota masyarakat selalu berkeinginan untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, serta berupaya agar norma-norma tersebut senantiasa hidup

di dalam masyarakat. Contoh: Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan negara bagi rakyat Indonesia.

Proses pelebagaan (*institutionalized*) sebenarnya tidak berhenti demikian saja, akan tetapi dapat berlangsung menjadi *internalized* dalam masyarakat. Maksudnya adalah suatu taraf perkembangan dimana para anggota masyarakat dengan sendirinya ingin berperilaku sejalan dengan perilaku yang memang sebenarnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, norma-norma sosial telah terinternalisasi dalam setiap anggota masyarakat.

### Sistem Pengendalian Sosial (*Social control*)

Apakah Anda dapat membedakan antara peneddaian sosial dengan pengawasan sosial? Dalam kehidupan sehari-hari sistem pengendalian sosial seringkali diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pemerintah beserta aparaturannya. Sebenarnya, pengendalian sosial memiliki arti yang lebih luas yang mencakup pengertian segala proses, baik yang direncanakan atau tidak, bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Jadi pengendalian sosial dapat dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya (misalnya seorang guru mendidik siswanya agar menyesuaikan diri pada aturan-aturan yang berlaku di sekolahnya), dilakukan oleh individu terhadap suatu kelompok (misalnya seorang dosen pada perguruan tinggi memimpin beberapa orang mahasiswa dalam kuliah-kuliah kerja), dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya. Ini semua merupakan proses pengendalian sosial dalam kehidupan sehari-hari, yang kadang kurang kita sadari.



Pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Atau suatu sistem pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai suatu keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan/keseimbangan.

Berdasarkan sifatnya, pengendalian sosial bersifat preventif dan represif, atau bahkan kedua-duanya. Preventif merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan pada keserasian. Sedangkan represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Usaha-usaha preventif misalnya melalui proses sosialisasi, pendidikan formal maupun non formal. Sedangkan represif berwujud penjatuhan sanksi terhadap para warga masyarakat yang melanggar atau menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku.

Suatu proses kontrol sosial dapat dilaksanakan dengan cara tanpa kekerasan (*persuasive*) atau dengan paksaan (*coersive*). Selain kedua cara tersebut, dikenal pula teknik-teknik *compulsion* dan *pervasion*. *Compulsion* dilaksanakan dengan menciptakan situasi sedemikian rupa, sehingga seseorang terpaksa taat atau mengubah sikapnya, yang menghasilkan kepatuhan secara tidak langsung. Sedangkan pada *pervasion* norma yang ada di ulang-ulang penyampaian dengan harapan bahwa hal tersebut masuk dalam aspek bawah sadar seseorang.

Dengan demikian orang tersebut akan merubah sikapnya, sehingga serasi dengan hal-hal yang diulang-ulang penyampaian itu. Pendidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah, merupakan salah satu alat pengendalian sosial yang telah melembaga baik pada masyarakat bersahaja

maupun yang sudah kompleks. Hukum di dalam arti luas juga merupakan alat pengendalian sosial yang biasanya dianggap paling ampuh, karena lazimnya disertai sanksi tegas yang berwujud penderitaan dan dianggap sebagai sarana formal.

1. Berdasarkan kekuatan pengikatnya: terbentuk melalui cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*) dan adat (*custom*)<sup>12</sup>
2. Berdasarkan proses norma-norma dalam pembentukannya sebagai lembaga yaitu proses pelembagaan (*institutionalization*), yaitu dikenal, diakui, dihargai dan ditaati dalam kehidupan serta norma-norma yang internalized yaitu norma telah meresap dalam jiwa anggota masyarakat.
3. Unsur penting pranata sosial yaitu
  - a. berkaitan dengan kebutuhan pokok
  - b. merupakan seperangkat aturan
  - c. merupakan cara bertindak yang mengikat

Adapun cara Mempelajari Pranata Sosial, yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Analisis secara historis, bertujuan meneliti sejarah timbul dan berkembangnya
2. Analisis komparatif, bertujuan menelaah suatu lembaga tertentu dalam berbagai masyarakat berlainan atau berbagai lapisan sosial masyarakat

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *op-dit*, hlm. 174.



3. 3. Analisis fungsional, yaitu menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga dalam masyarakat

### BAB III

#### CIRI-CIRI DAN TIPE-TIPE PRANATA SOSIAL

##### A. Ciri-Ciri Pranata Sosial

Ciri-ciri atau Karakteristik umum dari Pranata Sosial yang dikemukakan oleh John Levis Gillin dan John Phillpe Gillin<sup>1)</sup>, sebagai berikut;

- 1) Pranata Sosial terdiri dari seperangkat organisasi daripada pemikiran-pemikiran dan pola-pola perikelakuan yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan. Karakteristik ini menegaskan kembali bahwa pranata sosial terdiri dari sekumpulan norma-norma sosial dan peranan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. norma-norma sosial ini merupakan unsur abstraknya dari pranata sosial, sedangkan sekumpulan dari peranan-peranan sosial seolah-olah merupakan perwujudan konkret dari pranata sosial, karena menampakkan diri sebagai bentuk asosiasi atau lembaga.
- 2) Pranata sosial itu relative mempunyai tingkat kekebalan tertentu. Artinya, pranata sosial itu pada umumnya mempunyai daya tahan tertentu yang tidak lekas lenyap dalam kehidupan bermasyarakat. panjangnya umur pranata sosial itu pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya karena pranata sosial itu

---

<sup>1)</sup>John Levis Gillin dan John Phillpe Gillin, *Cultural Change*, New York: The Macmillan, 1954, p. 174



terdiri dari norma-norma sosial, dimana norma-norma sosial ini terbentuk melalui proses yang tidak mudah dan relative lama. Sementara itu norma-norma sosial itu pada umumnya berorientasi pada kebutuhan pokok dari kehidupan masyarakat, sehingga sewajarnya apabila pranata sosial kemudian dipelihara sebaik-baiknya oleh setiap warga masyarakat, karena pranata sosial itu memiliki nilai-nilai yang tinggi. Kekebalan pranata sosial juga dipengaruhi oleh usaha dari para warga masyarakat untuk semakin mengukuhkan atau melestarikan bahwa ada kecenderungan manusia untuk memperoleh serta meningkatkan kedudukan seseorang akan meningkat pula peranan yang dimainkan dalam kehidupannya.

- 3) Pranata sosial itu mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan diwujudkan. Tujuan dasarnya adalah merupakan pedoman serta arah yang ingin dicapai. Oleh Karena itu, tujuan akan motivasi ataupun mendorong manusia untuk mengusahakan serta bertindak agar tujuan itu dapat terwujud. Dengan tujuan inilah maka merangsang pranata sosial untuk dapat melaksanakan fungsinya, akan tetapi hal ini bukanlah dimaksudkan bahwa adanya tujuan akan menjamin berfungsinya pranata sosial. Oleh karena itu apabila pranata sosial telah mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai, tetapi pranata sosial itu sendiri tidak dapat menjalankan fungsinya, maka tujuan tersebut akan mandul atau steril. Tidaklah mungkin dapat terjadi ada pranata sosial berfungsi, tetapi tidak mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian maka dapatlah dikatakan bahwa tujuan pranata sosial

itu dapat tercapai apabila fungsinya dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Di dalam pranata sosial, yang dimaksud dengan tujuan adalah sesuatu yang harus dicapai oleh golongan masyarakat tertentu dan golongan masyarakat yang bersangkutan akan berpegang teguh padanya. Sebaliknya, yang dimaksud dengan fungsi pranata sosial adalah merupakan peranan pranata dalam sistem sosial dan kebudayaan masyarakat. Adakalanya fungsi pranata sosial itu tidak diketahui ataupun tidak disadari oleh sekelompok masyarakat yang menjadi anggotanya, dan sering kali terjadi fungsi itu baru disadari setelah diwujudkan dan ternyata berbeda dengan tujuannya.

- 4) Pranata sosial merupakan alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuannya. Alat-alat perlengkapan pranata sosial dimaksudkan agar pranata yang bersangkutan dapat melaksanakan fungsinya guna mencapai tujuan yang diinginkan. Peralatan yang diperlukan atau yang dimiliki setiap pranata sosial tergantung dari jenis pranata yang bersangkutan. Peralatan pranata sosial dapat pula bersifat hardware maupun software, seperti adanya sarana maupun prasarana yang harus tersedia untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.
- 5) Pranata sosial pada umumnya dilakukan dalam bentuk lambang-lambang. Lambang disamping merupakan spesifikasi dari suatu pranata sosial, juga tidak jarang dimaksudkan untuk pencerminan secara simbolis yang menggambarkan tujuan dan fungsi pranata sosial yang bersangkutan. Lambang dari suatu pranata sosial dapat berupa gambar sesuatu, tulisan maupun slogan-slogan.



Lambang pranata sosial secara umum dapat dikategorikan dalam dua hal. Pertama, lambang atau simbol yang bersifat presentasional, yaitu lambang yang dapat menghadirkan pranata yang bersangkutan, misalnya burung garuda dan bendera merah putih akan menghadirkan Negara Republik Indonesia. Lambang yang bersifat presentasional ini biasanya mengandung nilai-nilai dari tujuannya juga bersifat sakral. Kedua, adalah lambang yang bersifat discursive, yaitu lambang yang tidak ada kaitan atau tidak ada sambungannya dengan tujuan, fungsi maupun nilai-nilai yang terkandung di dalam pranata sosial yang bersangkutan, sehingga lambang yang dipergunakan itu biasanya sekedar untuk menunjukkan spesifikasi dari pranata sosial yang bersangkutan.

- 6) Pranata sosial mempunyai dokumen baik yang tertulis maupun tidak. Dokumen ini dimaksudkan menjadi suatu landasan atau pangkal tolak untuk mencapai tujuan serta melaksanakan fungsinya. Oleh karena itu, dokumen yang tertulis dapat merupakan landasan pranata yang autentik dipergunakan sebagai pedoman, dan dokumen ini sebenarnya adalah merupakan konkretisasi dari karakteristik yang pertama.

Sedangkan Harsojo, sebagaimana dikutip Epon Ningrum dkk<sup>14</sup>, mengemukakan enam sifat umum pranata sosial, yaitu:

<sup>14</sup>Epon Ningrum dkk, *Tempat Ruang dan Sistem Sosial* Bandung: UPI Press, 2006, hlm. 139

1. Pranata sosial berfungsi sebagai satu unit dalam sistem kebudayaan yang merupakan satu kesatuan bulat;
2. Pranata sosial biasanya mempunyai berbagai tujuan yang jelas;
3. Pranata sosial biasanya relatif kokoh;
4. Pranata sosial dalam melakukan fungsinya sering mempergunakan hasil kebudayaan material;
5. Sifat karakteristik yang ada pada pranata sosial adalah lambang; dan
6. Pranata sosial biasanya mempunyai tradisi tertulis atau lisan yang jelas.

Suatu lembaga atau organisasi sosial dapat dikatakan sebagai pranata sosial apabila memenuhi persyaratan. Menurut Suhendi<sup>15</sup>, terdapat empat syarat bagi lembaga atau organisasi sosial agar menjadi pranata sosial, yaitu:

- a. Harus memiliki aturan atau norma yang hidup dalam ingatan atau yang tertulis.
- b. Aktivitas aktivitas bersama itu harus memiliki suatu sistem hubungan yang didasarkan atas norma-norma tertentu.
- c. Aktivitas aktivitas bersama itu harus memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu yang disadari dan dipahami oleh kelompok masyarakat bersangkutan.
- d. Harus memiliki peralatan dan perlengkapan.

Dengan demikian bahwa pranata sosial adalah merupakan norma yang ada di masyarakat yang relatif, di

<sup>15</sup>Ibid



mana warga masyarakatnya memiliki fungsi masing-masing untuk mendukung pranata sosial tersebut agar berfungsi bagi keteraturan dan integrasi sosial.

## B. Tipe-Tipe Pranata Sosial

Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam pranata sosial, dimana satu dengan yang lainnya sering adanya terjadi perbedaan-perbedaan maupun persamaan-persamaan tertentu. Persamaan dari berbagai pranata sosial itu diantaranya, disamping pada umumnya bertujuan untuk mengatur pertumbuhan pemenuhan kebutuhan warganya, juga karena pranata itu sendiri terdiri dari seperangkat kaidah dan peranan sosial. Sedangkan perbedaannya, seperti yang dikemukakan oleh J.L. Gillin dan J. P. Gillin<sup>16</sup>, bahwa pranata sosial itu diantaranya dapat diklasifikasikan menurut:

### 1. Tingkat kompleksitas penyebarannya

Besar kecilnya atau luas sempitnya penyebaran atau jangkauan pranata sosial dalam kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bermacam-macam factor. Faktor dari dalam pranata sosial terkandung nilai-nilai tertentu, sehingga kemampuan nilai-nilai untuk memenuhi kebutuhan manusia itulah yang turut menentukan luas sempitnya penyebarannya. Selain hal itu juga diwarnai oleh peranan-peranan yang dipentaskan oleh para individu yang terdapat di dalam pranata sosial yang bersangkutan, sehingga semakin besar yang dapat dibawa oleh para individu itu semakin besar pula kemungkinan dapat menyebar dalam kehidupan

masyarakat. Factor yang berasal dari luar pranata sosial itu diantaranya adalah bagaimana persepsi dan kepentingan masyarakat terhadap nilai serta peranan yang dimiliki oleh pranata sosial, sehingga adanya tanggapan yang baik dan kepentingan yang kuat akan memberi peluang yang lebar untuk dapat diterima serta menyebar luas di masyarakat. Dengan mendasarkan diri pada tingkat kompleksitas penyebarannya itu, maka pranata sosial dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu;

#### a) *General Social Institutions* (Lembaga Sosial Umum).

Pranata sosial ini hampir terdapat di setiap bentuk masyarakat, sehingga bersifat universal. Pranata sosial jenis ini merupakan wahana atau tempat dari berbagai pranata sosial yang sejenis yang relatif lebih kecil, karenanya sifat dari pranata sosial ini dapat dikatakan netral, umum atau tidak memihak terhadap komponen atau unsur-unsur yang terdapat didalamnya. Seperti agama, adalah salah satu contoh pranata sosial yang bersifat universal atau umum, yang menghimpun dari berbagai macam agama tertentu, tanpa memihak terhadap salah satu agama tertentu tersebut. Pranata sosial yang bersifat universal ini mempunyai tingkat kompleksitas yang lebih luas dan banyak dibandingkan dengan pranata yang bersifat khusus.

#### b) *Restricted Social Institutions* (Lembaga Sosial Terbatas).

Pranata sosial ini pada umumnya mempunyai corak yang khas atau khusus dalam kehidupan bermasyarakat. Kenyataan ini dipengaruhi oleh kaidah-kaidah serta peranan-peranan yang terdapat didalam pranata itu

<sup>16</sup>John Levis Gillin dan John Phillpe Gillin, *op-cit*



mempunyai kekhususan. Karena sifatnya yang demikian maka pola penyebarannya relative lebih terbatas dibanding dengan pranata yang umum. Hal ini juga disebabkan oleh relative kecilnya kepentingan serta terbaginya minat warga ke dalam pranata lain yang bercorak khusus. Oleh karena itu, pranata ini daya jangkanya hanya terbatas pada kelompok, kelas ataupun golongan tertentu saja, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa seorang warga dapat melakukan perpindahan dari suatu pranata sejenis yang khusus ini ke pranata yang lain. Seperti telah dikemukakan terdahulu, bahwa pranata sosial yang bersifat umum misalnya adalah agama, sedang pranata sosial yang khusus adalah agama tertentu, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan lain sebagainya.

## 2. Orientasi Nilainya

Dari segi orientasi nilainya, maka pranata sosial dapat digolongkan sebagai berikut:

### a. Basic Sosial Institutions

Pranata sosial yang bersifat dasar atau utama ini harus ada dalam setiap kehidupan masyarakat, karena terdiri dari kaidah sosial yang memiliki nilai sangat pokok atau utama bagi kelangsungan hidup masyarakat. Seperti kaidah yang mengatur pemenuhan hajat hidup manusia, mempunyai nilai paling utama, oleh karena itu pranata sosial yang mengaturnya pun bersifat primer. Primernya suatu pranata sosial sangat dipengaruhi oleh pentingnya kaidah yang mempunyai nilai sangat tinggi untuk menjamin kelangsungan

kehidupan masyarakat, sehingga apabila dalam kehidupan masyarakat tidak terdapat pranata sosial yang bersifat primer ini maka kelangsungan hidup manusia akan terancam. Sebab apabila tidak ada pranata sosial yang primer berarti tidak ada kaidah sosial yang mengatur pemenuhan kebutuhan pokok hidup manusia secara tertib dan teratur. Dengan demikian, ketidak tertiban pemenuhan hajat hidup itu disebabkan oleh tidak adanya norma sosial yang sekaligus tidak adanya sanksi, sehingga sewajarnya apabila individu yang mempunyai kemampuan lebih dari yang lain akan mendominasi pihak yang lemah.

namun, mengingat hajat hidup itu tidak dapat disubstitusi atau digantikan dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang lain, maka bagaimanapun pihak yang lemah akan selalu berusaha untuk memperoleh bagian. Padahal seperti yang telah kita ketahui, sumber pemenuhan itu jumlahnya relatif tetap, atau bahkan semakin berkurang, sementara jumlah pihak yang mengharapkan terpenuhinya hajat hidupnya semakin banyak, sehingga di dalam masyarakat tersebut pertentangan sukar untuk dihindari. Dengan kenyataan demikian, maka pranata sosial yang bersifat primer itu mutlak diperlukan bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat. Bila mendasarkan diri bahwa kelangsungan kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh pemenuhan tiga hajat hidup, maka pranata sosial yang harus ada atau primer setidaknya juga terdiri dari tiga pranata sosial. Seperti hajat untuk makan, harus ada pranata ekonomi dalam arti yang luas. Hajat untuk berkembang biak dan hajat



biologis, diperlukan kaidah yang terangkum di dalam pranata keluarga dan perkawinan. Sedangkan hajat untuk mendapat perlindungan sangat diperlukan pranata sosial pemerintahan dalam arti yang luas termasuk juga disini pranata pendidikan dan pranata politik.

b. *Subsidiary Sosial Institutions*

Pranata sosial sekunder didukung oleh kaidah sosial yang nilai-nilainya dianggap kurang penting untuk menunjang kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, jika di dalam kehidupan bermasyarakat tidak menggunakan pranata sekunder tidaklah mempengaruhi kelangsungan kehidupannya. Sehingga penggunaan pranata ini hanya merupakan tambahan untuk memperoleh kenikmatan dalam hidup.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa ada masyarakat tertentu di suatu saat dan tempat tertentu, mempunyai anggapan terhadap pranata sosial sekunder itu sebagai pranata primer. Hal ini diantaranya dipengaruhi oleh perubahan struktur masyarakat dan kemampuan pranata sekunder untuk mengait terhadap pranata primer. Misalnya dalam masyarakat yang sudah maju, terdapat beberapa kebutuhan sekunder yang kegiatannya dikaitkan dengan kegiatan primer. Seperti untuk memperoleh kesehatan, rasa keindahan, rasa seni dan pengembangan diri secara bertahap dikaitkan dengan kegiatan ekonomi.

Klasifikasi lembaga-lembaga sosial tersebut menunjukkan bahwa di dalam setiap masyarakat akan

dijumpai bermacam-macam lembaga sosial. Setiap masyarakat mempunyai sistem nilai yang menentukan lembaga sosial manakah yang dianggap sebagai pusat dan yang kemudian dianggap berada di atas lembaga-lembaga sosial lainnya. Pada masyarakat totaliter misalnya, negara dianggap sebagai lembaga sosial pokok yang membawahi lembaga-lembaga lainnya seperti keluarga, hak milik, perusahaan, sekolah, dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam setiap masyarakat akan dijumpai pola-pola yang mengatur hubungan antar lembaga sosial tersebut. Sistem pola hubungan-hubungan tersebut lazimnya disebut *institutional configuration*. Sistem tadi, dalam masyarakat yang homogen dan tradisional, mempunyai kecenderungan untuk bersifat statis. Lain halnya pada masyarakat yang sudah kompleks dan terbuka bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial-kebudayaan, sistem tersebut sering mengalami kegoncangan-kegoncangan. Karena dengan masuknya hal-hal baru, masyarakat mempunyai anggapan-anggapan baru tentang norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokoknya.

Secara garis besar, munculnya pranata sosial dapat diklasifikasikan ke dalam dua cara, yakni secara tidak terencana dan secara terencana. Secara tidak terencana artinya bahwa lembaga tersebut lahir secara bertahap (derangsur-angsur) dalam praktik kehidupan masyarakat. Hal ini biasanya terjadi ketika manusia dihadapkan pada masalah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Contoh, dalam kehidupan ekonomi, ketika sistem barter (tukar barang) sudah dianggap tidak efisien, maka masyarakat menggunakan mata uang untuk mendapatkan barang yang diinginkan dari orang lain.



Sedangkan secara terencana berarti bahwa lembaga sosial muncul melalui suatu perencanaan yang matang oleh seorang atau kelompok orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Contoh, untuk meningkatkan kesejahteraan petani maka pemerintah membentuk KUD yang bisa menampung hasil panen dan membelinya dengan harga yang menguntungkan petani.

## BAB IV TUJUAN DAN FUNGSI PRANATA SOSIAL

### A. Tujuan Pranata Sosial

Secara umum, tujuan utama diciptakannya pranata sosial yaitu untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai, dan untuk mengatur agar kehidupan sosial warga masyarakat bisa berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Sebagai contoh, pranata keluarga mengatur bagaimana keluarga harus memelihara anak. Sementara itu, pranata pendidikan mengatur bagaimana sekolah harus mendidik anak-anak hingga menghasilkan lulusan yang handal. Tanpa adanya pranata sosial, kehidupan manusia nyaris bisa dipastikan bakal porak-poranda karena jumlah prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia relatif terbatas, sementara jumlah warga masyarakat yang membutuhkan justru semakin lama semakin banyak.

Untuk mewujudkan tujuannya, menurut Soerjono Soekanto<sup>1)</sup>, pranata sosial didalam masyarakat harus dilaksanakan dengan fungsi-fungsi berikut:

- 1) Memberi pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana bertindak atau bersikap didalam usaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

---

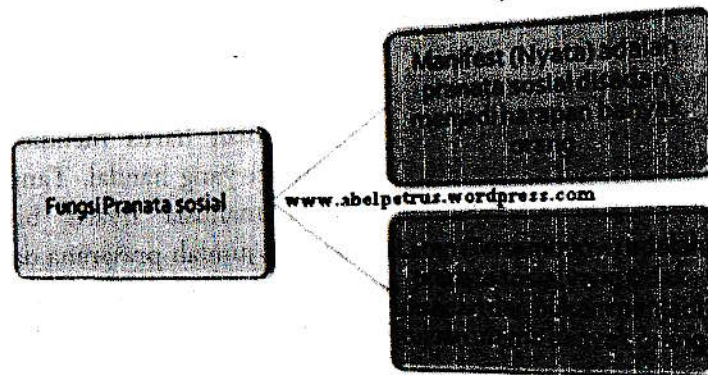
<sup>1)</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 47



2. Menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan atau disintegrasi masyarakat.
3. Berfungsi untuk memberikan pegangan dalam mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*).

#### B. Fungsi Pranata Sosial

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa Pranata Sosial memiliki fungsi utama, yakni seperti pada bagan berikut:



Apabila dijabarkan fungsi pranata sosial adalah sebagai berikut:

1. Menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan atau disintegrasi masyarakat. Hal ini mengingat bahwa sumber pemenuhan kebutuhan hidup yang dapat dikatakan tidak seimbang dengan jumlah manusia yang semakin bertambah baik kuantitas maupun kualitasnya sehingga dimungkinkan pertentangan yang bersumber perebutan maupun ketidakadilan dalam usaha memenuhi kebutuhannya akan ancaman kesatuan dari warga

masyarakat. Oleh karena itu, norma-norma sosial yang terdapat di dalam pranata sosial akan berfungsi untuk mengatur pemenuhan kebutuhan hidup dari setiap warganya secara adil atau memadai, sehingga dapat terwujudnya kesatuan yang tertib.

2. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat untuk bertindak laku / bersikap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian pranata sosial telah siap dengan berbagai aturan atau kaidah-kaidah sosial yang dapat dan harus dipergunakan oleh setiap anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Memberi pegangan pada masyarakat untuk menandakan sistem pengendalian sosial (*social control*). Sanksi-sanksi atau pelanggaran norma-norma sosial merupakan sarana agar setiap warga masyarakat tetap konform dengan norma-norma sosial itu, sehingga tertib sosial dapat terwujud. Dengan demikian sanksi yang melekat pada setiap norma sosial itu merupakan pegangan dari warga untuk meluruskan maupun memaksa warga masyarakat agar tidak menyimpang dari norma sosial, karena pranata sosial akan tetap tegar di tengah kehidupan masyarakat.

Dari beberapa pengertian pranata sosial yang dikemukakan beberapa tokoh sosiologi dan antropologi tersebut, maka lembaga sosial berkaitan dengan:

- a. Seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung, dan saling mempengaruhi;
- b. Seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, dan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup;



- c. Seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur.
- d. Fungsi pranata sosial atau lembaga sosial adalah agar ada keteraturan dan integrasi di dalam masyarakat.

Pranata sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia, pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
- b. Menjaga keutuhan masyarakat
- c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotaanggotanya.

Fungsi-fungsinya di atas menyatakan bahwa betapa pentingnya keberadaan pranata sosial bagi masyarakat dan kebudayaannya. Dengan demikian, apabila Anda hendak mempelajari kebudayaan dan masyarakat tertentu, maka harus pula diperhatikan secara teliti lembaga-lembaga kemasyarakatan di masyarakat yang bersangkutan.

## BAB V MACAM MACAM PRANATA SOSIAL

### A. Macam Macam Pranata Sosial

Pranata sosial pada dasarnya adalah sistem norma yang mengatur segala tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dalam hidup bermasyarakat. Seperti yang telah dijelaskan di depan, pranata sosial di masyarakat mempunyai beberapa fungsi. Fungsi-fungsi pranata tersebut terwujud dalam setiap macam pranata yang ada di masyarakat. Adapun macam-macam pranata sosial yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, antara lain pranata keluarga, pranata agama, pranata ekonomi, pranata pendidikan, dan pranata politik.<sup>18</sup>

#### 1. Pranata Keluarga

##### 1.1. Pengertian Pranata Keluarga

Pranata keluarga adalah bagian dari pranata sosial yang meliputi lingkungan keluarga dan kerabat. Pembentukan watak dan perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh pranata keluarga yang dialami dan diterapkannya sejak kecil. Bagi masyarakat, pranata keluarga berfungsi untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat. Pranata keluarga yang dasar utamanya adalah kasih sayang diantara sesama anggota keluarga dengan

<sup>18</sup> Ikhsan Wigan Abdullah, *Sosiologi*, Jakarta: Grasindo, 2006,



tujuan utamanya untuk pengembangbiakan dan pemanusiaan manusia<sup>19</sup>.

Menurut Soenjono Soekanto<sup>20</sup> pranata keluarga merupakan sistem norma dan tata cara yang diterima untuk menyelesaikan beberapa tugas penting. Keluarga berperan membina anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya di mana ia berada. Bila semua anggota sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan di mana ia tinggal maka kehidupan masyarakat akan tercipta menjadi kehidupan yang tenang, aman dan tenteram.

Pranata keluarga merupakan sistem norma dan tata cara yang diterima untuk menyelesaikan beberapa tugas penting. Keluarga berperan membina anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya di mana ia berada. Bila semua anggota sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan di mana ia tinggal maka kehidupan masyarakat akan tercipta menjadi kehidupan yang tenang, aman dan tenteram.

---

<sup>19</sup>Suparlan, Parsudi, *Orang Sakai Di Riau: Masyarakat Terasing dalam Masyarakat Indonesia: Kajian Mengenai Perubahan dan Kelestarian Kebudayaan Sakai dalam Proses Transformasi Mereka ke dalam Masyarakat Indonesia melalui Proyek Pemulihan Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing*, Departemen Sosial, Republik Indonesia, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1995, hlm. 5

<sup>20</sup>Soekanto, Soerjono, *Beberapa Teori Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta CV. Rajawali, 1984, hlm. 89

Keluarga adalah lembaga sosial dasar darimana semua lembaga atau pranata sosialnya berkembang. Di masyarakat manapun di dunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu. Keluarga dapat digolongkan ke dalam kelompok penting, selain karena para anggotanya saling mengadakan kontak langsung juga karena adanya keintiman dari para anggotanya.

Menurut Horton dan Hunt<sup>21</sup>, istilah keluarga umumnya digunakan untuk menunjuk beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Suatu kelompok yang memiliki nenek moyang yang sama
2. Suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan perkawinan
3. Pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak
4. Pasangan yang nikah dan mempunyai anak
5. Satu orang atau entah duda atau janda dengan beberapa anak

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Kesimpulannya bahwa dalam bentuknya yang paling dasar, sebuah keluarga terdiri atas seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan pernikahan, dan ditambah

---

<sup>21</sup>Paul B Horton dan Chester L Hunt, *Sosiologi*, Edisi 6, Jilid 1, Amman, Jakarta: Erlangga, 1991, hlm. 57



dengan anak-anak mereka yang biasanya tinggal dalam satu rumah yang sama.

Berkaitan dengan ciri-ciri keluarga antara lain ialah:

1. Merupakan suatu kelompok sosial yang terdiri dari berbagai usia dan jenis kelamin.
2. Minimal 2 orang dari mereka mempunyai hubungan sebagai suami istri yang diakui oleh masyarakat dan mempunyai anggota keluarga melalui suatu pernikahan yang sah.
3. Mempunyai seperangkat aturan sosial tertentu yang diakui dan dijalankan bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga.
4. Mempunyai fungsi pokok, diantaranya fungsi reproduksi (melahirkan anak), fungsi ekonomi (memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan rumah), fungsi sosialisasi, dan fungsi perlindungan.
5. Menempati tempat tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Sedangkan Aturan-aturan dalam keluarga. Pada umumnya aturan-aturan dalam keluarga menuntut para anggotanya untuk menaatinya. Di dalam keluarga setiap anggota saling memberi dan saling menerima berbagai pengetahuan dan saling mengingatkan untuk menghindari perbuatan atau tingkah laku yang tidak diharapkan. Didalamnya ada beberapa konsep yang harus dipelajari dan ditaati. Seperti konsep tentang agama, agama merupakan tuntunan hidup yang dapat membina mental atau rohani agar berkeyakinan pada tuhan dan menuntun manusia menjadi orang yang selalu berbuat baik dan berbudi luhur.

Konsep tentang tata krama/sopan santun adalah suatu tata cara atau aturan yang turun temurun dan berkembang dalam suatu budaya masyarakat yang bermanfaat dalam pergaulan, agar terjalin hubungan yang akrab, saling pengertian, dan hormat menghormati.

Konsep kerukunan berdasarkan keyakinan bahwa pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup sendiri. Suatu keluarga dianggap rukun apabila terdapat hubungan yang erat lahir batin, tenang, tentram, bahagia, bersatu padu dalam suka maupun duka. Konsep ketaatan anak terhadap orang tua, bahwa anak harus patuh dan menghormati peraturan orang tua tanpa rasa paksa atau tulus. Konsep disiplin dan tanggung jawab, apabila segala hal dikerjakan dengan teratur sehingga kewajiban dan tugasnya dapat selesai dengan waktunya. Konsep tentang kemandirian, apabila segala hal termasuk kebutuhannya telah dapat di laksanakan dan dikerjakan sendiri sesuai dengan kemampuan dan posisi dalam keluarga itu sendiri.

### 1.2 Pranata Sosial Keluarga Inti

Seperti lembaga sosial lain, pranata keluarga adalah suatu sistem norma dan tata cara yang diterima untuk menyelesaikan sejumlah tugas penting. Beberapa pranata sosial dasar yang berhubungan dengan keluarga inti (*nuclear family*) adalah sebagai berikut:

#### 1.2.1 Pranata Kencan

Kencan merupakan perjanjian sosial yang secara tradisional dilakukan oleh dua orang individu yang berlainan jenis kelamin untuk mendapatkan kesenangan. Pada umumnya kencan ini mengawali suatu perkawinan dalam



keluarga. Jadi fungsi kencan yang sebenarnya adalah supaya kedua belah pihak saling kenal-mengenal, selain itu juga memberi kesimpulan pada kedua belah pihak untuk menyelidiki kepribadian dari mereka masing-masing sebelum mereka berdua mengikatkan diri pada suatu perkawinan. Sistem ini diikuti oleh semua keluarga di dunia.

#### 1.2.2. Pranata pemenangan (*courtship*)

Kencan merupakan langkah pertama dalam rangkaian untuk menetapkan peranan utama keluarga. Apabila kencan sudah mantap, maka dapat dilanjutkan dengan peminangan. Jadi, pemenangan merupakan kelanjutan dari kencan dan diartikan sebagai pergaulan yang tertutup dari dua individu yang bertujuan untuk kawin. Selama taraf peminangan, mereka dapat memperbandingkan dengan teliti mengenai cita-citanya. Jadi fungsi peminangan adalah menguji kesejajaran pasangan dalam segala hal seperti yang telah disebutkan di atas, dan ujian ini diharapkan tidak mengancam perkawinan yang akan datang.

#### 1.2.3. Pranata Pertunangan (*mate-selection*)

Antara peminangan dan perkawinan dikenal adanya lembaga pertunangan. Lembaga pertunangan dapat diartikan sebagai pengenalan secara formal antara dua orang individu yang berniat akan kawin dan diumumkan secara resmi. Jadi perhitungan merupakan kelanjutan daripada peminangan sebelum terjadi perkawinan.

#### 1.2.4. Pranata Perkawinan (*Marriage*)

Pranata terakhir yang berhubungan dengan keluarga inti, yaitu perkawinan. Artinya sesungguhnya dan

perkawinan adalah penerimaan status baru, dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru, serta pengakuan akan status baru oleh orang lain. Perkawinan merupakan persatuan dari dua atau lebih individu yang berlainan jenis seks dengan persetujuan masyarakat. Seperti dikatakan Horton dan Hunt, perkawinan adalah pola sosial yang disetujui dengan cara mana dua orang atau lebih membentuk keluarga, dan dalam perkawinan mempunyai fungsi-fungsi.

#### 1.3. Fungsi Keluarga

##### 1.3.1. Fungsi Reproduksi

Salah satu tujuan sepasang suami-isteri untuk membangun sebuah keluarga ialah untuk memperoleh keturunan. Mereka ingin agar insan lain yang melanjutkan generasinya. Ada yang cemas apabila dalam perkawinan ternyata mereka tidak mendapatkan anak. Ada yang kecewa apabila anak mereka cacat. Ada yang bangga karena mereka mempunyai anak seperti yang mereka harapkan. Meskipun ada pengecualian di sana-sini, bagaimanapun anak tetap merupakan buah cinta kasih berdua. Anak adalah dambaan pasangan yang baru saja menapaki jenjang pernikahan.

##### 1.3.2. Fungsi Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu proses di mana seseorang mengalami secara perlahan-lahan kehidupan bersama orang lain. Di dalam keluarga, anak diajak dan diberitahu bagaimana harus hidup bersama dengan orang lain, diajak dan diberitahu bagaimana anak harus hadir dalam kehidupan yang luas di kalangan masyarakat. Dalam keluarga, kita diajar bagaimana menyapa orang lain dengan sebutan ibu, guru, bapak guru, dan lain-lain.



Dari keluargalah kita belajar mengenal ada sopan santun yang harus dipakai di tengah-tengah kehidupan bersama. Dengan demikian, anak yang lahir dari sebuah keluarga mengetahui bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Dalam interaksi, anak diajak mempelajari status dan peranan masing-masing anggota. Ayah, ibu, kakak dan adik, dan mereka mempunyai peranan yang berbeda. Dengan demikian, secara perlahan-lahan anak ditatapkan pada kehidupan nyata yang ada di masyarakat yang kompleks dengan status dan peranan.

### 1.3.3. Fungsi Afeksi

Setiap insan diciptakan untuk hidup bersama orang lain. Ia tidak akan mampu hidup sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan rasa kasih sayang atau rasa cinta (afeksi). Di dalam keluargalah untuk pertama kalinya seorang anak mendapatkan rasa dicintai. Ia merasa memiliki seorang ibu yang sayang kepadanya dengan penuh perhatian memberikan apa yang dimintanya, dengan ketulusan memberikan apa yang terbaik buat anaknya.

### 1.3.4. Fungsi Penentu kedudukan atau status

Setiap orang memiliki status atau kedudukannya sendiri di dalam masyarakat. Bagi orang yang berpendapat bahwa status itu bisa didapatkan karena keturunan (*ascribed status*) kedudukan itu diwariskan secara turun temurun. Seorang anak yang lahir dari kalangan bangsawan dengan sendirinya ia akan mempunyai status bangsawan. Tetapi tidak mengurangi kemungkinan bahkan dalam kehidupan kolonial sekalipun adanya status yang diperolehnya menurut

kemampuan dan prestasi pribadi. Status seperti ini tidak dapat diwariskan.

### 1.3.5. Fungsi Perlindungan

Fungsi ini adalah melindungi seluruh anggota dari berbagai bahaya yang dialami oleh suatu keluarga. Perlindungan yang diberikan tidak hanya perlindungan fisik saja, melainkan juga secara psikis. Tidak hanya dari panas dan hujan tetapi dari suasana.

### 1.3.6. Fungsi Ekonomi

Keluarga merupakan satu kesatuan yang bekerjasama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup keluarga tersebut. Bagi umumnya keluarga, ayah merupakan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan material, walaupun anggota keluarga lain (ibu dan anak-anak yang sudah dewasa) juga bekerja.

## 1.4. Masalah Sosial dalam Keluarga

### 1.4.1. Masalah *broken home*

Jika keluarga tidak dapat menjaga keutuhannya, maka keluarga yang bersangkutan akan mengalami apa yang dinamakan *broken home*. Yang dimaksud keutuhan keluarga, yaitu keutuhan struktur dalam keluarga di mana dalam keluarga, di samping adanya seorang ayah, juga adanya seorang ibu beserta anak-anaknya. Selain itu adanya keharmonisan dalam keluarga di mana di antara anggota keluarga itu saling bertemu muka dan berinteraksi satu sama lainnya. Dalam keluarga yang *broken home*, di mana sering terjadi perecekan di antara orang tua dan saling



bermusuhan disertai tindakan-tindakan yang agresif, maka dengan sendirinya keluarga yang bersangkutan akan mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga yang sebenarnya.

#### 1.4.2. Perceraian

Seperti diketahui bahwa putusnya satu perkawinan disebabkan karena salah satu meninggal dunia atau perceraian. Perceraian sangat berat akibatnya, misalnya sosialisasi anak, pembagian harta warisan, pencari nafkah, dan lain-lain. Dengan akibat-akibat ini meskipun perceraian diperbolehkan maka bukan berarti bahwa masyarakat menyenangi adanya perceraian. Oleh karena itu kemudian perceraian ini diatur oleh Undang-Undang Hukum Perdata.

#### 1.4.3. Disorganisasi Keluarga

Disorganisasi keluarga dapat diartikan sebagai perpecahan dalam keluarga sebagai suatu unit, oleh karena anggota-anggota keluarga tersebut gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan peranan sosialnya. Disorganisasi keluarga mungkin terjadi pada masyarakat-masyarakat sederhana, oleh karena umpamanya seorang suami sebagai kepala keluarga gagal dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer keluarganya atau mungkin karena dia mengambil seorang isteri lagi. Pada umumnya problema-problema tersebut disebabkan karena kesulitan kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan kebudayaan. Disorganisasi karena perceraian kurang sekali sebab pada umumnya perceraian dianggap sebagai suatu nodus yang akibatnya berat sekali, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun bagi kelompoknya.

Keluarga merupakan unit masyarakat yang terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.

Keluarga mempunyai banyak fungsi penting yaitu:

- a) Fungsi Reproduksi: Keluarga merupakan lembaga yang fungsinya mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Dalam masyarakat yang beradab, keluarga adalah satu-satunya tempat untuk tujuan itu. Berlangsungnya fungsi reproduksi berkaitan erat dengan aktivitas seksual laki-laki dan wanita. Dengan berkeluarga, manusia dapat melanjutkan keturunan secara tepat, wajar, dan teratur di lihat dari segi moral, cultural, sosial, dan kesehatan.
- b) Fungsi Afeksi: Salah satu kebutuhan manusia adalah kasih sayang atau rasa saling mencintai. Apabila kebutuhan kasih sayang tidak terpenuhi, keluarga akan mendapatkan gangguan emosional, masalah perilaku, dan kesehatan fisik.
- c) Fungsi Sosialisasi: Keluarga merupakan tempat sosialisasi pertama dan paling utama bagi anak sehingga kelak dapat berperan dengan baik di masyarakat. Keluarga sebagai media sosialisasi kelompok primeryang pertama bagi seorang anak, dan dari situlah perkembangan kepribadian dimulai. Pada saat anak sudah cukup umur untuk memasuki kelompok atau media sosialisasi lain diluar keluarga. Pondasi dasar kepribadian anak sudah tertanam secara kuat, dan kepribadiannya pun sudah terarah dengan baik melalui keluarga.



- d) Fungsi Ekonomi: Keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota keluarganya. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, semua anggota keluarga melakukan kerja sama. Pada umumnya, seorang suami melakukan kegiatan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan keluarga, sedangkan isteri berfungsi mengatur keuangan dan belanja keluarga.

## 2. Pranata Ekonomi

### 2.1. Pengertian

Secara umum, ekonomi diartikan sebagai cabang ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang serta kekayaan (seperti halnya keuangan, perindustrian, dan perdagangan). Dalam hal ini, ekonomi diartikan sebagai tata tindakan dalam memanfaatkan uang, tenaga, waktu, atau barang-barang berharga lainnya.

### 2.2. Ideologi

Liberalism, tanggung jawab, manajerial, kebebasan berusaha, hak buruh. Lembaga ekonomi berisi pranata-pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia untuk mata pencaharian hidup, memproduksi, menimbun, menyimpan dan mendistribusikan hasil produksi dan harta. lembaga ekonomi merupakan sesuatu hal yang mempengaruhi perkembangan masyarakat, pekerjaan, dan institusi yang berkaitan dengan dunia usaha. Contoh pertanian, peternakan, koperasi, industri, barter, penggudangan, perbankan dan sebagainya.

## 2.3. Tujuan

1. Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan.
2. Memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang/barter.
3. Memberi pedoman tentang harga jual beli barang.
4. Memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja.
5. Memberi pedoman tentang cara pengupahan.
6. Memberi pedoman tentang cara keputusan hubungan kerja
7. Memberikan identitas diri bagi masyarakat

## 2.4. Fungsi

### a. Fungsi Manifes/Nyata:

1. Secara umum, fungsi manifes setiap tipe lembaga ekonomi adalah untuk mengatur hubungan antarpelaku ekonomi dan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi semaksimal mungkin. Selain mengatur kegiatan produksi, lembaga ini juga mengatur distribusi barang dan jasa serta pemakaiannya (konsumsi) untuk kelangsungan hidup manusia.
2. Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Adanya lembaga ekonomi memberikan sebuah pedoman atau suatu pegangan dalam mendapatkan bahan pangan sesuai dengan keinginan dari manusia itu sendiri.
3. Memberi pedoman untuk barter dan jual beli barang. Lembaga ekonomi mengajarkan suatu transaksi, dimana transaksi disini adalah adanya pertukaran barang dengan barang lain sesuai dengan batas ukuran menurut manusia itu sendiri yang dianggap



sama, atau pertukaran yang dilakukan menggunakan uang untuk mendapatkan barang tertentu, dalam hal ini disebut sebagai jual beli.

4. Memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja dan cara pengupahan. Orang akan berpikir untuk mencari orang lain untuk membantu dalam menyelesaikan suatu pekerjaannya ketika pekerjaan yang ia lakukan tidak sanggup untuk dikerjakannya sendiri, karena secara kodrati manusia memiliki naluri gregariousness dimana manusia yang satu tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain.
5. Memberi pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Ketika memang dalam suatu pekerjaan, apa yang dihasilkan oleh orang yang disebut sebagai pekerja tidak bisa optimal atau memuaskan dalam pekerjaannya, maka lembaga sosial disini yang berperan lebih untuk mengatur bagaimana cara pemutusan hubungan kerja yang baik.
6. Memberi identitas diri bagi masyarakat. Identitas disini adalah pengakuan bahwa seseorang memiliki sesuatu untuk dihargai dalam bidang ekonomi yang berupa pekerjaan. Dan pekerjaan inilah yang menentukan seseorang akan ditempatkan di posisi yang mana dalam status sosialnya.

#### b. Fungsi Laten/Tidak Nyata

1. Merusak nilai-nilai dan norma tradisional penguasaan atas hak milik tanah secara pribadi adalah salah satu perubahan yang dibawa oleh lembaga ekonomi. Akibatnya, hanya orang-orang

kaya yang mampu memiliki hak milik atas tanah, sedangkan orang-orang miskin akan tersisih menjadi buruh penggarap atau penyewa yang harus berbagi keuntungan dengan tuan tanah.

Industrialisasi di kota-kota besar juga mengubah nilai dan norma sosial yang telah mapan. Urbanisasi memberikan tantangan dan harapan baik maupun buruk bagi masyarakat Kota dan Desa. Kepadatan penduduk di Kota meningkat dengan segala resikonya, sementara itu di desa kekurangan tenaga kerja profesional.

2. Masyarakat mengalami alienasi (rasa keterasingan) dan anomie

Dunia industri yang berkembang pesat memporak-porandakan ikatan-ikatan sosial tradisional yang telah mapan. Sifat masyarakat yang dulu guyub dan akrab (*geminschaft*) berubah menjadi formal dan impersonal (*gesellschaft*). Hubungan antarwarga masyarakat terasa kering, tidak ada lagi rasa kekeluargaan. Sementara itu pesatnya kegiatan ekonomi membuat norma-norma sosial lama yang telah mapan menjadi lemah, sedangkan norma baru masih dalam pertanyaan. Hal ini mengakibatkan anomie (kekaburan norma) di masyarakat, seolah-olah masyarakat tidak mempunyai pegangan dalam bertindak.

3. Kerusakan lingkungan

Eksplorasi sumber daya alam oleh kegiatan industri membawa dampak negative bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Nafsu untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin menyebabkan kepedulian terhadap kelestarian alam



terabaikan. Semua kegiatan industri selain mendatangkan keuntungan juga mendatangkan kerugian. Kerugian dapat berupa banyaknya limbah, baik berupa sampah, zat kimia, suara, debu, maupun asap. Lingkungan menjadi tercemar dan kesehatan masyarakat pun menurun.

## 2.5. Simbol

Uang, barang jadi, barang mentah, merek dagang, hak paten, slogan, lagu komersial.

## 2.6. Alat Perlengkapan

Toko, pabrik, pasar, kantor, blanko, formulir, kontrak, lisensi, hak monopoli, akte perusahaan.

## 2.7. Pola-Pola Politik Ekonomi

2.7.1. Sistem feodalisme: seperangkat lembaga politik dan ekonomi yang menempatkan pemilik tanah (raja) dan prajurit yang menjaga keamanan sebagai pelindung warga, harta benda, dan hak penggunaan tanah. Feodalisme menempatkan posisi petani penggarap dan kaum bangsawan secara diskriminatif. Sistem ini berlaku sebelum abad ke-20.

2.7.2. Sistem merkantilisme: sistem ekonomi yang menempatkan negara bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan segenap kegiatan ekonomi termasuk melarang masuknya seseorang yang memiliki keterampilan atau mata pencaharian satu ke mata pencaharian lain.

terabaikan. Semua kegiatan industri selain mendatangkan keuntungan juga mendatangkan kerugian. Kerugian dapat berupa banyaknya limbah, baik berupa sampah, zat kimia, suara, debu, maupun asap. Lingkungan menjadi tercemar dan kesehatan masyarakat pun menurun.

## 2.5. Simbol

Uang, barang jadi, barang mentah, merek dagang, hak paten, slogan, lagu komersial.

## 2.6. Alat Perlengkapan

Toko, pabrik, pasar, kantor, blanko, formulir, kontrak, lisensi, hak monopoli, akte perusahaan.

## 2.7. Pola-Pola Politik Ekonomi

2.7.1. Sistem feodalisme: seperangkat lembaga politik dan ekonomi yang menempatkan pemilik tanah (raja) dan prajurit yang menjaga keamanan sebagai pelindung warga, harta benda, dan hak penggunaan tanah. Feodalisme menempatkan posisi petani penggarap dan kaum bangsawan secara diskriminatif. Sistem ini berlaku sebelum abad ke-20.

2.7.2. Sistem merkantilisme: sistem ekonomi yang menempatkan negara bertanggung jawab, mengendalikan dan mengarahkan segenap kegiatan ekonomi termasuk melarang masuknya seseorang yang memiliki keterampilan atau mata pencaharian satu ke mata pencaharian lain.



bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung dalam satu sistem sehingga tatanan ekonomi berkembang seperti cara rekrutmen atau pengambilan tenaga kerja, cara pengupahan, produksi masal, efektivitas, serta efisiensi kerja dan pengelolaannya.

- c. *Sektor Perdagangan* merupakan aktivitas penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Sektor ini mengembangkan tatanan social untuk menjalin hubungan antara pembeli dan penjual. Di sektor ini diatur cara memperoleh keuntungan, cara pembelian baik secara kontan maupun kredit, dan memupuk semangat kewiraswastaan, seperti sifat hemat, ulet, tekun, jujur, dan pantang menyerah.

### 3. Pranata Politik

Pranata adalah sebuah suatu sistem yang memiliki nilai norma dan aturan yang bersifat memaksa serta memiliki tujuan untuk kebaikan bersama prana di buat dengan tujuan untuk memudahkan masyarat, memenuhi kebutuhan sosial, memberi kontrol sosial, menjaga keutuhan masyarakat serta memberi pedoman tingkah laku sesuai norma yang telah disepakati bersama. Pranata di bentuk secara institusional atau kelembagaan dan secara internalisasi atau melalui sosialisasi. Prana muncul pertama kali karna adanya kebutuhan masyarakat untuk memudahkan urusannya.

#### 3.1. Pengertian dan ciri-ciri Pranata Politik

Istilah "politik" yang kita kenal sekarang bermula dari kegiatan kenegaraan yang dijalankan di Yunani. Seperti kita ketahui, bahwa kata politik berasal dari kata polis yang

berarti "negara kota", pusat kegiatan politis di Yunani. Plato<sup>22</sup>, seorang ahli filsafat di Yunani pada zaman itu, menyebut masalah-masalah yang berhubungan dengan negara Kota dengan istilah politheia dalam buku karangannya yang berjudul *politicós* (ahli polis).

Politik adalah ilmu mengenai negara. Politik mencakup ilmu mengenai kekuasaan, pemerintah serta komando yang di berikan sekelompok orang yang harus di penuhi oleh semua orang yang berada pada wilayah kekuasaan tersebut. Sehingga bisa di katakan bahwa politik adalah kekuasaan, dan sudah kita tahu bahwa kekuasaan mengandung dimensi konflik yang menyebabkan integrasi pada sebagian masyarakat. Menurut Weber dalam Hanry<sup>23</sup>, politik adalah upaya untuk mempengaruhi distribusi kekuasaan baik antar negara maupun antar kelompok yang ada dalam negara. Politik juga dapat dikatakan suatu kelompok yang memiliki satu pemimpin yaitu penguasa dan anggota yang semuanya saling bekerja, saling membantu untuk mencapai tujuan bersama dan berusaha untuk dapat memperoleh kebaikan bersama.

Sedangkan, pranata politik atau lembaga politik adalah lembaga yang memperhatikan kekuasaan, organisasi, legitimasi dan seterusnya<sup>24</sup> atau suatu lembaga yang memegang kekuasaan dan memiliki hak untuk mengatur

<sup>22</sup>Plato, *The Laws, Penguin Classics*, edisi tahun, diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders, 1986, hlm. 165

<sup>23</sup>Hanri J Schmandt, *Filsafat Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 629

<sup>24</sup>Maurice Duvender, *Sosiologi Politik*, Jakarta: Pt.Raja Grafindo, 2002, hlm. 115



dalam suatu wilayah, lembaga politik merupakan sekelompok orang yang bersatu atas dasar nilai norma yang telah di spakati sekelompok ini dinamakan pemerintahan yang memimpin dalam suatu lembaga untuk melakukan fungsi fungsinya dalam hal ini pranata atau lembaga politik di batasi oleh wilayah wilayah.

Pranata politik merupakan salah satu lembaga yang penting untuk berada pada suatu negara. Karna jika dalam sebuah negara tidak ada pranata politik yang berfungsi memegang kekuasaan dan wewenang maka akan timbul anarki tanpa pemerintahan pada negara tersebut. Pranata politik timbul disebabkan karna masyarakat membutuhkan suatu organisasi yang bisa meminimalkan konflik dan mengatur masyarakat berdasarkan nilai dan norma yang telah di sepakati bersama, jadi pranata politik tidak boleh melayani kepentingan sebagian kelompok masyarakat saja pranata politik harus mampu melayani kepentingan bersama.

Jadi, Pranata politik adalah serangkaian peraturan, baik tertulis ataupun tidak tertulis yang berfungsi mengatur semua aktivitas politik dalam masyarakat atau negara. Pranata yang memegang monopoli penggunaan paksaan fisik dalam suatu wilayah tertentu. Dengan demikian istilah pranata pemerintahan, politik, negara, maksudnya sama, dan dalam hal ini disebut sebagai pranata politik, karena dalam istilah politik sudah tercakup istilah pemerintah, negara, kekuasaan, kebijaksanaan, dan lain sebagainya. Hanya yang perlu diperhatikan bahwa Negara tidak sama artinya dengan pemerintahan, karena pemerintah merupakan alat atau aparat negara yang melaksanakan fungsi-fungsi dan kekuasaan negara. Jadi, pemerintah hanyalah salah satu unsur negara.

Selain itu pengertian pranata politik menurut Prof. Dr. J.W.Schoerl adalah peraturan-peraturan untuk memelihara tata tertib, untuk mendamaikan pertentangan-pertentangan, dan untuk memilih pemimpin yang berwibawa. Menurut Kornblum, pranata politik merupakan perangkat norma dan status yang menkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Dengan demikian, pranat politik akan meliputi eksekutif, yudikatif, legislatif, keamanan nasional (militer), dan partai politik. Selanjutnya Kornblum menyatakan bahwa politik menentukan siapa, bilamana, dan bagaimana memiliki kekuasaan.

#### Ciri-ciri atau karakteristik Pranata Politik

- a) Adanya komunitas manusia yang secara sosial bersatu atas dasar nilai-nilai yang disepakai bersama.
- b) Adanya asosiasi politik atau biasa disebut pemerintahan yang aktif.
- c) Asosiasi tersebut melaksanakan fungsi-fungsi untuk kepentingan umum, dan
- d) Asosiasi tersebut dineri kewenangan luas jangkauan kewenangan hanya dalam teritorial tertentu.

#### 1.2. Fungsi Pranata Politik

Pranata politik dibentuk untuk menyelenggarakan kepentingan bersama bukan kepentingan individu/golongan tertentu. Pranata politik harus berdiri ditengah-tengah kompetisi yang berlangsung dimasyarakat. Selain itu, pranata politik memelihara peraturan yang memungkinkan kehidupan bermasyarakat berjalan dengan damai dan tertib.



James W.Vender Zanden<sup>25</sup> menyebutkan pranata politik dimasyarakat manapun pada dasarnya selalu memiliki empat fungsi, yakni:

1. Fungsi pemaksaan norma (*enforcement norms*). Norma merupakan aturan yang menentukan perilaku yang tepat dan yang tidak tepat yang dialamnya dirumuskan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dalam masyarakat yang masih tradisional dan tidak mempunyai pranata politik formal, maka *folkways* dan *mores* dilaksanakan melalui tindakan-tindakan yang spontan dan kolektif dari anggota masyarakat. Dalam masyarakat seperti ini tidak diperlukan polisi atau aparat petugas kontrol resmi, karena fungsi pemaksaan aturan dilakukan oleh pranata lain. Sedangkan, dalam masyarakat yang sudah kompleks, struktur politik yang khusus diperlukan untuk mengadakan kontrol. Pengaturan tarip masyarakat tidak dilaksanakan melalui tindakan yang spontan dan kolektif dari anggota masyarakat, tetapi oleh struktur khusus yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan paksaan fisik.
2. Fungsi merencanakan dan mengarahkan (*planning dan direction*). Pranata politik menyusun rencana dan mengarahkan kegiatan-kegiatan anggota masyarakat demi tercapainya tujuan masyarakat. Anggota-anggota masyarakat tidak akan mampu menyajikan

berbagai pelayanan kebutuhan pokok melalui prosedur tradisional.

3. Fungsi menengahi pertentangan kepentingan (*arbitration of conflicting onterest*). Individu-individu dalam memenuhi kebutuhannya seringkali berebutan dan bertentangan satu sama lain, sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat dan bertentangan kepentingan antara anggota masyarakat. Pertentangan dapat timbul antara majikan dan buruh, antara golongan, dan sebagainya. Pertentangan itu tidak saja melibatkan individu, tetapi seringkali melibatkan kelompok masyarakat. Apalagi kalau masyarakat itu heterogen sehingga sukar sekali dicapai persetujuan bersama. Pranata politik berusaha menengahi pertentangan yang ada sehingga memuaskan semua pihak. Pranata politik mengadakan keseimbangan dan mengadili.
4. Fungsi melindungi masyarakat dari serangan musuh dari luar. Pranata politik dengan alat-alat yang dimilikinya melindungi warganya dari serangan musuh, baik dengan diplomasi maupun dengan kekerasan atau perang.

Sementara itu, Gillin dan Gillin<sup>26</sup> dalam versi lain menyebutkan tiga fungsi pranata politik, yaitu:

1. Mengatur hubungan-hubungan di dalam masyarakat, dalam mana *customs* dan tradisi sudah tidak mampu

<sup>25</sup>James W.Vender Zanden, *Sosiologi*, New York: John Willey & Sons, 1979, p. 284

<sup>26</sup>Gillin, John Levis and John Phillpe Gillin, *Cultural Sosiologi*, New York: The Macmillan, 1954, p. 57



lagi diandalkan untuk mengataur kehidupan politik warga masyarakat.

2. Mengatur dan menyelenggarakan kepentingan serta kebutuhan seluruh anggota masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, air, listrik, dan sebagainya. Dengan kata lain pranata politik berfungsi untuk memajukan kesejahteraan sosial.
3. Melindungi warganya dari serangan musuh atau negara lain.

Atas dasar definisi dari berbagai ahli yang ada, kalau kita inventarisasi maka secara rinci pranata politik adalah:

1. *Internal order* maksudnya memelihara dari dalam. Artinya pranata politik memelihara ketertiban dalam masyarakat dengan kewenangan yang dimilikinya, baik dengan cara persuasif maupun dengan paksaan fisik.
2. *Eksternal security* maksudnya menjaga keamanan dari luar. Artinya pranata politik melalui alat-alat yang dimilikinya berusaha mempertahankan negara dan warga masyarakat dari serangan pihak luar, baik melalui diplomasi maupun peperangan.
3. *General welfare* maksudnya berusaha melaksanakan kesejahteraan umum. Artinya pranata politik merencanakan, melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial serta kebutuhan pokok masyarakat seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesejahteraan, energi, komunikasi dan sebagainya.

Selanjutnya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara maka fungsi dari pranata politik adalah sebagai berikut:

1. Melembagakan norma-norma melalui undang-undang.
2. Melaksanakan undang-undang yang telah disetujui.
3. Menyelesaikan konflik yang terjadi di antara warga masyarakat.
4. Menyenggarakan pelayanan umum, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya.
5. Melindungi warga negaranya dari serangan negara asing.
6. Memelihara kesiapsiagaan atau kewaspadaan dalam menghadapi bahaya.

#### 1.1. Pelembagaan Pranata Politik

1. Suprastruktur politik, yaitu lembaga-lembaga kenegaraan terdiri legislatif (MPR-DPR), eksekutif (Presiden-pemerintahan) dan yudikatif (MA-MK). Selain suprastruktur terdapat pula superstruktur. Yang dimaksud superstruktur adalah pengetahuan sosial (berbagai pandangan dan doktrin yang dihasilkan manusia: filosofi, agama, politik, dan seterusnya) merefleksikan sistem ekonomi dari masyarakat. Berbagai lembaga politik merupakan superstruktur di atas fondasi ekonomi. Karl Marx mengatakan, bagaimana suatu penguasaan basis, atau penguasaan faktor produksi serta hubungan-hubungan antar produksi akan mempengaruhi suatu superstruktur, yang tercakup di dalam basis itu



sendiri adalah kekuatan produktif (alat-alat kerja, pekerja, pengalaman atau teknologi) dan hubungan-hubungan produksi, dan yang termuat dalam superstruktur adalah, pengetahuan seni, politik, ideologi, dan sebagainya.

2. Infrastruktur politik yakni lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat, mencakup pranata-pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (*interest group*) & kelompok penekan (*pressure group*). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/negara.

#### 4. Pranata Pendidikan

Pranata adalah sistem norma atau aturan-aturan yang mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus. Norma/aturan dalam pranata berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Pranata bersifat mengikat dan relatif lama<sup>27</sup>.

Sedangkan Pendidikan adalah suatu proses yang terjadi karena interaksi berbagai faktor, yang menghasilkan kesadaran diri dan lingkungan sehingga menampilkan rasa percaya diri dan rasa percaya akan lingkungannya<sup>28</sup>.

<sup>27</sup>Yahoo! Answers. Pengertian Pranata Pendidikan, oleh Rayhana aisyah. 18 Nöember 2011.09:59:57 pm.

<sup>28</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi pertama cet. I, 1991, hlm. 232

Sedangkan menurut Menurut H. Horne, dalam A. Yunus pendidikan adalah proses yang terus menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia<sup>29</sup>. Sedangkan secara umum yang dimaksud dengan pranata sosial atau lembaga sosial dapat dimaknai sebagai organisasi, asosiasi atau kelompok sosial<sup>30</sup>. Menurut para ahli Pranata sosial adalah merupakan sekumpulan norma (sistem norma) dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan pokok manusia<sup>31</sup>. Proses sejumlah norma menjadi pranata sosial disebut pelembagaan atau institusionalisasi. Oleh karena itu, pranata sosial sering disebut lembaga-lembaga sosial<sup>32</sup>. Jadi Pranata Pendidikan dapat diartikan suatu sistem norma atau aturan-aturan dalam suatu proses yang terjadi karena interaksi berbagai faktor, yang menghasilkan kesadaran diri dan lingkungan<sup>33</sup>.

Pranata pendidikan, terletak pada upaya sosialisasi, sehingga masyarakat memiliki kemampuan dan ciri-ciri

<sup>29</sup>A. Yunus, *Filsafat Pendidikan*, Bandung: CV. Citra Sarana Grafika. 1999, hlm. 7

<sup>30</sup>Momon Sudarma, *Sosiologi untuk Kesehatan*, Jakarta: Salemba Medika, 2003, hlm. 43

<sup>31</sup>Khairul Hidayati dkk, *Sosiologi*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm. 45

<sup>32</sup> Bagja, Waluya, *Menjelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung: Setia Purna Inves, 2007, hlm. 34

<sup>33</sup> www.uny.ac.id/akademik/sharefile, di unduh pada 21 November 201 10:35:47 am.



pribadi sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat bersangkutan.

pendidikan adalah suatu proses yang terjadi karena interaksi berbagai faktor, yang menghasilkan kesadaran diri dan lingkungan sehingga menampilkan rasa percaya diri dan rasa percaya akan lingkungannya. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sistem pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional<sup>34</sup>. Berdasarkan pada Undang-undang tersebut, sistem pendidikan nasional dibedakan menjadi satuan pendidikan, jalur pendidikan, jenis pendidikan, dan jenjang pendidikan. Berdasarkan Tap MPR No. II/MPR/1988 seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pendidikan itu berdasarkan atas Pancasila dasar dan falsafah negara. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

---

<sup>34</sup>Undang-Undang No. 2 tahun 1989, hlm.2

Sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh dan terpadu: semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah negara; menyeluruh dalam arti mencakup semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; dan terpadu dalam arti adanya saling keterkaitan antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional. Pendidikan nasional yang ditetapkan dalam Undang-undang ini mengungkapkan satu sistem yang:

- a) berakar pada kebudayaan nasional dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melanjutkan dan meningkatkan pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa);
- b) merupakan satu keseluruhan dan dikembangkan untuk ikut berusaha mencapai tujuan nasional;
- c) mencakup, baik jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah;
- d) mengatur, bahwa jalur pendidikan sekolah terdiri atas 3 (tiga) jenjang utama, yang masing-masing terbagi pula dalam jenjang atau tingkatan;
- e) mengatur, bahwa kurikulum, peserta didik dan tenaga kependidikan, terutama guru, dosen atau tenaga pengajar, merupakan tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan belajar-mengajar;
- f) mengatur secara terpusat (sentralisasi), namun penyelenggaraan satuan dan kegiatan pendidikan dilaksanakan secara tidak terpusat (desentralisasi);
- g) menyelenggarakan satuan dan kegiatan pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan Pemerintah;



- h) mengatur, bahwa satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat berkedudukan serta diperlakukan dengan penggunaan ukuran yang sama;
- i) mengatur, bahwa satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memiliki kebebasan untuk menyelenggarakannya sesuai dengan ciri atau kekhususan masing-masing sepanjang ciri itu tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi bangsa dan negara; dan
- j) memudahkan peserta didik memperoleh pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat dan tujuan yang hendak dicapai serta memudahkannya menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan.

Dalam kaitan pembaharuan sistem pendidikan nasional telah ditetapkan visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia, berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah<sup>35</sup>.

Terkait dengan visi tersebut telah ditetapkan serangkaian prinsip yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan reformasi pendidikan. Salah satu prinsip tersebut adalah bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang

<sup>35</sup>Undang-undang 2008, hlm. 37

berlangsung sepanjang hayat, di mana dalam proses tersebut harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik.

Sehubungan dengan prinsip pendidikan di atas senada dengan pendapat Chomsin S. Widodo dan Jasmadi<sup>36</sup>, menurutnya: "Prinsip tersebut menyebabkan adanya pergeseran paradigma proses pendidikan, dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Paradigma pengajaran yang telah berlangsung sejak lama lebih menitikberatkan peran guru dalam mentransfer pengetahuan kepada peserta didik, paradigma tersebut bergeser pada paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki kecerdasan, memiliki estetika, sehat jasmani dan rohani, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara."<sup>37</sup>

Pendidikan sebagai salah satu pranata sosial, sudah tentu tidak bisa lepas dari keterpengaruhan saling silang budaya. Sehubungan dengan itu, mengamati dunia pendidikan tentu tidak cukup hanya dengan melihat problem internal pendidikan, misalnya dari sudut pandang kompoen pendidikan, tetapi tidak bisa tidak, harus dengan berbagai

<sup>36</sup>Widodo, Chomsin S. dan Jasmadi, *Panduan Menyusun Bahan Ajar Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008, hlm.

<sup>37</sup>*Ibid*



perspektif, misalnya budaya, sosial, ekonomi, politik, sejarah, filsafat dan sebagainya.

#### A. Ruang Lingkup Pendidikan:

##### a. Pendidikan dlm keluarga (informal)

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

##### b. didikan di sekolah (formal)

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri

atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

##### c. Pendidikan dlm masyarakat (nonformal)

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Selanjutnya dalam Undang-undang Sisdiknas tersebut dijelaskan bahwa, pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

#### B. Fungsi Pranata Pendidikan:

- a) Fungsi konservasi (pengawetan)
- b) Fungsi evaluatif (penilaian)
- c) Fungsi kreatif

#### 1. Menurut BRUCE J COHEN Fungsi pranata pendidikan antara lain:

- a) Memberikan persiapan bagi peran-peran pekerjaan
- b) Sebagai perantara perpindahan warisan kebudayaan
- c) Memperkenalkan peranan dalam masyarakat
- d) Mempersiapkan individu dengan berbagai peranan social
- e) Memberi landasan penilaian dan pemahaman
- f) Meningkatkan kemajuan melalui riset-riset ilmiah
- g) Memperkuat penyesuaian diri dan mengembangkan hubungan social



2. Menurut BOGARDUS,

Fungsi pranata pendidikan antara lain:

- a) Memberantas kebodohan yaitu mengusahakan agar anak mampu menulis dan membaca serta mengembangkan kemampuan intelektualnya
- b) Menghilangkan salah pengertian yaitu mengembangkan pengertian yang luas tentang manusia lain yang berbeda kebudayaan dan kepentingannya

3. Menurut DAVID POPONOE,

Fungsi pendidikan antara lain:

- a) Sebagai transmisi kebudayaan masyarakat yaitu selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat
- b) Menjamin adanya integrasi sosial di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk
- c) Sumber inovasi sosial

4. Menurut HORTON dan HUNT

Fungsi nyata (manifest) pendidikan antara lain:

- a. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah
- b. Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat melestarikan kebudayaan menanamkan ketrampilan yang perlu bagi partisipasi demokrasi.

5. Fungsi tersembunyi/laten pendidikan antara lain:

- a. Mengurangi pengawasan orang tua kepada anak

- b. Menyediakan sarana pembangkangan terhadap nilai-nilai yang berlaku di masyarakat mempertahankan sistem kelas sosial
- c. Memperpanjang masa remaja

C. Fungsi Tersembunyi Pranata Pendidikan:

- a. Menunda masa kedewasaan anak
- b. Menjadi saluran bagi mobilitas sosial
- c. Memelihara integrasi masyarakat

D. Fungsi Nyata Pendidikan:

1. Menolong orang untuk sanggup mencari nafkah bagi kehidupannya kelak
2. Meningkatkan citra rasa kehidupan
3. Meningkatkan taraf kesehatan dengan olahraga

E. Manfaat Pendidikan:

1. Wawasan dan pandangan seseorang dalam berinteraksi menjadi lebih baik
2. Seseorang dapat mengikuti perkembangan zaman
3. Seseorang menjadi lebih kritis dan analitis dalam berpikir

F. Jenis-jenis pendidikan:

1. Pendidikan Massal
2. Pendidikan Masyarakat.
3. Pendidikan Dasar.

Merupakan pendidikan sembilan tahun terdiri atas program pendidikan enam tahun di sekolah dasar dan program pendidikan tiga tahun di sekolah lanjutan tingkat pertama. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama terdiri dari dua



jenis sekolah yang berbeda yaitu sekolah umum dan sekolah keterampilan. Pendidikan Dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.

Pendidikan Dasar merupakan pendidikan wajib belajar yang memberikan para siswa dengan pengetahuan dan keterampilan. Sebagai tambahan pada pendidikan dasar, terdapat Madrasah Ibtidaiyah, yang setingkat dengan Sekolah Dasar dan Madrasah Tsanawiyah yang setingkat dengan sekolah Lanjutan Tingkat Pertama umum yang berada di bawah pengelolaan Departemen Agama.

1. Penyuluhan.
2. Pengembangan Masyarakat.
3. Pendidikan Orang Dewasa.
4. Masyarakat Belajar
5. Pendidikan Seumur Hidup.

#### G. Jenis Pendidikan Lainnya:

Menurut Sistem pendidikan nasional terdiri dari tujuh jenis pendidikan yaitu:

##### 1. Pendidikan umum.

Pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan.

##### 2. Pendidikan kejuruan.

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu.

##### 3. Pendidikan luar biasa,

Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.

##### 4. Pendidikan kedinasan.

Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai suatu Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non-departemen atau Non-Kementerian.

##### 5. Pendidikan keagamaan.

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.

##### 6. Pendidikan akademik.

Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan.

##### 7. Pendidikan profesional.

Pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.



## H. Jalur Pendidikan

### 1. Jalur pendidikan sekolah

Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas: Pendidikan Dasar; Pendidikan Menengah; dan Pendidikan Tinggi. Selain jenjang pendidikan di atas, diselenggarakan pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar, yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan prasekolah antara lain meliputi pendidikan Taman Kanak-kanak, terdapat di jalur sekolah, dan Kelompok Bermain, serta Penitipan Anak di jalur luar sekolah. Taman Kanak-kanak diperuntukan anak usia 5 dan 6 tahun untuk satu atau dua tahun pendidikan, sementara kelompok bermain atau penitipan anak diperuntukan anak paling sedikit berusia tiga tahun.

### 2. Jalur pendidikan luar sekolah.

Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan. Yang termasuk jalur pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik di lembaga pemerintah,

nonpemerintah, maupun sektor swasta dan masyarakat. Jenis pendidikan luar sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan, dan pendidikan kejuruan. Pendidikan luar sekolah dapat meliputi kursus-kursus, kelompok belajar seperti Paket A, Paket B, dan Kejar Usaha dan kegiatan lainnya seperti magang.

## I. Jalur Pendidikan Sekolah

### 1. Pendidikan Dasar

### 2. Pendidikan Menengah

Disiapkan untuk lulusan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan dan pendidikan keagamaan. Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Lama pendidikan tiga tahun untuk sekolah umum dan tiga atau empat tahun untuk sekolah kejuruan. Sebagai tambahan pada sekolah menengah, terdapat Madrasah Aliyah yang setingkat dengan sekolah menengah umum yang berada dalam pengelolaan Kementerian Agama.

### 3. Pendidikan tinggi

Merupakan kelanjutan dari pendidikan menengah yang terdiri dari pendidikan akademik dan profesional. Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan



menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Lama pendidikan tinggi tiga tahun untuk program diploma atau empat tahun untuk program sarjana. Sesudah tingkat sarjana dapat meneruskan ke program Pascasarjana selama dua tahun dan dapat meneruskan ke program Doktor tiga tahun kemudian.

Sesuai dengan dasar, fungsi, dan tujuannya, pendidikan nasional bersifat terbuka. Sifat itu diungkapkan dengan keleluasaan gerak peserta didik. Ini merupakan kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakatnya sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Keleluasaan gerak berarti terbukanya kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan dirinya melalui jalur pendidikan yang tersedia dan kemungkinan untuk pindah dari satu jalur ke jalur yang lain, atau dari satu jenis ke jenis pendidikan yang lain dalam jenjang yang sama. Dalam pelaksanaan keleluasaan gerak perlu diperhatikan aspek-aspek proses belajar dan kemampuan sumber daya yang tersedia. Peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut pelajar, murid atau siswa dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut mahasiswa. Peserta didik dalam jalur pendidikan luar sekolah disebut warga belajar.

Di dalam lembaga pendidikan formal atau persekolah, kelahiran dan pertumbuhan dari dan untuk masyarakat bersangkutan. Artinya, sekolah sebagai pusat pendidikan formal merupakan perangkat masyarakat yang disertai kewajiban memberikan pendidikan. Perangkat ini dikelola secara formal mengikuti haluan yang pasti dan diperlakukan dimasyarakat bersangkutan. Fungsi pemberian pendidikan tidak diserahkan sepenuhnya kepada lembaga persekolah. Sekolah pengalaman belajar pada dasarnya dapat diperoleh disepanjang hidup manusia, kapanpun dan dimanapun, termasuk dalam lingkungan keluarga dan masyarakat itu sendiri. Lembaga sosial formal dapat juga disebut sebagai satu organisasi yang terikat kepada tata aturan formal berprogram, dan bertarget atau bersasaran yang jelas, serta memiliki struktur kepemimpinan penyelenggara atau pengelolaan yang resmi. Penjabaran dari fungsi sekolah sebagai pusat pendidikan formal, terlihat pada tujuan institusional yaitu tujuan kelembagaan pada masing-masing jenis dan tingkatan sekolah. Tujuan institusional untuk masing-masing tingkat atau jenis pendidikan, untuk pencapaiannya ditopang oleh tujuan-tujuan kurikuler dan tujuan-tujuan instruksional.

Untuk tujuan institusional, kurikuler, maupun instruksional semuanya diarahkan kepada pembentukan pribadi dan kemampuan warga masyarakat yang menjadi target atau sasaran pendidikan dimasyarakat bersangkutan. Ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan sekolah sebagai lembaga sosial yang terorganisasi secara formal.

Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin



perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan.

Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang telah mengantarkan pembentukan suatu pemerintah negara Indonesia untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia" serta "memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial" menuntut penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan yang dapat menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan melalui BAB XIII, Pasal 31 ayat (2), bahwa pendidikan yang dimaksud harus diusahakan dan diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai "satu sistem pengajaran nasional". Sesuai dengan judul bab yang bersangkutan, yaitu PENDIDIKAN, pengertian "satu sistem pengajaran nasional" dalam Undang-undang ini diperluas menjadi "satu sistem pendidikan nasional". Perluasan pengertian ini memungkinkan Undang-undang ini tidak membatasi perhatian pada pengajaran saja, melainkan juga memperhatikan unsur-unsur pendidikan yang berhubungan dengan pertumbuhan kepribadian manusia Indonesia yang bersama-sama merupakan perwujudan bangsa Indonesia, suatu bangsa yang bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memelihara budi pekerti kemanusiaan dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: II/MPR/ 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa).

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila di bidang pendidikan, maka pendidikan nasional mengusahakan pertama, pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri, dan kedua, pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh yang mengandung makna terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Sehubungan dengan itu, maka Pendidikan Pendahuluan Bela Negara diberikan kepada peserta didik sebagai bagian dari keseluruhan sistem pendidikan nasional. Dengan landasan pemikiran tersebut, pendidikan nasional disusun sebagai usaha sadar untuk memungkinkan bangsa Indonesia mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mengembangkan dirinya secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sistem pendidikan nasional adalah sekaligus alat dan tujuan yang amat penting dalam perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Sistem pendidikan nasional harus dapat memberi pendidikan dasar bagi setiap warga negara Republik Indonesia, agar masing-masing memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar, yang meliputi kemampuan membaca, menulis dan berhitung serta menggunakan bahasa Indonesia, yang diperlukan oleh setiap warga negara untuk dapat berperanserta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara diharapkan mengetahui hak dan kewajiban pokoknya sebagai warga negara serta memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri, ikut serta dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, dan



memperkuat persatuan dan kesatuan serta upaya pembelaan negara. Pengetahuan dan kemampuan ini harus dapat diperoleh dari sistem pendidikan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk memberi makna pada amanat Undang-Undang Dasar 1945, BAB XIII, Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan, bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran". Warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan pada tahap manapun dalam perjalanan hidupnya pendidikan seumur hidup-, meskipun sebagai anggota masyarakat ia tidak diharapkan untuk terus-menerus belajar tanpa mengabdikan kemampuan yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan dapat diperoleh, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Sistem pendidikan nasional memberi kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara, oleh karena itu dalam penerimaan seseorang sebagai peserta didik tidak dibenarkan adanya perbedaan atas dasar jenis kelamin, agama, ras, suku, latar belakang sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, kecuali apabila ada satuan atau kegiatan pendidikan yang memiliki kekhususan yang harus diindahkan.

Pendidikan keluarga termasuk jalur pendidikan luar sekolah merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengalaman seumur hidup. Pendidikan dalam keluarga memberikan keyakinan agama, nilai budaya yang mencakup nilai moral dan aturan-aturan pergaulan serta pandangan, keterampilan dan sikap hidup yang mendukung kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kepada anggota keluarga yang bersangkutan. Dalam rangka peningkatan peranserta keluarga, masyarakat

dan Pemerintah dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional, maka semua pihak perlu berusaha untuk menciptakan suasana lingkungan yang mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Dalam hubungan ini, maka pengadaan dan pendayagunaan sumberdaya pendidikan, baik yang disediakan oleh Pemerintah maupun masyarakat perlu dipertahankan fungsi sosialnya, dan tidak mengarah pada usaha mencari keuntungan material.

Upaya peningkatan taraf dan mutu kehidupan bangsa dan pengembangan kebudayaan nasional, yang diharapkan menaikkan harkat dan martabat manusia Indonesia, diadakan terus-menerus, sehingga dengan sendirinya senantiasa menuntut penyesuaian pendidikan pada kenyataan yang selalu berubah. Pendidikan juga harus senantiasa disesuaikan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengaturan dalam Undang-undang ini pada dasarnya dirumuskan secara umum, agar supaya pengaturan yang lebih khusus, yang harus disesuaikan dengan keadaan yang telah mengalami perubahan sebagaimana dimaksud di atas, dan bahkan harus memperhitungkan kemungkinan tuntutan perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia di masa yang akan datang, dilakukan melalui pengaturan yang lebih mudah dibuat, diubah dan dicabut. Dalam hubungan inilah dibentuk Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional yang bertugas untuk memberi pertimbangan kepada Menteri mengenai segala hal yang dipandang perlu dalam rangka perubahan, perbaikan, dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Peraturan perundang-undangan yang sekarang berlaku bagi pengaturan, pembinaan, dan pengembangan pendidikan nasional perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan



tuntutan perkembangan pembangunan pendidikan nasional. Undang-undang yang lama, yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550); Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361); Undang-undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 80); Undang-undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81) perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta diganti dengan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional ini. Fungsi pendidikan di sekolah, sedikit banyak dipengaruhi pula oleh corak pengalaman seseorang dilingkungan masyarakat. Kondusif tidaknya dan positif tidaknya pengalaman seseorang dilingkungan masyarakat, tidak dapat dielakkan pengaruhnya terhadap keberhasilan fungsi pendidikan di sekolah. Sekolah juga berkepentingan dengan perubahan lingkungan masyarakat seseorang, antara lain melalui fungsi layanan konseling, penciptaan forum komunikasi antara organisasi sekolah dengan organisasi lembaga-lembaga lainnya di masyarakat. Fungsinya membelajarkan anak seoptimal mungkin yang tak terbatas.

Fungsi pendidikan di sekolah, sedikit banyak dipengaruhi oleh fungsional tidaknya pendayagunaan sumber-sumber belajar perpustakaan umum, museum, kebun binatang, peredaran koran atau majalah serta sumber-sumber lainnya. Di samping sebagai medium pendidikan bagi masyarakat luas, sumber-sumber tersebut juga berfungsi untuk mendayagunakan bagi fungsi pendidikan sistem persekolah.

Dilihat dari sudut kedua bahwa hubungan sekolah dan masyarakat memiliki hubungan rasional berdasarkan kebutuhan. Sehubungan sudut pandang tersebut, berikut ini diberikan 3 (tiga) gambaran hubungan rasional diantara keduanya, yaitu: Sekolah sebagai lembaga layanan terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat, dan membawa konsekuensi-konsekuensi, konseptual dan teknis, sehingga bersesuaian antara fungsi pendidikan yang dimainkan oleh sekolah dengan yang dibutuhkan masyarakat. Untuk menjalankan tujuan pendidikan secara rasional dengan persyaratan-persyaratan kemampuan dan kepribadian yang secara ideal maupun praktis diciptakan dan dibutuhkan oleh masyarakat, maka diperlukan mekanisme informasi timbal balik yang rasional, objektif, dan realistis antara sekolah sebagai produsen pendidikan dengan masyarakat yang mengkonsumer luaran (*output*) persekolahan.

Sasaran pendidikan yang ditangani oleh lembaga persekolahan ditentukan kejelasan formulasi kontrak antara sekolah dengan masyarakat. Rumusan tersebut tentang kebutuhan dan cita-cita pendidikan yang diinginkan masyarakat, yang memerlukan operasionalisasi dan spesifikasi, sehingga memungkinkan pengukuran terpenuhi tidaknya fungsi layanan sekolah sebagaimana masyarakat



inginkan. Maka diperlukan pendekatan komprehensif didalam pengembangan program dan kurikulum untuk masing-masing jenis dan jenjang persekolahan.

Tujuan pranata pendidikan ialah memberikan ilmu pengetahuan, pendidikan sikap, dan melatih keterampilan kepada warga agar seseorang dapat mandiri dalam mencari penghasilan. Contohnya seperti Kegiatan Belajar Mengajar, sistem pengetahuan, aturan, kursus, pendidikan keluarga, mengaji.

#### 5. Pranata Kepercayaan/Agama

Agama merupakan salah satu pranata yang sangat penting hingga saat ini dalam mengatur kehidupan manusia. Istilah agama yang digunakan di sini berarti suatu prinsip kepercayaan kepada Tuhan atau dewa dan sebagainya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, lebih tepat jika dipakai istilah religi atau religiositas. Karenanya, pranata agama lebih tepat diterjemahkan sebagai pranata religi (*religious institutions*).

Religi atau religiositas merupakan suatu sistem terpadu antara keyakinan dan praktik yang berkaitan dengan hal-hal yang suci yang dianggap tidak terjangkau. Religiositas memiliki dua unsure ajaran hakiki, yaitu yang berada di dunia ini (imanen) dan yang berada di luar jangkauan penginderaan manusia (transedental). Penjabaran dua unsur di atas terjadi dalam praktik ritual atau peribadatan, ajaran-ajaran tentang keberadaan Tuhan (termasuk unsur transedental), dan bagaimana menjalin kehidupan dengan sesama makhluk hidup yang lain (unsur imanen).

Adapun fungsi-fungsi pokok pranata agama adalah sebagai berikut:

##### a. Membantu Mencari Identitas Moral

Moral adalah kondisi mental di mana manusia merasakan, mengetahui, dan menghayati tingkah laku yang baik menurut nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku. Moral merupakan suatu tuntutan agar manusia bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan patokan-patokan hidup bersama. Moralitas suatu masyarakat secara komunitas sifatnya baku, tetapi juga dinamis. Baku artinya aturan dan norma yang berlaku sudah pasti dan setiap anggota hanya harus mengikutinya. Dinamis artinya bahwa pada saat tertentu aturan dan norma tersebut dapat berubah karena kondisi masyarakat menuntut demikian.

Fungsi pranata agama atau religi dalam hal ini adalah memberi bantuan membuat suatu aturan norma demi kepastian identitas moral masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya religi, pencarian manusia terhadap nilai-nilai moral berkurang, karena di dalam religi tersebut masyarakat menemukan salah satu bentuk norma moral. Masyarakat mengolah sendiri ajaran dan norma yang ada di dalam religi tersebut.

Norma-norma religiositas tersebut berguna bagi orang yang sering melakukan tindak penyimpangan moral. Misalnya orang yang suka menipu, mencuri, melakukan perkosaan, korupsi, dan lain-lain. Pelaku tindak penyimpangan moral tersebut kehilangan identitas moral. Akibatnya ia mendapat sanksi dari masyarakat, baik sanksi sosial ataupun sanksi hukum.

Pada saat ia mempunyai niat mengembalikan dirinya kepada jalan yang benar dan keluar dari tindak



penyimpangan tersebut ia bisa mendekatkan diri pada ajaran dan norma yang ada pada religi. Melalui pendekatan terhadap ajaran dan norma yang ada, ia akan dibantu untuk menemukan identitas moralnya.

b. Menjelaskan Arah dan Tujuan Hidup Manusia

Dalam diri para penganut agama dan kepercayaan ada keinginan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai keinginan itu manusia tidak sanggup bertindak hanya dengan kemampuan dan kekuatannya sendiri. Religi (agama dan kepercayaan) mengajarkan dan memberikan jaminan dengan cara yang khas untuk mencapai kebahagiaan dan mengatasi kekurangmampuan manusia.

Di dunia ini manusia dilingkupi oleh berbagai masalah. Ada masalah yang biasa yang dapat diselesaikan sendiri, dan ada masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri sehingga perlu bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun demikian ada juga masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan akal sehat atau pikiran manusia, bahkan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi. Dalam hal ini religilah yang mampu memberikan penafsiran untuk menjelaskan keberadaan manusia.

Religi meningkatkan kesadaran hidup dalam diri manusia dan kondisi eksistensialnya untuk menjawab masalah-masalah yang dihadapinya dalam hidup di dunia ini. Religi menunjukkan penyelesaian yang memuaskan apabila manusia mau menerima nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran tersebut. Jadi, untuk mencari jawaban atas ketidakmampuan dan ketidakkuatan dalam memahami keadaan lingkungan fisik dan sosial dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya diperlukan pranata serta berbagai ajaran religi.

c. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Mempererat Kohesi Sosial

Wujud konkret dari unsur imanen yang menjadi bagian dari religi antara lain adalah bagaimana religi mengajarkan kehidupan sosial. Dalam religi ada aturan-aturan yang mengajarkan bagaimana manusia harus berhubungan dengan sesama. Agama dan kepercayaan mengajarkan penganutnya untuk mencintai, menghormati, dan menghargai orang lain. Mencintai orang lain adalah suatu sikap atau perbuatan yang memperlihatkan orang lain tersebut adalah ciptaan Tuhan sama seperti kita. Tindakan cinta sesama dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain sikap ramah, sopan santun, dan kerendahan hati dalam bergaul.

Sikap tolong menolong, kerja sama, saling menghormati, dan sebagainya timbul dari sikap solidaritas kelompok. Solidaritas kelompok adalah rasa kesatuan antara warga suatu kelompok dalam suatu masyarakat. Rasa kesatuan ini mencakup pendapat dan tujuan. Untuk mewujudkan rasa kesatuan tersebut diperlukan adanya kesadaran anggota-anggota kelompok.

6. Pranata Hukum

A. Negara Hukum Indonesia

Indonesia diidealkan dicita-citakan oleh *the founding father* sebagai suatu negara hukum (*Rechtsstaat/The Rule of Law*). Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab I Pasal 1 Ayat (3) yaitu



"Negara Indonesia adalah Negara hukum".<sup>38</sup> Sebagai negara hukum tentunya segala sesuatunya harus berlandaskan hukum, baik dalam hubungan antar lembaga negara yang satu dengan yang lain, pemerintah dengan rakyat, dan hubungan antara rakyat dengan rakyat. Begitu juga berdasarkan penjelasan UUD '45, dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*Machstaat*). Hal ini membawa konsekuensi bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dipertanggungjawabkan secara hukum, karena itu setiap tindakan harus berdasarkan hukum. Sehingga konsekuensi dari negara hukum adalah hukum sebagai panglima yang memandang siapapun, baik dari kalangan pejabat, pengusaha, maupun rakyat biasa mempunyai hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Unger memberikan pengertian hukum sebagai berikut, "In the broadest sense, law is simply any recurring mode of interaction among individual and groups, together with the more or less explicit acknowledge by these groups and individuals that such patterns of interaction produce reciprocal expectations of conduct that ought to be satisfied. I shall call this customary or interactional law". Menurut Achmad Ali<sup>39</sup>, hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik sebagai

---

<sup>38</sup>Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 258

<sup>39</sup>Achmad Ali; *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan artikel hukum Dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm. 248

aturan tertulis (peraturan) ataupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggaran aturan itu. Adapun yang dimaksud negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato pada awalnya dalam *the Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun, dalam bukunya *the Statesmen* dan *the law*, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintah yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.

Selain terkait dengan konsep 'rechtsstaat' dan 'the rule of law', juga berkaitan dengan konsep 'nomocracy' yang berasal dari perkataan 'nomos' dan 'cratos'. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan 'demos' dan 'cratos' atau 'kratien' dalam demokrasi. 'Nomos' berarti norma, sedangkan 'cratos' adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah



nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti Kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakte staat*). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan masyarakat (*civitas*), di mana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.

Namun, penjabaran ide negara hukum tersebut belum pernah dirumuskan secara komprehensif, yang ada hanya pembangunan bidang hukum secara sektoral. Maksudnya hukum jangan hanya dilihat dalam hal pembentukan dan pengembangan hukum saja, tetapi hukum harus dipahami dari berbagai aspek yang terintegrasi yaitu politik, sosial, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu hendaknya hukum dipahami sebagai satu kesatuan sistem, sedangkan negara dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu negara hukum.

Dalam sistem konstitusi negara kita, cita negara hukum itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang. Meskipun mengalami beberapa perubahan, namun rumusan bahwa Indonesia adalah negara hukum dicantumkan dengan tegas di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Bab I Pasal 1 Ayat (3) yaitu "Negara Indonesia adalah negara hukum". Adalah sesuatu yang konstitusional.

Negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Jauh

sebelum itu Muhammad Yamin membuat penjelasan tentang konsepsi negara hukum Indonesia bahwa kekuasaan yang dilakukan pemerintah Indonesia harus berdasar dan berasal dari ketentuan undang-undang dan karenanya harus jauh dari kesewenang-wenangan atau kepercayaan bahwa kekuatan badanlah yang boleh memutuskan berbagai pertikaian. Negara Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara polisi atau militer di mana polisi dan tentara memegang kekuasaan dan keadilan. Juga bukan negara *machtsstaat* di mana tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan tindakan sewenang-wenang.

Sebagai negara hukum maka negara Indonesia lebih mengutamakan aturan hukum untuk menegakkan rasa keadilan dalam masyarakat dibanding dengan menggunakan kekuatan militer maupun persenjataan. Karena kekuatan tersebut tidak akan menyelesaikan permasalahan hukum dan keadilan melainkan akan menambah beban hukum atau bahkan akan merusak atau menodai tujuan hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat. Dalam hal ini, maka seluruh komponen negara harus mengedepankan hukum untuk mengatur negara. maka keadilan yang dicita-citakan akan dapat tercapai sesuai dengan keinginan rasa keadilan di dalam masyarakat.

Sedangkan Syahrin Basah<sup>40</sup> mengidentifikasi negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan mengajukan pendapat bahwa mengingat Pancasila dijabarkan di dalam beberapa pasal Batang Tubuh UUD 1945 seperti Pasal 27, 28, 29, 30, dan 34 maka di negara hukum Indonesia

---

<sup>40</sup>Basah, Syahrin, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 79



terdapat hak dan kewajiban azasi manusia, hak perorangan yang bukan hanya harus diperhatikan tapi juga harus ditegakkan dengan mengingat kepentingan umum, menghormati hak orang lain, mengindahkan perlindungan/kepentingan keselamatan bangsa serta moral umum, dan ketahanan nasional berdasarkan undang-undang. Di dalam konsepsi yang demikian, hak perorangan diakui, dijamin dan dilindungi namun dibatasi oleh: pertama, fungsi sosial yang dianggap melekat pada hak milik, dan kedua, corak masyarakat Indonesia yang membebaskan manusia perorangan Indonesia dengan berbagai kewajiban terhadap keluarga, masyarakat, dan sesamanya.

Di dalam konsepsi demikian, menurut Paulus Effendi Lotulung<sup>41</sup>, terdapat asas keserasian dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Senada dengan berbagai identifikasi tersebut, Philipus M. Hadjon<sup>42</sup>, mengatakan bahwa negara hukum Indonesia agak berbeda dengan *Rechtsstaat* maupun *the rule of law*. *Rechtsstaat* mengedepankan *wetmatigheid* yang kemudian menjadi *rechtmatigheid*. *The rule of law* mengutamakan prinsip *equality before the law*, sedangkan negara hukum Indonesia menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yang mengedepankan asas kerukunan.

Dari prinsip ini terlihat pula adanya elemen lain dari negara hukum Pancasila, yakni terjalinnnya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan

<sup>41</sup>Paulus Effendi Lotulung, *Peradilan Tata Usaha Negara dalam Kaitannya dengan Rechtsstaat Republik Indonesia*, dalam majalah Hukum dan Pembangunan. No. 6 Tahun XXI, Desember, 1991, hlm. 35

<sup>42</sup>Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 167

negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah, dan peradilan merupakan sarana terakhir. Sedangkan sejauh menyangkut HAM, yang ditekankan bukan hanya hak atau kewajiban tetapi jalinan yang seimbang antara keduanya. Maka menurut Hadjon<sup>43</sup> elemen-elemen penting dari negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah:

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara.
3. Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal, dan
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban,

Sebagai negara hukum Indonesia harus memperhatikan prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Adapun prinsip pokok negara hukum yaitu:

#### 1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*):

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Hukum adalah otoritas tertinggi. Konsekuensinya bahwa semua warga negara termasuk para pejabat pemerintah harus

<sup>43</sup>*Ibid*



tunduk pada hukum dan sama sama berhak mendapatkan perlakuan dan pengakuan sama di hadapan hukum. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang 'supreme'. Supremasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan untuk semua orang. Keadilan yang tidak memihak pada kepentingan, tetapi keadilan yang benar-benar sesuai dengan hati nurani dan rasa keadilan itu sendiri. Tidak ada alasan untuk membelokkan keadilan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Di sini keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali. Keadilan harus menjadi payung bagi semua orang, payung yang mampu melindungi dari ketidakadilan manusia. Jika hal ini terlaksana maka supremasi hukum di dalam negara hukum kita menjadi nyata.

## 2) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*):

Persamaan dalam hukum adalah persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, maka sikap dan tindakan diskriminatif dan tercela dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang

terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan 'affirmative actions' guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui 'affirmative actions' yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.

Realitanya apakah pelaksanaan persamaan hukum di negara kita sudah dapat terlaksana dengan baik? Tentunya ini merupakan pertanyaan setiap orang. Karena kenyataannya tidak sedikit Aparat penegak hukum terlihat sangat konsisten dan terkesan dipaksakan ketika mengusut persoalan yang menyangkut orang miskin, bahkan terlihat bagaimana upaya mereka secepatnya memenjarakan warga miskin, dan yang tidak masuk akal mereka tak jarang juga menggunakan pasal tindak pidana yang tidak semestinya diterapkan atau bahkan menerapkan juga pasal-pasal tersebut secara berlebihan.

Berbeda sekali ketika kasus yang menimpa pejabat negara atau para koruptor yang jelas-jelas merampok uang negara, yang sangat merugikan negara. Aparat penegak hukum terkesan sengaja memperlambat bahkan berusaha untuk menutupi. Salah satu contoh, kasus penggelapan pajak



yang dilakukan pegawai pajak yang bernama Gayus Tambunan yang melibatkan para pejabat tinggi Polri. Proses hukum terlihat berbelit-belit dan mengarah kepada ketidakjelasan penerapan hukum. Sampai saat ini tidak satupun dari pejabat Polri yang terlibat yang sudah menerima keputusan dari pengadilan. Mereka menjadikan hukum sebagai bola pancing yang harus dilempar kemana mereka suka. Ironinya aparat penegak hukum merasa tidak senang terhadap para pejabat negara yang berusaha untuk menegakkan keadilan.

Masih hangat kasus penahanan pejabat KPK Candra Hamzah dan Bibit Samat Riyanto, mereka bergerak cepat melakukan penahanan dengan alasan yang sangat menciderai proses penegakan hukum di negara kita. Apakah ini persamaan hukum yang didamba oleh setiap manusia, tentunya tidak. Kita sangat membutuhkan asas *Equality Before The Law* diterapkan sebagaimana mestinya. Sehingga masyarakat sangat terlindungi haknya oleh hukum. Idealnya dalam negara hukum (*rechtsstaat*) Indonesia, maka sudah menjadi kewajiban negara untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Karena hak asasi manusia setiap individu adalah yang paling fundamental yang dimiliki setiap orang. Agama Islam pun mengakuinya, hal ini tersirat bahwa agama Islam adalah agama *Rahmatul lil'alamin*, artinya agama yang memberikan kasih sayang di alam ini.

Adapun bentuk pengakuan negara terhadap hak individu adalah negara harus benar-benar mengakui dan melaksanakan persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang, terlebih Negara Indonesia adalah negara hukum, sudah semestinya memperlakukan semua orang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

### 3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*):

Dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan.

Mengenai asas legalitas telah dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 Ayat (1) yaitu "tiada suatu perbuatan dapat di pidana atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan". Hal ini menjelaskan bahwa perbuatan apapun yang dilakukan seseorang selama belum ada aturan yang mengatur maka perbuatan tersebut tidak dapat dihukum.

Berkaitan dengan asas legalitas M. Cherif Bassiouni, membagi ada tiga kategori analogi. Pertama, analogi untuk menciptakan perbuatan pidana baru yang sudah diduga tetapi tidak dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Kedua, analogi yang diterapkan apabila bunyi Undang-undang tidak cukup jelas atau gagal merumuskan unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Ketiga, analogi yang diterapkan terhadap pemidanaan yang tidak didefinisikan oleh pembentuk Undang-undang. Pada sistem dengan pendekatan positivisme yang ketat, asas legalitas membolehkan analogi terhadap pemidanaan, asalkan masih dalam batasan-batasan yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Akan tetapi, pada sistem hukum yang menerapkan asas legalitas yang sangat ketat, penggunaan analogi sepenuhnya dilarang,



dengan mengingat klausula aturan *favor reo*. Artinya, hakim harus menjatuhkan putusan yang meringankan terdakwa.

Asas legalitas memang terkesan memberikan kebebasan terhadap setiap orang untuk melakukan tindakan atau perbuatan apapun selama hukum belum mengaturnya. Apalagi penggunaan analogi sepenuhnya dilarang pada negara yang mempunyai sistem hukum yang menerapkan asas legalitas yang sangat ketat. Tetapi kalau kita kaji lebih dalam untuk mengatasi perbuatan-perbuatan yang dirasakan menodai rasa keadilan masyarakat, tidak ada salahnya menerapkan suatu aturan yang mengatur sejenis terhadap perbuatan yang memang belum diatur di dalam aturan hukum. Karena bukan berarti bahwa perbuatan tersebut akan melanggar bebas meskipun belum ada aturan yang mengaturnya.

#### 4) Pembatasan Kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan. Tersentralnya kekuasaan dalam satu tangan yang mengakibatkan kesewenang-wenangan akan sangat dirasakan imbasnya oleh masyarakat. Karena sebagai kekuasaan tunggal tentunya akan memunculkan arogansi yang ujungnya akan menimbulkan penindasan dan kesengsaraan. Kemerdekaan berpendapat akan terkungkung oleh intimidasi dan arogansi

penguasa. Masyarakat tidak berhak atas kemerdekaan hidupnya, karena segala sesuatunya harus mengikuti apa yang telah digariskan oleh penguasa. Otoritas penguasa adalah merupakan tali belenggu yang mengikat masyarakat. Sehingga masyarakat bagaikan hewan gembala yang harus taat dan ikut kemana arah penggembala pergi. Maka yang terpenting di dalam negara hukum perlu adanya pembatasan dan pembagian kekuasaan.

Upaya untuk mengadakan pembatasan terhadap kekuasaan dilakukan dengan pola-pola pembatasan di dalam pengelolaan internal kekuasaan negara itu sendiri, yaitu dengan mengadakan pembedaan dan pemisahan kekuasaan negara kedalam fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Dalam hubungan ini, yang dapat dianggap paling berpengaruh pemikirannya dalam mengadakan pembedaan fungsi-fungsi kekuasaan itu adalah Montesquieu dengan teori trias politiknya. Yaitu cabang kekuasaan legislatif, cabang kekuasaan eksekutif atau administratif, dan cabang kekuasaan yudisial. Menurut Montesquieu, dalam bukunya "L'Esprit des Lois" (1784) atau dalam bahasa Inggris-nya "The Spirit of The Laws", yang mengikuti jalan pikiran John Locke, membagi kekuasaan negara kedalam tiga cabang, yaitu:

- a. Kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang.
- b. Kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan.
- c. Kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif.

Pembagian kekuasaan tersebut dimaksudkan untuk lebih jelas kewenangannya masing-masing. Sehingga masyarakat akan lebih mudah memahami dan mengawasi terhadap pola kinerja lembaga-lembaga tersebut.



#### 5) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perlu adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Karena hukum akan dapat ditegakkan ketika aparat penegak hukumnya mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakan hukum tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, dan yang paling terpenting adalah bagaimana menerapkan rasa keadilan dalam masyarakat. Maka seorang hakim di dalam menjalankan tugas judisialnya harus terbebas dari intervensi dan pengaruh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa.

Peradilan bebas dan tidak memihak tersebut berfungsi sebagai dasar bagi aparat penegak hukum agar dalam menjalankan tugasnya lebih mengedepankan rasa keadilan yang didamba oleh seluruh masyarakat. Seorang hakim dalam memberikan keputusan tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai 'mulut' undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga 'mulut' keadilan yang

menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga seorang jaksa tidak boleh melaksanakan tuntutan hanya berdasarkan keinginan seseorang atau kelompok tertentu saja. Tetapi tuntutan tersebut harus benar-benar murni berdasarkan rasa keadilan di masyarakat. Jika aparat penegak hukum, baik hakim maupun jaksa ketika melaksanakan tugasnya terbebas dari intervensi siapapun maka dapat dipastikan hukum akan menjadi payung bagi para pencari keadilan.

#### 6) Peradilan Tata Usaha Negara:

Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama negara hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalandkannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara. Pengadilan Tata Usaha Negara ini penting disebut tersendiri, karena dialah yang menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Jika hal itu terjadi, maka harus ada pengadilan yang menyelesaikan tuntutan keadilan itu bagi warga negara, dan harus ada jaminan bahwa putusan hakim tata usaha negara itu benar-benar dijalankan oleh para pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Sudah tentu, keberadaan hakim peradilan tata usaha negara itu sendiri harus pula dijamin bebas dan tidak memihak sesuai prinsip '*independent and impartial judiciary*' tersebut di atas.



7) Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*):

Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, negara hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Pentingnya mahkamah konstitusi (*constitutional courts*) ini adalah dalam upaya memperkuat sistem 'checks and balances' antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan. Keberadaan mahkamah konstitusi ini di berbagai negara demokrasi dewasa ini makin dianggap penting dan karena itu dapat ditambahkan menjadi satu pilar baru bagi tegaknya negara hukum modern.

8) Perlindungan Hak Asasi Manusia:

Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Bebas dalam arti manusia bebas menentukan segala kehendaknya selama tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada, seperti bebas menentukan agama yang diyakini, sedangkan asasi adalah segala sesuatu yang sangat mendasar bagi manusia. Agama Islam sangat menghargai adanya hak asasi manusia, sebagaimana termaktub dalam firman Allah dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 33 yang artinya:

*"Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."*

Juga di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 183, yang artinya:

*"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;"*

Maka perlu Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut di masyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.



9) Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*):

Negara Indonesia merupakan negara yang mengedepankan demokrasi. Terutama sejak bergulirnya era reformasi demokrasi sangat nampak sekali baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. negara demokrasi selalu mengedepankan prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat, negara juga menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Dengan demikian, negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikembangkan bukanlah 'absolute rechtsstaat', melainkan 'demokratische rechtsstaat' atau negara hukum yang demokratis. Dengan perkataan lain, dalam setiap negara hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap negara Demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.

Kenyataannya, demokrasi yang menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali, belum bisa diterapkan sebagaimana mestinya. Masih banyaknya ketimpangan-ketimpangan yang dirasakan masyarakat terutama dalam penerapan hukum. Masyarakat belum bisa merasakan keadilan hukum yang semestinya.

Hukum masih berpihak terhadap orang atau kelompok tertentu. Terbukti masih ringannya hukuman bagi para koruptor tak sebanding dengan perbuatannya yang sangat merugikan negara. Berbeda ketika masyarakat bawah yang melakukan pelanggaran, hukuman yang dikenakan terasa lebih berat di banding tindakan yang dilakukan. Maka untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, keadilan adalah prioritas utama.

10) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*).

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan negara Indonesia tersebut. Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia tidak akan terjebak menjadi sekedar 'rule-driven', melainkan tetap 'mission driven', tetapi 'mission driven' yang tetap didasarkan atas aturan.



#### 11) 11. Transparansi dan Kontrol Sosial

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Adanya partisipasi langsung ini penting karena sistem perwakilan rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Karena itulah, prinsip 'representation in ideas' dibedakan dari 'representation in presence', karena perwakilan fisik saja belum tentu mencerminkan keterwakilan gagasan atau aspirasi. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparaturnya kepolisian, kejaksaan, pengacara, hakim, dan pejabat lembaga pemasyarakatan, semuanya memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.

Kontrol sosial atau pengawasan masyarakat terhadap proses pembuatan dan penegakan hukum dirasakan sangat efektif. Karena hukum merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur pola tatanan kehidupan masyarakat dalam interaksi secara vertikal dan horizontal. Pengawasan ini diharapkan benar-benar mampu mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi setiap orang. Maka negara hukum Indonesia adalah negara yang tidak hanya berlandaskan aturan-aturan hukum yang bersifat formal saja, tetapi juga harus berdasarkan keadilan terhadap masyarakat. Negara Hukum Indonesia jelas bukan sekedar kerangka bangunan formal tapi lebih daripada itu ia merupakan manifestasi dari nilai-nilai dan norma-norma,

seperti: kebersamaan, kesetaraan, keseimbangan, keadilan yang sepakat dianut bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur itu berasal dari berbagai sumber seperti, agama, budaya, dan berbagai ajaran filsafat sosial, serta pengalaman hidup bangsa Indonesia. Kemudian nilai-nilai luhur tersebut diintegrasikan ke dalam suatu aturan hukum yang ditujukan untuk mengatur seluruh tata kehidupan masyarakat dalam bernegara. Dengan aturan hukum tersebut perjalanan ketatanegaraan Indonesia yang selalu berlandaskan rasa keadilan terhadap masyarakat akan terwujud, sehingga cita-cita Negara Indonesia sebagai negara hukum Indonesia akan terwujud.

Ketegasan mengenai Negara Indonesia merupakan negara hukum dapat dikemukakan dalam Pembukaan UUD 1945, di mana yang dimaksud negara berdasarkan hukum bukanlah sekedar negara berdasarkan hukum dalam arti formal, artinya hanya berperan sebagai penjaga malam, yang tugasnya untuk menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran dan menindak para pelanggar hukum agar mereka jera, atau mengutamakan ketentraman dan ketertiban, melainkan negara berdasarkan hukum dalam arti materiil artinya negara dengan berdasar pada hukum, hendak berusaha menciptakan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya, sesuai dengan apa yang dimaksud dalam alinea IV Pembukaan UUD '45, antara lain "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Apabila prinsip-prinsip tersebut dijalankan dengan baik, negara hukum Indonesia yang dicitakan akan dapat terwujud sesuai dengan harapan bangsa



Indonesia. Setelah amandemen ke-4 Indonesia sebagai negara hukum telah disebut secara eksplisit pada Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945.

### B. Ciri-ciri Negara Hukum

tentang negara hukum masih terus berkembang sampai hari ini. Untuk pertama kali cita negara hukum ini dikemukakan dalam abad ke XVII di Inggris dan merupakan latar belakang dari revolusi 1688. Hal ini merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan penguasa di masa lampau. Oleh karena itu unsur-unsur dari negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa. Sejarah dan perkembangan masyarakat setiap negara tidaklah sama, karena setiap negara mempunyai kultur dan sosial politik yang berbeda. Unsur-unsur negara hukum Indonesia akan berbeda dengan negara yang lain. Di Indonesia hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Pemerintah negara berdasar atas suatu konstitusi dengan kekuasaan pemerintahan terbatas tidak absolute berbeda dengan Negara Inggris, hukum disana berdasarkan kekuasaan raja. Ucapan raja adalah hukum bagi masyarakat. oleh karenanya pengertian dan unsur-unsur negara hukumnya pun berbeda pula.

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "rechtsstaat". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "The Rule of Law".

Menurut A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting

dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah "The Rule of Law", yaitu:

1. Supremasi dari hukum/*Supremacy of Law*, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara hukum adalah hukum (kedaulatan hukum).
2. Persamaan Kedudukan hukum bagi setiap orang (*Equality before the law*),
3. Konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak azasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penguasa bahwa hak azasi itu harus dilindungi.

Sedangkan menurut Friedrich Julius stahl negara hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hak Asasi Manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Keempat prinsip 'rechtsstaat' yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip 'Rule of Law' yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh "The International Commission of Jurist", prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap



ciri penting negara hukum menurut "The International Commission of Jurists" itu adalah:

- a. Negara harus tunduk pada hukum.
- b. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
- c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Kedua pendapat tersebut masih dipengaruhi oleh konsep negara hukum formal/dalam arti sempit. Profesor Utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materil atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu negara hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya 'Law in a Changing Society' membedakan antara 'rule of law' dalam arti formil yaitu dalam arti 'organized public power', dan 'rule of law' dalam arti materiel yaitu 'the rule of just law'. Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif. Menurut Montesquieu, negara yang paling baik adalah negara hukum karena terkandung: Perlindungan HAM, Ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara, Membatasi

kekuasaan dan wewenang organ-organ negara. Sedang Menurut Sudargo G. ada 3 ciri negara hukum yaitu:

- a. terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap seseorang.
- b. asas legalitas
- c. pemisahan kekuasaan

Menurut Frans Magnis S. mengemukakan ciri negara hukum sebagai ciri demokrasi, di mana fungsi kenegaraan dijalankan sesuai UUD yang menjamin Hak Azasi Manusia (HAM), adapun ciri-cirinya yaitu:

- a. Badan negara menjalankan kekuasaan taat pada hukum yang berlaku. Terhadap tindakan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusannya harus dilaksanakan badan Negara
- b. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak

Di dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 (3) disebutkan: "Negara berdasar atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belaka, Pemerintah negara berdasar atas suatu konstitusi dengan kekuasaan pemerintahan terbatas tidak absolut".

Negara hukum merupakan salah satu ciri negara demokrasi. Menurut FM Suseno ciri negara demokrasi:

- a. Negara hukum
- b. Pemerintahan di bawah kontrol nyata masyarakat
- c. Pemilihan umum yang bebas
- d. Prinsip mayoritas.
- e. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

*Internasional Commission of Jurits menentukan pula syarat-syarat representative government under the rule of law, sebagai berikut:*



- a. Perlindungan konstitusional dan prosedur untuk memperolehnya.
- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
- c. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
- d. Pemilihan umum yang bebas.
- e. Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi.
- f. Pendidikan civil (kewarganegaraan).

Ciri-ciri negara hukum berdasarkan hukum dalam arti materil menurut kajian UUD '45 adalah:

1. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara, hal ini dapat dilihat dalam UUD '45 pada pasal-pasal:
  - a. Pasal 1 ayat 2 UUD '45 "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".
  - b. Pasal 3 UUD '45:
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
4. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
  - a. Pasal 4 ayat 1 UUD '45:
    - a) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
    - b) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
  - b. Pasal 5 UUD '45

- a) Pasal 20 ayat 1 UUD '45
- b) Pasal 20A, 21, 22, 22D UUD '45
- c) Pasal 24, 24A, 24C UUD '45,
5. Diakuinya hak azasi manusia dan dituangkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dalam UUD '45 pada pasal 26, 27, 28, 28A - 28J, 29 ayat (2), dan pasal 31 ayat 1 UUD '45
6. Adanya dasar hukum bagi kekuasaan pemerintah (azas legalitas).
7. Adanya peradilan yang bebas dan merdeka serta tidak memihak. Lihat pasal 24 dan 25 UUD '45 beserta penjelasannya
8. Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lihat Pasal 27 Ayat (1) dan (2) UUD '45.
9. Adanya kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lihat pasal 27, 28, 31, 32, 33, dan 34 UUD '45. Dari beberapa ciri-ciri negara hukum tersebut di atas, semuanya bermuara pada bagaimana keadilan harus ditegakkan, dan bagaimana Hak Azasi Manusia harus dilindungi. Karena kedua unsur di atas merupakan hal yang paling fundamental dalam negara hukum.

### C. Konsekuensi Negara Hukum

Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Bab I Pasal 1 Ayat (3) yaitu "Negara Indonesia adalah negara



hukum", maka sudah menjadi keharusan bagi pemerintah dan warga negara untuk melakukan penegakan hukum bersama. Tidak ada perbedaan hukum antara pejabat negara dengan rakyat kecil. Karena dalam negara hukum selalu mengedepankan prinsip *equality before the law* yaitu persamaan di hadapan hukum, hukum harus tidak pandang bulu. Bagi pejabat dan pengusaha yang berada di daerah ibu kota, Hukum harus diperlakukan sama dengan masyarakat di daerah terpencil sekalipun.

Dalam negara hukum konsekuensi yang harus diterima adalah rakyat dianggap sudah tahu semua tentang aturan hukum. Karena dalam negara hukum berlaku suatu teori fiktie hukum, maksudnya rakyat dianggap tahu tentang hukum sejak hukum itu ditetapkan.

Ketidaktahuan masyarakat di daerah terpencil sekalipun tidak akan membebaskan mereka dari jeratan dan tuntutan hukum. Tetapi apakah adil teori ini diberlakukan. Bagi negara maju yang penduduknya sedikit dan tingkat kesejahteraannya memadai tentunya tidak ada masalah terhadap penerapan teori ini. Tetapi bagaimana terhadap negara yang masih berkembang dan wilayahnya yang luas dengan penduduknya yang berjumlah banyak, serta masih terbelang penduduknya dalam tingkat kesejahteraan yang minim/ miskin yang diikuti rendahnya tingkat pendidikan mereka. Tidakkah adil jika harus memaksakan penerapan teori fiktie hukum. Karena teori ini hanya bisa diberlakukan bagi negara yang tingkat kesejahteraan dan pendidikan masyarakatnya tinggi. Namun sebagai negara hukum tentunya beban untuk membina kesadaran hukum masyarakat harus tetap dijalankan meskipun dengan melalui jalan berliku dan bersusah payah, karena ini merupakan

konsekuensi yang harus diterima sebagai negara yang dicita-citakan sebagai negara hukum.

Dalam upaya mewujudkan cita-cita negara hukum Indonesia maka pembangunan hukum diarahkan kepada 5 (lima) kiat pokok:

1. Pembangunan materi hukum.
2. Pembangunan aparatatur hukum.
3. Pembangunan sarana dan prasarana hukum.
4. Pembangunan budaya hukum dan
5. Pembangunan dan penegakkan Hak Azasi Manusia (HAM).

Maka, hendaknya pemahaman terhadap hukum sangatlah perlu. Hukum jangan dipahami secara sektoral saja, tetapi harus dipahami secara komprehensif. Hukum jangan hanya dilihat bagaimana hukum itu dibentuk dan dibuat tetapi lebih dipahami bagaimana hukum itu harus diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi kesuksesan dalam menunjang pembangunan negara hukum.

Dengan memahami hukum secara komprehensif akan mempermudah jalan menuju masyarakat yang paham akan hukum sehingga cita-cita negara hukum Indonesia akan terwujud dengan sendirinya. Oleh karenanya keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya dialami di semua tempat di dunia ini. Maka institusi hukum hendaknya mempunyai ciri-ciri bagian yang melihat dalam masyarakat lain:

1. Stabilitas.
2. Memberikan kerangka social terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat.



3. Sebagai kerangka social untuk kebutuhan manusia itu, maka institusi menampilkan wujudnya dalam bentuk norma-norma.
4. Adanya jalinan antara institusi.

#### D. Hukum Dan Politik

Hukum memang tidak dapat berdiri sendiri, hukum selalu ada keterkaitan dengan faktor-faktor yang lain. Seperti hubungan hukum dengan politik sangatlah erat. Dalam hubungan tolak tarik antara politik dan hukum, maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum. Sehingga jika harus berhadapan dengan politik, maka hukum berada dalam kedudukan yang lemah. Dalam kaitan ini, Lev mengatakan untuk memahami sistem hukum di tengah-tengah transformasi politik harus diamati dari bawah dan dilihat peran sosial politik apa yang diberikan orang kepadanya. Dengan melihat peran sosial politik itu kita akan tahu betapa kuatnya peran politik dalam sistem tatanan hukum di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa dalam setiap pembentukan peraturan hukum di Indonesia tentunya tidak terlepas dari permainan elit politik. Suatu contoh mulai dibredelinya sistem penyadapan KPK yang selama ini sangat efektif menjerat dan menjebloskan para koruptor, baik dari kalangan eksekutif, Legislatif dan yudikatif. Terkuaknya kebusukan mereka dalam menghabiskan uang negara membuat mereka gerah terhadap sistem penyadapan yang dipakai oleh KPK sehingga dengan cara bagaimana agar sistem penyadapan yang selama ini dipakai KPK agar bisa lebih diminimalkan.

Sri Soemantri pernah mengkonstatasi hubungan antara hukum dan politik di Indonesia ibarat perjalanan lokomotif kereta api yang keluar dari relnya. Jika hukum diibaratkan rel dan politik diibaratkan lokomotif maka sering terlihat lokomotif itu keluar dari rel yang seharusnya dilalui. Ketika lokomotif sudah keluar dari relnya, maka yang terjadi adalah kekacauan belaka. Semboyan atau prinsip yang menyatakan politik dan hukum harus bekerja sama dan saling menguatkan melalui ungkapan "hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman, menjadi semacam utopia belaka. Karena ketika hukum dan politik disandingkan maka yang terjadi politik akan mendominasi berlakunya hukum, hukum tak akan mampu mengarahkan kekuasaan untuk berjalan dalam koridornya. Dalam prakteknya hukum kerap kali menjadi cerminan dari kehendak pemegang kekuasaan politik, sehingga dapat diartikan hukum adalah sama dengan kekuasaan.

Apeldoorn misalnya mencatat, adanya beberapa pengikut paham yang menyatakan bahwa hukum adalah kekuasaan: Pertama, kaum sophis di Yunani yang mengatakan bahwa keadilan adalah apa yang berfaedah bagi orang yang lebih kuat, Kedua, Lassalle mengatakan konstitusi suatu negara bukanlah undang-undang dasar yang tertulis yang hanya merupakan secarik kertas, melainkan hubungan-hubungan yang nyata di dalam suatu negara. Ketiga, Gumplovis mengatakan hukum berdasar atas penaklukan yang lemah oleh yang kuat, hukum adalah susunan definisi yang dibentuk oleh pihak yang kuat untuk mempertahankan kekuasaan. Keempat, sebagian pengikut positivisme mengatakan kepatuhan kepada hukum tidak lain



dari tunduknya orang yang lemah pada kehendak yang lebih kuat, sehingga hukum hanya merupakan hak orang yang terkuat.

Ketika orang berasumsi bahwa hukum adalah produk politik atau kekuasaan maka sudah barang tentu hukum harus mengikuti kemana alur kekuasaan itu, sehingga hukum tak akan mampu menjamah kehendak kekuasaan politik. Karena politik akan lebih dominan untuk mengatur aturan hukum, maka yang terjadi hukum hanya lembaran-lembaran aturan bagi para pelaku politik.

#### E. Hukum Dan Birokrasi

Idealnya, memang hukum dan kekuasaan paling tidak harus saling mendukung. Dalam arti hukum harus ditegakkan dengan kekuasaan agar daya paksanya bisa efektif. Sebaliknya, kekuasaan harus dijalankan di atas prinsip-prinsip hukum agar tidak sewenang-wenang. Hukum memang membutuhkan kekuasaan, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan kekuasaan itu untuk menunggangi hukum. Tetapi kenyataannya antara hukum dan kekuasaan tidak berjalan ideal. Karena hukum seringkali berjalan atas kemauan penguasa. Di sini hukum tidak mempunyai daya paksa sama sekali, tetapi hukum menjadi budak yang harus mengikuti kemana penguasa harus bertindak dan berkehendak. Para birokrat yang seharusnya mengawal dalam pelaksanaan hukum bukan sebaliknya mereka menjadikan hukum sebagai legalitas bagi kesalahan mereka. Baginya hukum dibuat adalah untuk melindungi kepentingan mereka dan bukan untuk menegakkan keadilan. Sungguh ironi sekali, hukum yang seharusnya untuk mengatur pergaulan hidup antara penguasa dan masyarakat, tetapi

harus bertekuk lutut dihadapan birokrasi. Contoh yang paling aktual seorang Anggodo yang nyata-nyata sudah melakukan perbuatan mempermainkan hukum, karena kedekatannya dengan birokrasi dan kekuasaan tetap bisa melenggang dengan alasan tidak cukup bukti. Lalu mau dikemanakan hukum negara kita ini.

Sebagian golongan positivisme hukum berpendapat, bahwa kepatuhan kepada hukum tidak lain dari tunduknya orang yang lebih lemah kepada kehendak yang lebih kuat, sehingga hukum itu merupakan hak orang yang terkuat saja. Apeldoorn sendiri mencatat sikap dan pandangannya tentang hukum dan kekuasaan sebagai berikut:

*Pertama*, hukum sebagai bagian dari kekuasaan berkaitan dengan kekuasaan batin (juga dengan kekuasaan fisik) tetapi kekuasaan yang diperlukan untuk menegakkan hukum haruslah selalu berada dibelakang hukum, sehingga kekuasaan material itu tak bisa dilihat sebagai hal yang hakiki, apalagi esensial.

*Kedua*, anasir esensial hukum adalah kekuasaan susila sehingga jika ada peraturan-peraturan yang dibuat dengan ancaman dan kekuasaan, maka peraturan itu bukanlah hukum, melainkan menyepelekan hukum.

*Ketiga*, hukum sebagai kekuasaan bermaksud menghindari paksaan kekuatan material, sehingga kekerasan atau paksaan itu merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dan karenanya kekerasan itu harus ditundukkan pada hukum.



#### F. Hukum Dan Keadilan

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menegakkan keadilan. Hukum masih terus bertahan dan dipertahankan karena dibutuhkan untuk tegaknya suatu keadilan. Maka prinsip yang paling utama adalah setiap kegiatan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran maka dibutuhkan dukungan dari hukum. Jadi antara hukum dan keadilan harus saling terkait dan saling mendukung. Namun faktanya tidak semua kegiatan menegakkan hukum dengan sendirinya sudah menegakkan keadilan. Banyak sekali para penegak hukum hanya menggunakan hukum untuk hukum bukan hukum untuk keadilan. Orang menggunakan hukum hanya untuk kebenaran formal tetapi substansinya sangat bertentangan dengan rasa keadilan. Contoh kasus mbok Minah yang hanya mencuri 3 (tiga) buah kakao dijatuhi oleh hakim hukuman kurungan 1.5 bulan. Secara hukum perbuatan mencuri memang perbuatan salah dan melanggar aturan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah ", tetapi apa penerapan hukuman terhadap mbok Minah sudah dianggap adil, karena harga dari 3 (tiga) buah kakao tidak seimbang jika dibandingkan dengan proses peradilan yang mencurahkan tenaga dan biaya.

Satu lagi kasus Prita Mulyasari, yang karena curhatnya atas ketidakpuasan pelayan Rumah Sakit Omni Internasional sempat merasakan dinginnya hotel prodeo,

yang kemudian atas desakan beberapa pihak maka dia hanya menjalani tahanan kota, tetapi kemudian selang beberapa hari menghirup udara bebas, dalam sidang lanjutan oleh Pengadilan Tinggi Banten dijatuhi hukuman perdata dengan denda 204 juta rupiah belum lagi ancaman hukuman pidana yang masih dalam proses penuntutan, meskipun pada akhirnya hakim menjatuhkan bebas murni. Ironi sekali hukum yang seharusnya berjalan untuk keadilan namun faktanya keadilan sama sekali tidak nampak. Sudah seharusnya para penegak hukum jangan hanya menggunakan hukum untuk hukum tetapi hendaknya menggunakan hukum untuk keadilan. Sehingga antara hukum dan keadilan berjalan selaras.

#### G. Hukum Dan Ekonomi

Prinsip fictie hukum yang selalu dikedepankan oleh negara hukum hanya bisa direalisasikan oleh negara yang masyarakatnya dalam taraf ekonomi yang bagus, ini sebagai dasar bahwa hukum hanya bisa berjalan dengan baik ketika kesejahteraan ekonomi masyarakat baik pula. Hukum dan ekonomi tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, dan sudah semestinya keduanya saling menunjang dan memposisikan pada tempatnya masing-masing. Hukum akan berjalan dengan baik ketika masyarakat sadar akan perlunya hukum, tetapi kesadaran hukum masyarakat akan timbul ketika ditunjang oleh perekonomian baik pula. Meskipun tidak sedikit pelanggaran hukum dilakukan oleh orang-orang berperekonomian sangat baik. Mereka juga berpotensi untuk membelokkan hukum sebagaimana mestinya.

Hukum memang harus ada dalam perputaran roda ekonomi, agar tidak ada penjahat-penjahat ekonomi yang



tentunya sangat merugikan negara dan masyarakat, tidak ada aliran-aliran dana yang tidak jelas, dan tidak ada kasus-kasus Century lagi di negara Indonesia. Tetapi yang menjadi pertanyaan apakah hukum juga dapat menjawab permasalahan kemiskinan masyarakat kita. Di sinilah keterbatasan hukum, karena hukum hanya bisa mengatur tanpa bisa menyelesaikan permasalahan perekonomian bangsa ini.

Dalam dunia usaha harus ditumbuhkembangkan secara bersama-sama secara seimbang dengan negara dan masyarakat. Untuk itu harus ada hubungan yang saling mempengaruhi dan saling mengendalikan sehingga tidak terjadi dominasi antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam melakukan aktivitas dunia usaha baik dalam proses produksi, tenaga kerja, pelayanan dan perdagangan, maka kepastian hukum sangatlah dibutuhkan untuk mewujudkan terciptanya iklim usaha yang kondusif. Karena secara substansial kepentingan-kepentingan dunia usaha akan dicapai dengan baik jika negara hukum dapat diwujudkan. Karena dengan terwujudnya negara hukum maka sudah pasti kepastian hukum akan tercapai, sehingga sistem perekonomian yang memihak terhadap rakyat akan terwujud.

Di Negara Indonesia yang menjadi landasan konstitusional perekonomian nasional diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara.

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal tersebut di atas merupakan dasar perekonomian nasional. Namun, harus diingat kembali bahwa sistem perekonomian Indonesia bukan sistem kapitalisme liberal, karena dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Tetapi demokrasi ekonomi dan ekonomi pasar demi mencapai kesejahteraan rakyat. Dengan dasar tersebut negara melakukan pengaturan dan pembatasan tertentu sebagai pelaksanaan konsep welfare state (negara berfungsi sebagai alat kesejahteraan) dalam sistem perekonomian nasional yang berdasarkan UUD 1945. Maka dapat dikatakan antara hukum dan ekonomi merupakan satu kesatuan yang saling mendukung untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia.



#### H. Hukum Dan Masyarakat

Hukum merupakan aturan yang diciptakan, salah satu fungsinya untuk mengatur masyarakat dalam berinteraksi dengan alam sekitarnya. Masyarakat merupakan komponen yang sangat penting dalam berlakunya hukum. Antara keduanya saling terkait satu sama yang lainnya. Hukum tanpa masyarakat maka hukum itu akan mubazir tak terpakai. Begitu juga sebaliknya masyarakat tanpa hukum maka akan terjadi kerancuan interaksi yang berimbas pada terwujudnya hukum rimba, dimana yang kuat sudah dapat di pastikan akan menang dan berkuasa. Tanpa hukum ketentraman dan kedamaian tidak akan pernah terwujud, yang terjadi penindasan dan kesewenang-wenangan belaka. Meskipun dengan terciptanya hukum masih banyak oknum-oknum yang menjadikan hukum sebagai payung legalitas perbuatan tak baik mereka, atau ada sebagian oknum yang menganggap bahwa hukum adalah hanya ciptaan manusia yang tak mesti harus ditaati. Ironinya lagi tak sedikit aparat penegak hukum yang justru mereka mempermainkan hukum. Pertanyaannya masih perlukah hukum diciptakan sedangkan masih banyak orang yang menganggap hukum hanya sebuah aturan formalitas saja. Jawabnya, hukum harus tetap ada dan salah satunya untuk mengatur ketertiban masyarakat. Jika masih ada yang melanggar hukum itu merupakan tantangan untuk terwujudnya hukum yang lebih baik. Meskipun hubungan hukum dan masyarakat sudah sangat jelas, tapi dalam menganalisa fenomena ini banyak sarjana yang tampaknya lebih terobsesi dengan gagasan instrumentalisme mengenai hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*). Konsep tersebut menganggap hukum sebagai mesin pengontrol masyarakat. Hukum menciptakan

aturan sosial yang sangat canggih, dan memberikan tekanan kepada individu agar tugasnya dalam mempertahankan masyarakat yang beradab dan menghalanginya agar tidak melakukan tindakan anti-sosial, yang berlawanan dengan postulat tatanan hukum. Prinsip ini telah diterapkan secara konsisten oleh negara-negara modern dalam usaha mereka menciptakan hukum nasional, dan bahkan dengan sistem hukum modern ini hampir seluruh negara telah berhasil membentuk masyarakatnya. Perwujudan hukum sebagai pengontrol masyarakat tidak berarti hukum mengekang kebebasan masyarakat di dalam berekspresi, tetapi hukum mengarahkan masyarakat ke dalam wadah ekspresi yang lebih sesuai dengan budaya masyarakat.

Baru belakangan ini muncul fenomena dimana penekanan yang terlalu besar terhadap hukum sebagai instrumen rekayasa sosial digantikan oleh perspektif lain yang melihat hubungan antara hukum dan masyarakat sebagai sebuah rangkaian kesatuan yang memiliki interaksi setara. Dalam dimensi baru, hukum tidak lagi dianggap sebagai variabel yang independen yang terlepas dari norma-norma lain, tapi sama-sama sebagai variabel dependen sebagaimana halnya norma-norma sosial dan identitas budaya lainnya. Sementara hubungan antara hukum dan masyarakat lebih sering dianggap berada dalam hubungan yang saling membentuk antara hukum negara dengan tatanan normatif lainnya. Dalam pandangan ini hukum tidak hanya mengontrol tetapi juga dikontrol oleh masyarakat. Hukum tidak hanya sebagai penjaga masyarakat dan mengarahkan kemana masyarakat harus berbuat, tetapi hukum dibuat harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada. Hukum model seperti inilah yang akan selalu digandrungi dan akan



selalu dijaga oleh masyarakat. Karena hukum dirasakan sebagai teman yang selalu memberi dan diberi kebaikan oleh masyarakat itu sendiri. Pada pokoknya, hubungan hukum dan masyarakat bukan hanya sekedar hubungan yang saling mengontrol dan dikontrol tetapi lebih diarahkan kepada interaksi saling membutuhkan satu sama yang lainnya. Salah satu faktor tidak terpenuhi yang ada hanya kebakuan belaka yang mengakibatkan kekacauan dalam pola kehidupan.

#### I. Penegakan Hukum Yang Responsif

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Dalam arti sempit penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penegakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat penegak hukum.

Penegakan hukum merupakan bagian dari pelaksanaan politik kenegaraan suatu negara. Oleh karena itu sistem politik dan suasana politik sangat berpengaruh di dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Sistem politik yang baik dengan dibarengi oleh suasana politik yang kondusif akan memudahkan dalam penegakan hukum, kebalikannya jika sistem dan suasana politik yang carut marut akan sangat menghambat terhadap penegakan hukum. Dalam politik ada sistem politik otoritarian dan demokrasi.

Sistem politik demokrasi hanya menekankan kebebasan dalam berpendapat tanpa memperdulikan tanggung jawab, berbeda dengan sistem politik otoritarian yang selalu menekankan tanggung jawab disamping kebebasan yang diperlukan. Karena itu untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik perlu tatanan dan praktek politik yang baik juga. Terutama hukum harus mampu merespon dinamika perkembangan berfikir masyarakat, sehingga hukum tidak berjalan ditempat.

Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya, kalau Roman Law sistem ini dipahami secara kaku dan seadanya, maka tidak adalah hakim keliru dalam setiap memberikan atau memutuskan suatu perkara serta dalam pada itu pula tidak adalah beban tanggung jawab hakim (karena legal maximnya, memang peraturan perundang-undangnya secara harfiah begitu) dan tidak ada pula konsekuensi, walaupun keputusan itu salah, keliru, tidak tepat, bertentangan dengan keadilan, ataupun bertentangan dengan hati nuraninya sendiri. Sehingga memunculkan aparat-aparat penegak hukum rimba, sewenang-wenang, menindas, memeras, dan tidak lagi mendahulukan rasa keadilan di dalam masyarakat dan muncul pula spekulasi anggapan jika ada uang maka aparat bisa dibeli (Kasih Uang Habis Perkara, KUHP).

Semestinya aparat penegak hukum, yaitu polisi, hakim, jaksa, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan, harus benar-benar memahami fungsi hukum dan mengedepankan hukum dalam bertindak. Artinya dalam melakukan aktifitas penegakan hukum, mereka harus bersandarkan kepada hukum yang berlaku. Apalagi di era demokrasi yang masyarakatnya sedikit banyak mengetahui



hukum, maka menuntut mereka para penegak hukum untuk benar-benar paham dalam memberlakukan hukum.

Salah satu aspek yang terpenting dalam penegakan hukum adalah bagaimana mengenalkan hukum kepada masyarakat dan menggalakkan kesadaran hukum mereka. Penegak hukum jangan hanya menganggap masyarakat sebagai obyek dalam penegakan hukum belaka, tetapi harus melibatkan masyarakat sebagai subyek dalam penegakan hukum. Dengan melibatkan masyarakat dalam penegakan hukum maka masyarakat akan lebih memiliki, memahami, menghargai, dan menumbuhkan kesadaran hukum mereka. Tanpa itu semua sudah bisa dipastikan hukum tidak mungkin ditegakkan.

Hubungan masyarakat dengan hukum sudah terjalin dengan jelas, meskipun banyak pakar yang terobsesi untuk menggagas hukum sebagai sosial engineering yaitu hukum berfungsi sebagai alat pengubah masyarakat. Menurut Roscoe Pound<sup>44</sup> sosial engineering dianalogkan suatu proses mekanik. Hal ini terlihat dengan adanya perkembangan industri dan transaksi-transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai dan norma baru. Peran pengubah tersebut dipegang oleh hakim melalui interpretasi dalam mengadili kasus yang dihadapinya secara seimbang (*balance*). Interpretasi-interpretasi tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Studi tentang aspek sosial yang aktual dari lembaga hukum

---

<sup>44</sup>Roscoe Pound, *The Task of Law*, Pennsylvania: Franklin and Marshal College, 1994, p. 69

2. Tujuan dari pembuat peraturan hukum yang efektif.
3. Studi tentang sosiologi dalam mempersiapkan hukum.
4. Studi tentang metodologi hukum.
5. Sejarah hukum.
6. Arti penting tentang alasan-alasan dan solusi dari kasus-kasus individual yang pada angkatan terdahulu berisi tentang keadilan yang abstrak dari suatu hukum yang abstrak.

Di Negara Indonesia, masih banyak yang beranggapan bahwa hukum adalah undang-undang yang dogmatis tanpa memperdulikan gejala yang timbul dalam masyarakat. Tidak sedikit yang memanfaatkan hukum untuk memperkaya diri tanpa memperdulikan rasa keadilan yang didamba oleh semua lapisan masyarakat. Bagi mereka yang beranggapan seperti itu, keadilan tak penting, asal mereka puas dan bisa kaya sudah cukup. Anggapan ini jelas sangat keliru dan meresahkan terutama masyarakat yang awam hukum dan kalangan bawah merasa tidak akan terlindungi. Lalu bagaimana nasib hukum Indonesia dan mau dibawa kemana, di sinilah perlunya penegakan hukum yang responsif.

Dalam penegakan hukum responsif, penegakan hukum tidak hanya berdasarkan hukum secara formal, di mana hukum diberlakukan hanya berdasar aturan-aturan saja, dan hukum hanya diberlakukan sebagai penjaga dari setiap pelanggaran atau diformat untuk mencegah setiap pelanggaran, tetapi hukum harus lebih progresif, yaitu hukum harus dilihat dari sisi keadilan masyarakat. Sehingga



ketika hukum itu ditegakkan maka rasa keadilan akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

## 7. Lembaga Penegakan Hukum

### A. Unsur Penegakan Hukum

Di dalam negara hukum, penegakan hukum merupakan hal yang sangat urgen, karena hukum merupakan pegangan pemerintah dalam mengatur tata kehidupan negara. Selanjutnya, apabila kita melihat penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses itu selalu melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, serta masyarakatnya. Masing-masing komponen ingin mengembangkan nilai-nilai yang ada di lingkungan yang sarat dengan faktor-faktor non hukum lainnya. Ketiga komponen tersebut saling terkait satu sama lainnya, karena salah satu hilang maka hukum akan pincang. Kepincangan hukum akan membuat cita-cita penegakan hukum tidak akan terlaksana.

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Namun, semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan (*searching of justice*). Pengadilan tidak lebih hanya menjadi lembaga yang berkutat pada aturan main dan prosedur. Hukum kemudian tidak lagi dapat menyediakan keadilan sebagai trade mark-nya selama ini. Keadilan telah mati secara dramatis di lembaga-lembaga peradilan di bawah rezim hukum modern. Tidak hanya itu, hukum kemudian dipahami semata sebagai produk dari negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Lembaga peradilan yang semula sebagai *house of justice* harus

berubah menjadi tempat menerapkan peraturan perundang-undangan dan prosedur.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena komplektifitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antar sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Ketika hukum berhadapan atau berinteraksi dengan sistem tersebut lebih sering hukum akan terinjak dan tak berdaya.

Di dalam penegakan hukum juga sangat memerlukan aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan polisi yang profesional. Mereka adalah sebagai eksekutor dalam penetapan hukum dan memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Kesibukan para penegak hukum memang terlihat sangat jelas. Hakim dengan semua keputusannya, jaksa dengan penuntutannya, advokat dengan pembelaannya, dan polisi dengan penyelidikan dan penyidikannya. Namun sampai saat ini tetap saja belum bisa menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Masih banyak permasalahan hukum yang belum terselesaikan, atau memang sengaja tidak diselesaikan. Bahkan ada yang terselesaikan dengan mengabaikan rasa keadilan yang menjadi tujuan hukum. Yang paling aktual adalah terbongkarnya mafia kasus dan mafia peradilan dalam sistem tatanan penegak hukum kita. Lalu siapa lagi yang akan menegakkan hukum? Masyarakatkah, sedang masyarakat sendiri merupakan korban dari penegakan hukum yang salah dan melenceng? Betapa rumitnya masalah penegakan hukum membuat kita akan merinding ketika mendengarnya.

Rumitnya permasalahan hukum terutama dalam proses penegakannya, menjadi salah satu penyebab rumitnya



interaksi aparat penegak hukum dengan masyarakat, sehingga sosialisasi hukum di masyarakat akan mengalami kebuntuan. Tindakan aparat penegak hukum yang tidak profesional, tidak jujur, dan tidak adil, menjadikan pesimisme masyarakat terhadap aparat penegak hukum kita. Jika ini di biarkan bergulir terus menerus, sudah dapat dipastikan apresiasi dan ketaatan masyarakat terhadap hukum akan musnah, yang timbul pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan hukum akan berulang-ulang. Untuk menanggulangnya maka diperlukan aparat penegak hukum dengan sumber daya manusia yang kredibel.

Sumber daya manusia yang kredibel dan mempunyai moralitas yang tinggi adalah unsur yang paling utama dan terpenting untuk memperoleh aparat penegak hukum yang kuat dan baik di negeri ini. Karena melencengnya penegakan hukum di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh ulah para penegak hukum yang tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan. Sehingga terjadilah mafia-mafia di dalam tubuh para penegak hukum sendiri yang memunculkan asumsi hukum kita bisa dibeli, asal ada uang habis perkara. Jikalau ini dibiarkan terus menerus maka bisa dipastikan hukum rimbalah yang ada, yang kuat akan menindas yang lemah begitu seterusnya.

Penguatan lembaga penegakan hukum seolah tidak bermakna apa-apa jika dalam praktiknya tidak dibarengi dengan sumber daya manusia yang kredibel, bermoral dan bertanggung jawab. Tetapi ironisnya di negeri ini Aparat yang seharusnya menjadi ujung pedang menebas endemik korupsi justru secara terorganisir ikut terlibat menjadi pelaku korupsi. Kasus penggelapan pajak 25 milyar yang dilakukan oleh pegawai pajak yang bernama Gayus, ternyata sangat

mengagetkan publik, karena banyak sekali melibatkan para penegak hukum, dari kalangan penyidik terlibat beberapa nama petinggi kepolisian, begitu juga dari hakim dan kejaksaan. Sungguh sangat memalukan, aparat penegak hukum yang seyogyanya menjadi benteng dalam penegakan hukum ternyata beramai-ramai memandulkannya. Tampaknya penumpasan korupsi di negeri ini masih akan melalui perjalanan panjang.

Untuk memperoleh penegakan hukum yang efektif ada tiga factor yang mempengaruhinya. Pertama, adanya strategi penegakan hukum yang tepat dan dirumuskan secara komprehensif dan integral, kedua, adanya kehendak politik untuk melaksanakan strategi tersebut, ketiga, adanya pressure dalam bentuk pengawasan masyarakat. Di samping ketiga tersebut di atas, selain diperlukan adanya faktor kepemimpinan yang *committed* terhadap supremasi hukum, juga etika kepemimpinan yang mencakup standar-standar sebagai berikut:

1. *Responsibility and Accountability*; hal ini memungkinkan yang bersangkutan dapat melakukan identifikasi secara terus menerus terhadap kekuatan dan kelemahannya;
2. *Commitment*; mencakup dedikasi, antusiasme terhadap perannya dalam organisasi, komitmen terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang lain, serta standar profesi;
3. *Responsiveness*; sifat peka dan fleksibel terhadap perubahan sosial dan kebutuhan publik;
4. *Knowledge and Skills*; dibangun melalui pendidikan dan pelatihan untuk menjawab kebutuhan akan



ilmu pengetahuan dan teknologi yang bergerak secara dinamik;

5. *Conflicts of Interest*; dalam arti peka terhadap kemungkinan benturan kepentingan, terutama antara kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi;
6. *Profesional Ethics*; selalu melakukan evaluasi untuk mendeteksi seberapa jauh keputusan yang telah diambil sejalan dengan standar etika. Sumber daya manusia yang bermoral dan pola kepemimpinan yang kredibel dan bertanggung jawab serta mempunyai moralitas yang tinggi adalah merupakan unsur yang terpenting dan paling mendasar dalam proses penegakan hukum.

#### B. Lembaga Penegakan Hukum

Tidak dapat dipungkiri bahwa peran para lembaga penegak hukum sangatlah penting. Dalam hal penegakan hukum mereka berperan sebagai penjaga hukum agar tidak terjadi penyelewengan, pelanggaran dan para mafia hukum. Mereka harus selalu menjaga dan mengawal agar hukum bisa terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan semua orang. Tetapi ironis sekali ternyata tidak sedikit dari mereka bahkan menjadi mafia di dalam tubuhnya sendiri. Mereka memanfaatkan kewenangannya untuk mencari keuntungan pribadi semata, bahkan hukum dijadikan benteng untuk melegalkan tindakan mereka. Jika lembaga penegak hukum bertindak seperti itu lalu siapa lagi yang akan bertanggung jawab sebagai benteng dan penjaga hukum? Hal inilah yang harus menjadi pekerjaan rumah bagi semua kalangan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif dan

masyarakat harus selalu mengawasi berlakunya hukum sehingga hukum harus benar-benar mampu ditegakkan. Di dalam proses penegakan hukum tentunya tidak terlepas dari para lembaga penegakan hukum, baik lembaga penegakan hukum perdata, pidana dan hukum administrasi negara.

#### C. Lembaga Pembuat Hukum

Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum tidak begitu saja muncul, tetapi tentunya melalui proses penciptaan yang dilakukan oleh para pembuat hukum. Dalam agama Islam hukum dibuat oleh para mujtahid dengan mengacu dasarnya pada al-Qur'an dan al-Hadits. Di dalam proses pembuatan hukum positif di negara Indonesia, baik perdata, pidana, HAN, dan aturan lainnya juga melalui proses pembuatan. Dalam hal ini pemerintah (eksekutif) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat membuat Draft atau Rancangan Undang-Undang yang kemudian dari rancangan tersebut akan disepakati menjadi undang-undang yang kemudian oleh pemerintah ditetapkan menjadi suatu aturan yang harus ditaati oleh masyarakat.

#### D. Lembaga Penerap Sanksi

Supremasi hukum harus ditegakkan di negeri ini. Semua kalangan harus ikut serta dalam penegakan supremasi hukum. Di dalam pelaksanaannya hukum tidak terlepas dari adanya pelanggaran-pelanggaran. Baik yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga penegak hukum, maupun dari kalangan masyarakat. Setiap pelanggaran yang terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran akan pentingnya supremasi hukum, konsekwensi yang diterima yaitu sanksi yang akan



diterapkan oleh lembaga penerap sanksi dibawah naungan Kementerian Hukum Dan HAM.

Pemberian sanksi ditujukan agar para pelanggar sadar akan kesalahan yang diperbuat dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Sanksi bisa bermacam-macam, dalam hukum pidana sanksi bisa berupa penjara, kurungan, maupun denda. Sanksi tersebut akan dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan. Dalam hukum perdata sanksi biasanya berupa ganti rugi yang akan dikenakan terhadap yang kalah dalam perkara perdata tersebut. Sedangkan dalam hukum administrasi negara sanksi biasanya berupa sanksi administrasi oleh lembaga pemerintah, ada juga sanksi yang berupa dikucilkan dari masyarakat, biasanya sanksi ini diberikan para pelanggar-pelanggar adat.

#### E. Aparat Penegak Hukum

Untuk memperoleh supremasi hukum yang baik, maka yang paling mendasar yang harus dilakukan adalah perbaikan moralitas para aparat penegak hukum sehingga mereka akan benar-benar memegang komitmennya. Keadilan akan lebih diutamakan dengan harus mengeliminir semua tujuan untuk memperkaya diri. Aparat penegak hukum harus lebih professional dan pandai dalam membaca gejala yang ada di masyarakat yang selalu mendamba keadilan. Mereka bisa saja bertindak atas dasar keadilan meskipun harus menyimpang dari hukum positif yang ada. Kasus mbok Minah yang mengambil buah kakao tidak akan terjadi jika aparat penegak hukum lebih mengedepankan moralitas dan rasa keadilan. Karena bukan berarti menyimpang dari aturan hukum itu salah, bisa juga penafsiran aparat terhadap penerapan hukum yang justru salah.

Tidak sedikit kasus-kasus salah penerapan hukum yang terjadi di Indonesia, seperti kasus Prita, mbok Minah dan banyak lagi yang tidak terekspose oleh media yang justru dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bisa jadi justru akan membuahkan kriminalitas di negeri ini. Bisa jadi tindakan penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan, dan keputusan oleh aparat penegak hukum adalah kesalahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Para aparat penegak hukum di Indonesia terkesan hanyalah menjadikan perangkat hukum ibarat sebuah jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat bagi rakyat kecil, orang-orang bodoh, dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan pada umumnya dilakukan oleh kelas bawah. Namun, kalau berhadapan dengan pejabat tinggi negara atau penjahat kelas atas, hukum tidaklah berarti sebagai suatu perangkat menegakkan keadilan serta sangat jelas tidak adanya komitmen moralitas untuk itu. Perbaikan moralitas dan komitmen para penegak hukum haruslah diutamakan agar hukum di negara Indonesia tidak carut marut.

#### 1. Polisi

Mencermati Pembukaan UUD 45 yang menyebutkan "Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia" maka untuk mewujudkan itu semua diperlukan seperangkat aturan dan pelaksanaannya agar tujuan dapat dicapai secara maksimal, realisasi yang paling utama dari tujuan yang dimaksud yaitu keamanan, ketertiban, penegakan hukum, serta pelayanan terhadap masyarakat.



Polisi adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mewujudkannya.

Menurut Sadjijono, istilah "Polisi" dan "Kepolisian" mengandung pengertian yang berbeda. Istilah "Polisi" adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedang istilah "Kepolisian" adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) menyebutkan "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di antara pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum, pekerjaan polisi adalah yang paling menarik. Hal tersebut menjadi menarik, karena di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia dalam mengambil keputusan. Polisi dituntut harus mampu mengungkap dan menyelesaikan persoalan secepat mungkin. Target pengambilan putusan yang harus serba cepat inilah yang sering menjadikan polisi tidak memperhatikan keadilan yang sesungguhnya, bahkan jalan kekerasan dan intimidasi akan ditempuh untuk memenuhi target tersebut. Maka tidak jarang polisi salah dalam menetapkan seseorang untuk memenuhi target tersebut, dan

ini akan berakibat fatal, karena dampaknya masyarakat akan perlahan meragukan kredibilitas kepolisian.

Sebagai suatu profesi, Polisi yang harus mendisiplinkan masyarakat itu mengembangkan suatu kultur profesi dan organisasi sendiri. Kultur yang demikian itu, terbentuk antara lain karena pekerjaannya yang banyak dihadapkan kepada resiko bahaya, bahkan sampai kepada ancaman terhadap nyawanya sendiri. Oleh karena itu, mereka membentuk suatu solidaritas kelompok yang kuat untuk menghadapi ancaman bahaya-bahaya yang demikian itu.

Keadaan ini sekaligus menciptakan kepribadian polisi yang memandang masyarakat itu dengan dasar kecurigaan. Masyarakat dilihatnya dalam kategori stereotips, yaitu kedalam kelompok jahat dan tidak jahat. Dengan demikian, sebetulnya polisi telah menciptakan isolasi sosialnya sendiri. Bagaimanapun juga itu semua adalah kelanjutan saja dari sifat pekerjaan yang diamanatkan oleh rakyat kepadanya. Akibat dari rasa kecurigaan polisi terhadap masyarakat membuat jarak antara polisi dengan masyarakat itu sendiri. Sehingga kerap kali faktor kekerasan didahulukan daripada pendekatan yang bersifat persuasif terhadap masyarakat. Pada akhirnya cap buruk pada aparat kepolisian akan melekat.

Pekerjaan polisi sedikit-tidaknya di Negara Amerika, mempunyai cap yang kurang baik, suatu "tainted occupation" Stigma tersebut diterima polisi di antaranya karena polisi merupakan tokoh yang ambivalen, yang ditakuti juga sekaligus dikagumi. Polisi yang bertugas untuk melawan kejahatan tentu dilengkapi dengan kekuasaan untuk menggunakan kekerasan. Justru kekerasan tersebut yang nantinya turut menciptakan stigma tersebut. Karena



kemampuan dan kewenangannya menggunakan kekerasan, maka polisi tampil sebagai tokoh misterius. Kepolisian kita sering dikenal sebagai "Bhayangkara" yang dalam bahasa Sansekerta artinya menakutkan.

Kewenangan menggunakan kekerasan dijadikan sebagai budaya polisi dalam menangani setiap permasalahan di dalam masyarakat. Tak jarang masyarakat menjadi korban dari aplikasi budaya tersebut. Contoh, seorang tahanan yang diduga sebagai pelaku curanmor, dipukul dan digenjol badannya hanya untuk mendapatkan pernyataan dialah sebagai pelakunya. Ada lagi kasus salah tangkap yang dialami sejarawan UI yang bernama JJ Rizal yang dilakukan oleh Polsek Depok, beliau sempat mengalami beberapa kali tindakan kekerasan yang mengakibatkan memar-memar disekitar wajahnya. Tindakan arogansi polisi masih banyak lagi yang tidak terekam oleh publik. Sangat disayangkan polisi yang seharusnya bertugas sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, tetapi malah menjadi perwujudan monster yang sangat menakutkan. Sehingga acapkali masyarakat sangat enggan jika berinteraksi dengan polisi. Baginya lebih baik tidak berkawan dengan polisi. Sebaiknya profesionalisme dan pendekatan terhadap masyarakat lebih diutamakan jika polisi tidak ingin ditinggalkan masyarakat. Karena dengan dilakukannya pendekatan tersebut, masyarakat tidak usah diminta, mereka akan dengan sukarela membantu tugas-tugas polisi dalam kamtibmas.

John Sullivan, seorang pakar hukum dan kriminolog AS mengemukakan teori Well MES, mengenai syarat untuk memperoleh aparat penegak hukum yang baik, dan kiranya dapat dijadikan acuan untuk menganalisa sudahkah polisi kita profesional?

Pertama, *Well Motivation* haruslah dilihat motivasi seseorang untuk mengabdikan diri sebagai polisi. Sejak awal seorang calon polisi harus mengetahui dan bermotivasi bahwa menjadi polisi adalah tantangan sekaligus tugas yang berat. Sebagai polisi seseorang dituntut kesiapan mental dan fisik. Ia harus rela melayani masyarakat.

Kedua, *Well Education*, seharusnya polisi memenuhi standar pendidikan tertentu. Polisi dituntut mampu memahami modus operandi kejahatan dan mengetahui perangkat hukum yang hendak diancamkan kepada penjahat. Untuk memenuhi itu pendidikan polisi mutlak harus bagus. Sampai saat ini masih banyak polisi lulusan SMA atau SMP, bahkan masih ada beberapa yang lulusan SD. Kekurangan ini dapat ditutup dengan pemberian diklat lanjutan, seperti seminar, *up grading* dan *short course*, agar pengetahuan polisi semakin bertambah

Ketiga, *Well Salary* harus jadi perhatian, gaji anggota Polri memang kecil dibanding penegak hukum lain. Kecilnya gaji yang diberikan negara kepada anggota Polri masih diperparah lagi oleh minimnya dana dan sarana operasional. Akibatnya, polisi seringkali tekor dalam menjalankan tugas kepolisian.

Mengingat Polisi adalah aparaturnya negara yang salah satu fungsinya adalah sebagai aparat penegak hukum, maka sudah semestinya profesionalisme harus dikedepankan. Seorang Polisi yang profesionalisme di dalam menjalankan tugasnya, akan memberikan hasil yang tentunya membanggakan tidak hanya pada korpnnya saja, tetapi tentunya juga menjadi sandaran masyarakat di dalam persoalan hukum. Untuk mendapatkan seorang polisi yang profesional, semenjak dari awal perekrutan harus benar-benar melalui penyeleksian yang profesional pula, sehingga



akan menghasilkan aparat penegak hukum yang selalu mengedepankan rasa keadilan dalam menyelesaikan segala persoalan. Di samping itu faktor pendidikan harus diperhatikan, karena semakin tinggi pendidikan seseorang akan semakin memahami hukum.

## 2. Jaksa

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang". Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan putusan hakim. Selanjutnya menurut Pasal 1 Ayat (3) penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Adapun tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;

- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
    - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
    - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
    - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.
  - 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
  - 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
    - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
    - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
    - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
    - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
    - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
    - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dalam melaksanakan wewenang yang dibebankan kepadanya, jaksa penuntut umum harus mengedepankan rasa keadilan dibanding kedekatan/kekerabatan. Banyaknya



makelar kasus dan mafia peradilan yang melibatkan para penegak hukum terutama dikalangan jaksa penuntut umum, seperti keterlibatan dalam dana BLBI yang melibatkan jaksa Oerip, dan kasus yang masih hangat yaitu kasus Anggodo yang melibatkan wakil jaksa agung Aritonga dan mantan Jamintel Wisnu Soebrata. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak jaksa penuntut umum yang tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Jaksa harus jeli dan teliti ketika menerima berkas perkara. Berkas harus diperiksa secara profesional sehingga tidak ada kesalahan dalam penuntutan terutama tidak menerima pesanan perkara dari pihak lain. Ketika jaksa tidak mengedepankan prinsip keadilan, maka kedholiman akan menguasai dalam penegakan hukum. Dan cita-cita hukum yang adil hanya merupan label saja.

Lembaga kejaksaan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sudah seharusnya bersikap independen. Penuntut umum seharusnya bertujuan hanya ingin menegakkan keadilan dan kebenaran demi tegaknya supremasi hukum, tidak harus memandang siapa yang dituntut dan siapa yang menuntut. Dengan begitu, tidak akan mungkin pihak penuntut umum membuat dakwaan yang kurang mendasar serta akan berani menolak hasil penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian yang dinilai merugikan pihak lain yang semestinya tidak dirugikan. Dengan selalu mengedepankan rasa keadilan, jaksa tidak akan sembarangan dalam melakukan penuntutan, sehingga tidak ada lagi korban-korban kesalahan dan kesengajaan dalam tuntutan.

### 3. Hakim

Dalam mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, nyaman, dan adil, maka dibutuhkan aturan hukum dan para pembuat serta penegak hukum. Hakim adalah merupakan salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai peranan yang sangat fundamental dalam memutus perkara yang disengketakan oleh pihak yang bersengketa. Menurut Pasal 5 Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan "Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan tersebut". Dalam menjalankan tugasnya dan demi tercapainya putusan yang adil dan tidak memihak maka seorang hakim haruslah independen. Hakim tidak boleh pandang bulu dalam memutuskan perkara. Mereka harus mengedepankan prinsip equality before the law (kedudukan yang sama dihadapan hukum). Seorang hakim wajib mempunyai moralitas yang tinggi, wajar jika dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman menyebutkan sifat-sifat yang harus dimiliki seorang hakim yaitu:

- a. Integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Profesional
- e. Berpengalaman di bidang hukum.

Seorang hakim tentunya seseorang yang dipercaya mampu mengemban amanat rakyat untuk memutuskan



suatu hal berdasarkan rasa keadilan. Hakim tidak boleh menutup sebelah mata atas perkara yang ditanganinya. Dia harus benar-benar mengedepankan rasa keadilan di atas segalanya di bandingkan dengan rasa kedekatan atau kekerabatan. Jika seorang hakim lebih mengedepankan rasa kedekatan dan kekerabatan atau rasa sungkan terhadap seseorang atau kelompok, sudah pasti hukum tidak kan berjalan dengan adil. Hukum hanya akan dijadikan ajang penyelamatan kepentingan pribadi. Maka untuk memperoleh keputusan hukum yang mengedepankan rasa keadilan dibutuhkan hakim-hakim yang mempunyai tindakan yang tidak tercela.

Kejujuran merupakan sifat mutlak yang harus dimiliki seorang hakim, karena dengan kejujuran seorang hakim akan melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, sehingga dengan kejujuran itu pula seorang hakim tidak akan melakukan perbuatan yang mengkhianati keadilan masyarakat. Sebagaimana firman Allah kitab Suci al-Qur'an yang artinya:

*"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat".*

Begitu juga halnya perintah untuk memutuskan suatu perkara secara adil, bijaksana, tegas (berani), jujur pada dasarnya tidak hanya diwajibkan oleh hukum positif saja, tetapi juga diwajibkan oleh Islam. Dalil yang menerangkan hal itu termaktub di dalam kitab suci al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 58, Al-Maidah ayat 42 dan surat An-Nahl ayat 125, yang artinya:

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat".*

*"Dan jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil"*

*"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik"*

Hakim yang adil sangatlah dibutuhkan dalam penegakan hukum di negeri ini. Dengan rasa keadilan yang dimiliki sudah barang tentu cita-cita negara hukum yang didamba akan tercapai, begitu juga halnya masyarakat merasa terlindungi haknya dari manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Selain itu seorang hakim wajib professional dan berpengalaman di bidang hukum, dan ini mutlak harus dimiliki seorang hakim. Hakim yang tidak menguasai hukum sebagaimana mestinya, maka keputusan yang dihasilkan akan membuahakan kemudharatan bagi masyarakat. Begitu juga keadilan yang di damba dan seharusnya dirasakan oleh masyarakat sudah pasti tidak akan terealisasi. Carut marut hukum akan terjadi ketika hakim tidak professional dan ahli di bidangnya. Sebagaimana termaktub dalam Surat An-Nahl aya 43, yang artinya:

*"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui".*



Begitu juga dalam hadits riwayat Imam Bukhori menyebutkan "ketika hukum disandarkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran". Ini sebagai bukti bahwa hukum harus benar-benar dijalankan oleh orang yang profesional dan ahli di bidang hukum, karena hukum merupakan payung keadilan bagi mereka yang mendambakan keadilan. Hukum bukanlah hanya sekedar tulisan yang enak untuk di baca, tetapi merupakan aturan yang bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban semua orang. Maka untuk mendapatkan keadilan hukum sudah semestinya hukum harus dijalankan oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Kelima sifat tersebut mutlak harus dimiliki oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga setiap perkara yang diputuskan haruslah adil, bijaksana, tegas (berani), dan jujur. Karena hakim akan mempertanggungjawabkan segala keputusan yang dibuatnya tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada sang pencipta (Allah SWT).

#### 4. Advokat

Pengacara atau advokat adalah kata benda, subyek. Dalam praktek dikenal juga dengan istilah Konsultan Hukum. Dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat (advis) dan pembelaan ("mewakili") bagi orang lain yang berhubungan dengan penyelesaian suatu kasus hukum. Istilah pengacara berkonotasi jasa profesi hukum yang berperan dalam suatu sengketa yang dapat diselesaikan di luar atau di dalam sidang pengadilan. Pengacara wajib membela kliennya yang tersangkut persoalan hukum, artinya dia harus benar-benar mampu mengawal hukum agar tidak salah dalam penerapannya.

Istilah Advokat dan pengacara sebagai profesi hukum. Dalam sejarahnya telah dikenal istilah advokat dan procureur di Negeri Belanda, dan istilah barrister and solicitor di Inggris, istilah *advocate* di Singapura, istilah *lawyer* di Amerika yang sekarang menjadi istilah yang digunakan secara internasional. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Seorang pengacara harus mempunyai kebebasan dalam menjalankan profesinya sebagai perantara (agen) dari masyarakat, dan itu merupakan syarat yang mutlak yang dimilikinya tanpa harus terbelenggu oleh hirarki kekuasaan. Dia juga harus mempunyai sifat mengabdikan kepada kepentingan umum tanpa harus mengharapkan apresiasi dari masyarakat. Kebebasan yang dimilikinya bukanlah kebebasan absolut tanpa batas, tetapi pengacara juga harus berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Seorang pengacara berkewajiban moral untuk selalu mengedepankan rasa keadilan. Tetapi masih banyak pengacara yang hanya memikirkan keuntungan pribadi, ironinya lagi tidak sedikit dari mereka berprofesi sebagai mafia hukum dan peradilan. Baginya hukum dianggap sebagai komoditi dagangan yang bisa diperjual belikan melalui proses tawar menawar. Jika hal ini terjadi secara terus menerus, maka hukum hanyalah sebuah piala bergilir yang bisa diperebutkan bagi mereka-mereka yang mampu.

Agama Islam memang tidak secara jelas dan tegas menerangkan eksistensi serta peranan pengacara (pembela) dalam menyelesaikan persoalan hukum. Islam hanya



menerangkan bahwa orang yang diduga atau terbukti melakukan pelanggaran hukum diperbolehkan mengeluarkan pendapat untuk membela dirinya, baik secara pribadi maupun dengan meminta bantuan orang lain yang menyaksikan dirinya ketika dia dituduh melakukan pelanggaran hukum untuk memberikan kesaksian. Upaya untuk mempertahankan diri pada dasarnya dibenarkan oleh Islam, hanya saja jalan itu tidak boleh ditempuh dengan segala cara yang tidak dibenarkan seperti harus berbohong, karena dalam pandangan Islam sikap bohong termasuk perbuatan tercela yang hanya akan menyeret manusia kepada kemungkaran dan kejahatan, yang membawa penyesalan hidup. Kebohongan merupakan sifat yang cenderung menghalalkan segala cara serta cenderung merugikan orang lain.

#### F. Lembaga Pemegang Peran

##### 1. Manusia

Manusia atau orang dapat diartikan berbeda-beda menurut biologis, rohani, dan istilah kebudayaan, atau secara campuran. Secara biologis, manusia diklasifikasikan sebagai *Homo sapiens* (Bahasa Latin untuk manusia), sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Dalam hal kerohanian, mereka dijelaskan menggunakan konsep jiwa yang bervariasi di mana dalam agama, dimengerti dalam hubungannya dengan kekuatan ketuhanan atau makhluk hidup; dalam mitos, mereka juga seringkali dibandingkan dengan ras lain. Dalam antropologi kebudayaan, mereka dijelaskan berdasarkan penggunaan bahasanya, organisasi mereka dalam masyarakat majemuk serta perkembangan teknologinya, dan terutama

berdasarkan kemampuannya untuk membentuk kelompok dan lembaga untuk dukungan satu sama lain serta pertolongan. Penggolongan manusia yang paling utama adalah berdasarkan jenis kelaminnya. Secara alamiah, jenis kelamin seorang anak yang baru lahir entah laki-laki atau perempuan.

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Karena manusia memiliki akal yang dapat dipergunakan untuk berfikir. Manusia memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi agar tidak dilanggar. Hak-hak tersebut merupakan bawaan dari lahir dan asasi (dasar) bagi manusia untuk hidup di dunia. Mendasar pada hal tersebut maka pada tahun 1948 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendeklarasikan hak asasi manusia (*Universal Declaration Of Human Right*), yang menjelaskan tentang perlindungan pemerintah dalam melindungi hak-hak asasi manusia yang fundamental.

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dipunyai oleh semua orang sesuai dengan kondisi yang manusiawi. Hak asasi manusia ini selalu dipandang sebagai sesuatu yang mendasar/fundamental dan penting. Oleh karena itu banyak pendapat yang mengatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah kekuasaan dan keamanan yang dimiliki oleh setiap individu. Manusia memegang peranan penting di dalam dinamika berlakunya hukum, karena manusia merupakan subyek hukum, baik hukum positif, hukum Islam, maupun hukum adat dibuat adalah untuk mengatur pergaulan hidup manusia di bumi. Manusia tanpa hukum akan tercipta keadaan yang kacau balau, begitu juga hukum tanpa manusia akan mandul. Di sinilah peran pentingnya manusia dalam berlakunya hukum. Keduanya



saling timbal balik dalam memegang perannya. Karena salah satu tidak ada, makan akan terjadi ketimpangan.

## 2. Masyarakat

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, *musyarak*. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan. Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan cara utamanya dalam bermata pencaharian. Pakar ilmu sosial mengidentifikasikan ada: masyarakat pemburu, masyarakat pastoral nomadis, masyarakat bercocok tanam, dan masyarakat agrikultural intensif, yang juga disebut masyarakat peradaban.

Sebagian pakar menganggap masyarakat industri dan pasca-industri sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari masyarakat agrikultural tradisional. Masyarakat dapat pula diorganisasikan berdasarkan struktur politiknya:

berdasarkan urutan kompleksitas dan besar, terdapat masyarakat band, suku, *chiefdom*, dan masyarakat negara. Kata *society* berasal dari bahasa latin, *societas*, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. *Societas* diturunkan dari kata *socius* yang berarti teman, sehingga arti *society* berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit, kata *society* mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama.

Didalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari maupun yang telah disadari setiap manusia yang hidup dalam suatu tatanan masyarakat tidak lepas dari suatu aturan baik yang bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis. Untuk itu supaya aturan tersebut benar-benar dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan taat dan tertib maka diperlukan suatu peran dan sumbangsih dari seluruh lapisan masyarakat pada umumnya dan para pejabat yang membuatnya serta pejabat yang bertugas sebagai pengawal aturan pada khususnya sehingga peraturan benar-benar dapat dijalankan sesuai dengan koridor hukum yang ada tanpa harus mengorbankan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain.

Setiap manusia pada dasarnya ingin hidup damai. Dengan demikian agar tercipta masyarakat adil dan damai maka kita butuhkan kinerja para pejabat hukum untuk senantiasa menjunjung tinggi peran dan fungsi hukum didalam menegakkan suatu keadilan agar senantiasa terhindar terhadap imaj masyarakat yang selama ini krisis akan kepercayaan terhadap perlakuan hukum kepada petugas hukum itu sendiri. Maka agar hukum berjalan efektif, peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap berjalannya hukum sangat diperlukan, agar para penegak hukum tidak



seenaknya melakukan penyelewengan hukum. Begitu juga masyarakat jangan memberikan kesempatan atau penawaran dalam penyelewengan itu sendiri, sehingga penegakan hukum akan benar-benar berjalan efektif dan selaras nafas keadilan masyarakat.

### 3. Produsen/Badan Hukum

Di dalam ilmu hukum ada yang namanya subyek hukum atau subyek van een recht, yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum. Badan hukum sendiri adalah perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subyek hukum, misalnya dapat memiliki kekayaan, mengadakan perjanjian dan sebagainya. Badan hukum mempunyai peranan penting dalam mengawal proses penegakan hukum. Karena kewenangan yang dimiliki sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh subyek hukum lainnya. Sebagai subyek hukum, badan hukum erat hubungannya dengan hukum. Seperti halnya orang atau manusia, badan hukum pun sangat dibutuhkan dalam memperoleh penegakan hukum yang baik.

### 4. Pemerintah

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah juga mempunyai daya paksa terhadap masyarakat untuk melaksanakan semua aturan hukum dengan memberikan sanksi bagi yang menaatinya. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-

macam jenis pemerintahan di dunia. Sebagai contoh: Republik, Monarki/Kerajaan, Persemakmuran (*Commonwealth*). Dari bentuk-bentuk utama tersebut, terdapat beragam cabang, seperti: Monarki Konstitusional, Demokrasi, dan Monarki Absolut/Mutlak. Fungsi dari pemerintahan erat hubungannya dengan fungsi perundang-undangan dan peradilan. Pemerintah juga dapat diartikan segala kegiatan penguasa yang tidak dapat disebutkan sebagai suatu kegiatan perundang-undangan atau peradilan. Pemerintah memang mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk membuat aturan hukum atau perundang-undangan, tetapi, bukan berarti setiap segala bentuk tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan aturan hukum yang harus ditaati.

Tindakan atau aktifitas Pemerintahan dalam negara hukum dalam dua macam tindakan, tindakan bisa (*feitelijkehandelingen*) dan tindakan hukum (*rechtshandelingen*). Dalam kajian hukum, yang terpenting untuk dikemukakan adalah tindakan dalam kategori kedua, *rechtshandelingen*. Tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan. Tindakan pemerintahan memiliki beberapa unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat Pemerintah dalam kedudukannya sebagai Penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (*bestuursorganen*) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri;
- b. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan



- c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi

Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum, karena dalam negara negara terdapat prinsip *wetmatigheid van bestuur* atau asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya.

Asas legalitas menurut Sjachran Basah<sup>45</sup>, berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif. Meskipun demikian, tidak selalu setiap tindakan pemerintahan tersedia peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dapat terjadi, dalam kondisi tertentu terutama ketika pemerintah harus bertindak cepat untuk menyelesaikan persoalan konkret dalam masyarakat, peraturan perundang-undangannya belum tersedia. Dalam kondisi seperti ini, kepada pemerintah diberikan kebebasan bertindak (*discretionary power*) yaitu melalui *freies ermesen*, yang diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya

---

<sup>45</sup>Basah, Sjachran, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 85

pada undang-undang. *Freies ermesen* merupakan konsekuensi logis dari konsepsi *welfare state*, akan tetapi dalam kerangka negara hukum, *freies ermesen* ini tidak dapat digunakan tanpa batas. Atas dasar itu, Sjachran Basah<sup>46</sup> mengemukakan unsur-unsur *freies ermesen* dalam suatu negara hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik;
- b. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara;
- c. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum;
- d. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri;
- e. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba

Sikap tindak itu dapat dipertanggung jawab baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum. Sumber-sumber Kewenangan Tindakan Pemerintahan. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah bersumber pada tiga hal, atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.

Seperti disebutkan di atas bahwa setiap tindakan pemerintah dalam negara hukum harus didasarkan pada asas legalitas. Hal ini berarti ketika pemerintah akan melakukan tindakan, terlebih dahulu mencari apakah legalitas tindakan tersebut ditemukan dalam undang-undang. Jika tidak terdapat dalam UU, pemerintah mencari dalam berbagai

---

<sup>46</sup>*Ibid*



peraturan perundang-undangan terkait. Ketika pemerintah tidak menemukan dasar legalitas dari tindakan yang akan diambil, sementara pemerintah harus segera mengambil tindakan, maka pemerintah menggunakan kewenangan bebas yaitu dengan menggunakan *freies ermesen*. Meskipun penggunaan *freies ermesen* dibenarkan, akan tetapi harus dalam batas-batas tertentu.

Dampak lain dari penyelenggaraan pemerintahan seperti ini adalah tidak terselenggaranya pembangunan dengan baik dan tidak terlaksananya pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana mestinya. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan adalah antara lain dengan mengefektifkan pengawasan baik melalui pengawasan lembaga peradilan, pengawasan dari masyarakat, maupun pengawasan melalui lembaga ombudsmen. Di samping itu juga dengan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Upaya pemerintah dalam penegakan hukum sangatlah penting. Ada tiga alasan betapa pentingnya peran kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum di negeri ini yaitu: Pertama, pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mengelola wilayah dan rakyatnya untuk mencapai tujuan dalam bernegara.

Bagi Indonesia sendiri, pernyataan tujuan negara sudah dinyatakan dengan tegas oleh para pendiri negara dalam pembukaan UUD 1945, di antaranya melindungi bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Bukan hanya pernyataan tujuan bernegara Indonesia, namun secara mendasar pun gagasan awal lahirnya konsep negara, pemerintah wajib menjamin hak asasi warga negaranya.

Memang, dalam teori pemisahan kekuasaan cabang kekuasaan negara mengenai penegakan hukum dipisahkan dalam lembaga yudikatif. Namun lembaga eksekutif tetap mempunyai tanggung jawab karena adanya irisan kewenangan dengan yudikatif serta legislatif dalam konteks *checks and balance*, dan kebutuhan pelaksanaan aturan hukum dalam pelaksanaan wewenang pemerintahan sehari-hari. Kedua, tidak hanya tanggung jawab, pemerintah pun mempunyai kepentingan langsung untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam menjalankan pemerintahannya, birokrasi dan pelayanan masyarakat yang berjalan dengan baik, serta keamanan masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang baik, akan muncul pula stabilitas yang akan berdampak pada sektor politik dan ekonomi.

Menjadi sebuah penyederhanaan yang berlebihan bila dikatakan penegakan hukum hanyalah tanggung jawab dan kepentingan lembaga yudikatif. Ketiga, sama sekali tidak bisa dilupakan adanya dua institusi penegakan hukum lainnya yang berada dibawah lembaga eksekutif, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Penegakan hukum bukanlah wewenang Mahkamah Agung semata. Dalam konteks keamanan dan ketertiban umum, kejaksaan dan kepolisian justru menjadi ujung tombak penegakan hukum yang penting karena ia langsung berhubungan dengan masyarakat. Sementara itu, dalam konteks legal formal, hingga saat ini pemerintah masih mempunyai suara yang signifikan dalam penegakan hukum.



## 8 Pranata Kesenian

### 8.1 Pengertian Kesenian dan Fungsi Pranata Kesenian

Secara etimologi, istilah seni menurut I.G. Bg. Sugriwa. Seni berasal dari kata bahasa Sanskerta yang kurang lebih berarti; penyembahan, pelayanan, pemberian. Menurut Padmapuspitha seni dimungkinkan dari bahasa Belanda yaitu *Genie* diadopsi dari bahasa Latin yang artinya *genius*. Menurut *Ensiklopedia Britanica*, seni dalam bahasa Inggris disebut *Art*, yaitu kata yang diadopsi dari bahasa Yunani (Sudarmadji. 1979:5).

Kesenian merupakan produk budaya suatu bangsa, semakin tinggi nilai kesenian satu bangsa maka semakin tinggi nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Sebagai salah satu bagian yang penting dari kebudayaan, kesenian tidak pernah lepas dari masyarakat, sebab kesenian juga merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan segala bentuk ungkapan cipta, rasa dan karsa manusia.

Uraian di atas jelas bahwa seni sangat erat kaitannya dengan kehidupan sosial. Baik itu berupa karya seni, benda seni, pencipta seni, penikmat seni, kritik seni, ilmu seni, lembaga seni dan publikasi seni, dan fungsi pranata kesenian adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia akan keindahan, contohnya seperti seni suara, seni lukis, seni patung, seni drama, dan sebagainya. Semuanya selalu berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Tanpa ada masyarakat menilai dan menikmati seni, seni tidak mempunyai arti apa-apa dalam kehidupan.

## Komponen-Komponen Seni

### A. Karya Seni

Secara bahasa karya adalah pekerjaan, hasil perbuatan, ciptaan. Karya seni adalah suatu hasil ciptaan atau hasil perbuatan manusia yang berupa bentuk, suara, dan gerak yang mempunyai nilai estetika di dalamnya. Karya seni yang diciptakan oleh manusia tidak pernah terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri. Baik karya seni pertunjukan maupun karya seni rupa.

Substansi sebuah karya seni kemudian ditentukan banyak hal. Sama halnya, praktek kesenian dapat sebagai suatu yang terkait hal-hal secara spesifik. Kemudian, karya seni berguna dalam membaca semua praktek yang ada berkaitan dengan hubungan pelakunya, aspek sosial, dan seni itu sendiri. Hal tersebut membantu, hingga kita bisa menilai seni melalui praktek seni dan produk yang dihasilkan. Dan Saat ini kecenderungan apapun bisa dilakukan, baik dalam bentuk tradisi/konvensi atau pun diluar konvensi.<sup>47</sup>

Seni tidak lagi mengenai sesuatu yang melulu berkaitan dengan keindahan. Dalam sebuah karya seni kita bisa membicarakan perkembangan teknologi, pola hidup, kekuasaan, taraf pendidikan, hingga dunia seni itu sendiri. Kaitan seni dan budaya, dengan sendirinya menjadi kaitan seni dengan hidup keseharian<sup>48</sup>.

penciptaan suatu karya seni mempunyai konsep yang berbeda. Misalnya karya seni rupa diciptakan dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan.

<sup>47</sup>Dharsono Sony Kartika, 2004 " *Seni Rupa Modern*" rekayasa sains: Bandung, 2004, hlm.61

<sup>48</sup>*Ibid*



Kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika. Sedangkan karya seni pertunjukan diciptakan dengan konsep gerak dan pendengaran yang ditontonkan kepada orang banyak.

Benda seni secara langsung berkisar kepada karya seni itu sendiri. Apakah itu medium atau material karya seni yang menghasilkan suatu bentuk seni yang indah. Seni wujud melalui pendengaran untuk audio, media untuk penglihatan untuk visual (tampak). Media ini memberi peranan kepada seni misalnya seni halus lebih kepada media visual, seni musik lebih kepada media audio<sup>49</sup>.

#### B. Pencipta Seni (Seniman)

Persoalan pengkarya seni adalah persoalan asas dalam konteks kreativitas dan ekspresi seniman yang sering diperbincangkan ialah soal gaya karyanya pribadinya menjadi persoalan dalam penghasilan karyanya. Disamping itu perbincangan juga menyentuh mengenai zaman dan bermulanya karya seni yang dihasilkan<sup>50</sup>.

Ada dua pengertian arti seniman; seniman diartikan sebagai nama profesi seseorang dalam menciptakan atau menyusun karya seni. Seniman dapat juga diartikan sebagai manusia yang mengalami proses kreativitas atau proses imajinasi, yaitu proses interaksi antara persepsi memori dan persepsi luar.

<sup>49</sup>Iryan Syair, 2011 "Tabloit Pituluik" Pers ISI Padangpanjang: Padangpanjang, hlm. 8

<sup>50</sup>*Ibid*

Sehingga dalam hal ini, seniman disamping sebagai pencipta/penyusun bentuk karya seni, juga sekaligus sebagai penghayatan. Penghayatan dalam menanggapi sebuah karya seni akan terlibat proses kreatif/proses imajinasi. Itulah mengapa penghayatan juga dapat dikatakan sebagai 'seniman' penghayatan. Pada seni pertunjukan/teater ada beberapa istilah dan sebutan seniman, yaitu seniman penyusun/penata, seniman pemeran/penyaji. Dikatakan seniman penyaji/pemeran, karena dalam melaksanakan sajian atau membawakan peran, seniman dituntut keberadaannya dan tidak sekedar membawakan apa yang sudah tertera pada skenario, tetapi dalam dirinya terjadi proses kreatif, yang selanjutnya akan mencuat ke permukaan sajiannya. Itulah sebabnya penyaji karya seni pada sebuah pentas juga disebut seniman penyaji.

#### C. Ilmu Seni

Ilmu Seni merupakan pengetahuan tentang seni yang berupa teori-teori seni. Ilmu seni berbeda dengan seni. Seni berbicara tentang penghayatan, sedangkan ilmu tentang pemahaman. Seni untuk dinikmati, sementara ilmu seni untuk memahami. Orang dapat ahli dalam menikmati seni, dan mampu menunjukkan karya seni yang baik, tetapi kalau ditanya mengapa sebuah karya seni bagus dan yang lain kurang bagus, belum tentu mampu menjawabnya. Padahal, pilihannya terhadap aneka karya seni yang baik selalu tepat.

Ilmu seni pada awalnya dicetuskan di Yunani pada abad ke-8. Namun sebelumnya ilmu seni sudah berkembang di Romawi Kuno pada abad ke-7. Namun teori dari Romawi Kuno tidak kuat, kemudian dikalahkan oleh teori-teori Yunani. Sehingga ilmu-ilmu seni yang berkembang di dunia termasuk di Indonesia pada saat sekarang ini adalah ilmu seni



yang berasal dari Yunani. Ilmu seni berawal dari filsafat seni atau sering disebut Filsafat Estetika yang dipelopori oleh seorang filosof Yunani yaitu Aris Toteles dan Plato. Dari filsafat seni itulah berkembang teori-teori ilmu seni lainnya.

Seni juga dapat menjadi objek ilmu, Seni dapat ditinjau dari segi estetikanya, yang berarti menjadi objek ilmu sekaligus filsafat. Seni juga dapat dianalisis berdasarkan bentuk formalnya. Seni dapat pula menjadi objek sejarah. Ilmu-ilmu seni yang berkembang seperti sosiologi seni, antropologi seni, psikologi seni, perbandingan seni, kritik seni. Belum lagi aspek ekonomi seni, soal manajemen seni, pemasaran seni, konservasi seni, sistem sponsor seni.

Ilmu-ilmu seni tersebut masih harus didistribusikan lagi menjadi beberapa bidang seni khusus. Ada ilmu-ilmu seni rupa, seni teater, seni tari, seni sastra, seni musik, seni arsitektur, dan lain-lain. Tiap-tiap bidang seni tersebut memiliki ilmunya masing-masing. Selanjutnya, melihat kenyataan betapa kayanya bidang ilmu-ilmu seni itu, tiba-tiba saja kita menjadi begitu miskin dalam ilmu seni. Berapa buku telaah ilmu yang pernah ditulis tentang seni rupa kita? Sudah adakah buku mengenai ilmu seni patung, ilmu seni teater, ilmu seni film? Sudah adakah buku sejarah seni musik kita? Sudah adakah buku sosiologi sastra Indonesia? Sudah adakah buku antropologi seni teater Indonesia?

Dalam pengalaman hidup kesenian di Indonesia, masih banyak pencinta seni yang kurang memahami ilmu seni daripada pencinta seni yang memahami seni lengkap dengan ilmunya. Sudah menjadi tugas pengulas atau kritikus seni untuk bertanggung jawab atas penghayatan dan penikmatan serta pemahaman seni. Ini semua dapat dikembalikan kepada sejarah penghayatan seni di Indonesia.

Orang Indonesia lebih dahulu menikmati karya seni tingkat dunia daripada mempelajari ilmu seni dunia. Kita lebih dahulu menjadi penikmat seni dan kemudian berkembang menjadi seniman, bukan menjadi ahli seni ilmiah. Dan seniman Indonesia sudah barang tentu mempelajari pula aneka ilmu seni untuk menunjang penciptaan karya.

Di Perguruan Tinggi seni seharusnya dikembangkan ilmu-ilmu seni. Ilmuwan seni dapat kita harapkan muncul dari sana, di samping juga seniman seni. Disiplin ilmiah seni dapat diberikan di samping juga disiplin kreativitas seni. Kalau ini dijalankan, akan dapat dilahirkan ilmuwan seni atau seniman yang memiliki wawasan seni secara ilmiah. Dari sana dapat lahir seniman yang sarjana, tetapi juga sarjana seni. Perguruan tinggi seni adalah tempat mempelajari seni secara ilmiah. Di sana juga terjadi proses pengayaan pengalaman seni. Di samping itu, juga berlangsung proses penciptaan karya seni. Memang belum tentu semua mahasiswa akan menjadi seniman, sebab untuk menjadi seniman tak ada sekolahnya dan resepnya. Seniman itu tumbuh dalam keunikan dan keasliannya sendiri, dan itu tak bisa diajarkan, tetapi harus dicari sendiri oleh sang calon seniman. Kalau dapat diajarkan, yang lahir adalah seniman akademis yang seragam atau sealiran. Dan kesenimanan tak pernah bersifat komunal. Seniman itu individuality, unik, dan otentik.

#### D. Publikasi Dan Pemasaran Seni

Publik seni menyentuh persoalan komunikasi karya seni terhadap masyarakat. Seni itu adalah publik, tanpa orang lain menghayati karya seni maka karya seni itu tidak dapat berdiri sendiri. Maka komunikasi dalam karya seni



membuahkan sebuah karya seni akan berjaya dan menjadi milik masyarakat.

Pemasaran seni adalah suatu proses sosial dalam manajemen seni, di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Publikasi dan pemasaran seni terbagi atas tiga

#### 1. Pameran

Pameran merupakan suatu bentuk dalam usaha jasa pertemuan yang mempertemukan antara produsen dan pembeli namun pengertian pameran lebih jauh adalah suatu kegiatan promosi yang dilakukan oleh suatu produsen, kelompok, organisasi, perkumpulan tertentu dalam bentuk menampilkan display produk kepada calon relasi atau pembeli. Pameran merupakan salah satu publikasi pemasaran seni, terutama pemasaran karya seni rupa dan desain.

#### Jenis-jenis Pameran

##### a. Pameran Tetap (*Permanent Exhibition*)

Pameran yang menyajikan karya-karya koleksi Galeri Nasional Indonesia secara periodik yang ditata berdasarkan konsep kuratorial dan diselenggarakan oleh Galeri Nasional Indonesia. Waktu penyelenggaraan Pameran Tetap berlangsung minimal 1 kali dalam satu tahun.

##### b. Pameran Temporer (*Temporary Exhibition*)

Pameran tunggal atau pameran bersama yang menyajikan karya-karya seni rupa dalam jangka waktu tertentu yang diselenggarakan oleh Galeri Nasional Indonesia atau kerjasama dengan pihak lain. Waktu penyelenggaraan

Pameran Temporer berlangsung minimal selama 10 hari, maksimal berlangsung selama 30 hari.

##### c. Pameran Keliling (*Traveling Exhibition*)

Pameran yang menyajikan karya-karya koleksi Galeri Nasional Indonesia maupun karya di luar koleksi Galeri Nasional Indonesia ke berbagai daerah di Indonesia dan atau di luar negeri yang diselenggarakan oleh Galeri Nasional Indonesia atau kerjasama dengan pihak lain. Waktu penyelenggaraan Pameran Keliling minimal berlangsung selama 10 hari.

#### 2. Pertunjukan

Lembaga pertunjukan seni adalah karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok di tempat dan waktu tertentu. Seni pertunjukan biasanya melibatkan empat unsur: waktu, ruang, tubuh si seniman dan hubungan seniman dengan penonton.

Meskipun pertunjukan bisa juga dikatakan termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan seni *mainstream* seperti teater, tari, musik dan sirkus, tapi biasanya kegiatan-kegiatan seni tersebut pada umumnya lebih dikenal dengan istilah *performing arts* atau seni pertunjukan. Seni *performance* adalah istilah yang biasanya mengacu pada seni konseptual atau *avant garde* yang tumbuh dari seni rupa dan kini mulai beralih ke arah seni kontemporer.

#### 3. Media

Lembaga yang terakhir untuk publikasi dan pemasaran seni adalah media. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran,



perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian orang masyarakat banyak<sup>51</sup>.

Publikasi seni dengan media dapat memasarkan semua cabang seni baik seni pertunjukan maupun seni rupa. Media yang digunakan untuk publikasi seni adalah media cetak seperti koran, majalah, buku, jurnal dan sebagainya. Kemudian dapat juga dengan media elektronik seperti televisi, radio dan media online internet.

#### E. Lembaga Seni

Lembaga merupakan suatu kumpulan dari beberapa orang sehingga membentuk suatu kelompok, mempunyai tujuan yang sama dan mempunyai struktur organisasi yang jelas. Lembaga seni adalah suatu kumpulan beberapa orang sehingga membentuk suatu kelompok seni, mempunyai tujuan yang sama untuk menyalurkan aspirasi dan ide-ide seni. Dari ide tersebut terciptanya suatu karya seni dan mengembangkan seni secara meluas.

Lembaga seni terbagi atas dua yaitu lembaga seni komunitas dan lembaga seni pendidikan.

##### 1. Lembaga komunitas seni

Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Komunitas seni adalah sebuah perkumpulan orang-orang seni, memiliki keterikatan dan memiliki tujuan bersama untuk mengembangkan seni secara bersama.

<sup>51</sup>Sadiman, 2002, diakses  
dari <http://www.scribd.com/doc/.hlm.6>

kesenian di komunitas pada dasarnya memakai sistem otodidak, kesenian berdasarkan pengalaman bukan berdasarkan teori-teori seni. Dalam komunitas yang diutamakan adalah pengalaman dan keterampilan dalam berkesenian. Teori-teori seni tidak terlalu diperlukan selain dari pada teori pokok tentang praktek seni. Akan tetapi pada perkembangannya komunitas seni pada zaman sekarang ini juga menggunakan teori seni. Karena banyak pendiri komunitas seni adalah seniman-seniman akademis.

##### 2. Lembaga pendidikan seni

Seiring perkembangan zaman berawal dari komunitas seni dan semakin banyaknya teori-teori ilmu seni maka di dirikanlah lembaga seni yang bersifat lembaga seni pendidikan. Lembaga seni pendidikan ada setara dengan sekolah menengah dan ada juga setara dengan perguruan tinggi.

Lembaga seni yang setara dengan sekolah menengah di Indonesia seperti SMIK, SSM, SST, SMK, SSRI, dan sekolah seni lainnya. Kemudian lembaga seni yang setara dengan perguruan tinggi berawal dari KOKAR, kemudian berubah menjadi AKSI, STSI, dan ISI. Kemudian ada juga ASRI Bandung sekarang menjadi ITB Bandung. Selain di bidang keguruan ilmu pendidikan di buka juga jurusan seni seperti FKIP seni bahasa dan sastra.

Dalam lembaga pendidikan seni seniman bukan hanya di cetak sebagai seniman yang mampu berkarya dan mempunyai keahlian dalam berkarya. Akan tetapi seniman di tuntut harus mampu menjadi seniman akademis yang menguasai teori-teori seni secara terstruktur. Sehingga seni bukan lagi sebagai hobi, akan tetapi seni dapat menjadi ilmu yang bersifat ilmiah. Seniman selain berkarya harus mampu



meneliti kesenian, menulis buku-buku seni, mengembangkan seni secara keilmuan dan mempertahankan seni secara ilmu pengetahuan.

#### F. Kritik Seni

Kritik seni merupakan kegiatan menanggapi karya seni untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan suatu karya seni. Keterangan mengenai kelebihan dan kekurangan ini dipergunakan dalam berbagai aspek, terutama sebagai bahan untuk menunjukkan kualitas dari sebuah karya. Para ahli seni umumnya beranggapan bahwa kegiatan kritik dimulai dari kebutuhan untuk memahami kemudian beranjak kepada kebutuhan memperoleh kesenangan dari kegiatan memperbincangkan berbagai hal yang berkaitan dengan karya seni tersebut.

Sejalan dengan perkembangan pemikiran dan kebutuhan masyarakat terhadap dunia seni, kegiatan kritik kemudian berkembang memenuhi berbagai fungsi sosial lainnya. Kritik karya seni tidak hanya meningkatkan kualitas pemahaman dan apresiasi terhadap sebuah karya seni, tetapi dipergunakan juga sebagai standar untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil berkarya seni. Tanggapan dan penilaian yang disampaikan oleh seorang kritikus ternama sangat mempengaruhi persepsi penikmat terhadap kualitas sebuah karya seni bahkan dapat mempengaruhi penilaian ekonomis (*price*) dari karya seni tersebut.

Kritik karya seni memiliki perbedaan tujuan dan kualitas. Karena perbedaan tersebut, maka dijumpai beberapa jenis karya seni seperti yang disampaikan oleh Feldman (1967) yaitu kritik populer (*popular criticism*), kritik jurnalis (*journalistic criticism*), kritik keilmuan (*scholarly criticism*), dan kritik pendidikan (*pedagogical criticism*). Pemahaman terhadap

keempat tipe kritik seni dapat mengantar nalar kita untuk menentukan pola pikir dalam melakukan kritik seni. Setiap tipe mempunyai ciri (kriteria), media (alat: bahasa), cara (metoda), sudut pandang, sasaran, dan materi yang tidak sama. Keempat kritik tersebut memiliki fungsi yang menekankan pada masing-masing keperluannya.

Seni memberikan kemerdekaan kepada siapapun. Baik kepada karyanya, penciptanya, kritikusnya maupun penikmatnya. Seorang kritikus dapat mengkritik karya orang lain dengan nilai apapun. Boleh mencaci maki, menjelekan, ataupun meninggikan nilainya. Akan tetapi seorang kritikus harus mengerti terlebih dahulu tentang ilmu seni apa yang akan di kritiknya.

Pada dasarnya ada dua metode utama yang dikritik dalam seni yaitu kritik subjek dan kritik objek. Kritik subjek seorang kritikus mengkritik mengenai pengarang atau pencipta seni itu. Di dalamnya terdapat asal usul seniman, latar belakang kehidupan, dan watak dari seniman itu. Sedangkan yang dikritik untuk obyeknya adalah tergantung kepada karya seninya. Misalnya seni kriya yang dikritik bentuknya, warnanya, keindahannya, dan yang lainnya. Begitu juga dengan seni teater yang dikritik jalan ceritanya, blokingnya, artistiknya, aktornya, cahanya lampunya dan sebagainya. Begitu juga dengan seni-seni yang lainnya dapat dikritik secara objektif dan subjektif.

Berikut beberapa metode kritik seni

1. Ganjet adalah mengkritik seni dilihat dari pencipta karya seni dan karya seninya. Sehingga ada perbandingan antara pencipta seni dengan karya seninya. Menurut Gunawan Muhammad dalam seni ada istilah teori dua dunia pengalaman empirik, dari



hati ke hati. Bagaimana menyatunya konsep si pengkarya dengan si pengkritik karya.

2. Rawa adalah mengkritik seni hanya dari karyanya saja. Masalah pencipta ataupun senimannya tidak perlu di kritik.

#### G. Penikmat Seni

Penikmat seni adalah penghayat makna pengalaman kehidupan batiniah yang sadar akan ragam kemungkinan bentuk estetis, yang sanggup mewartakan dan memacu terciptanya beragam makna dengan nilai-nilainya. Ia mampu mendapatkan pencerahan bagi kehidupannya sebagai berbudaya. Berbekal dari pengalaman, penghayat seni mampu berperan sebagai pendukung pengembangan kehidupan seni. Seorang penghayat seni sadar bahwa pengalaman yang bersumber dari sensitivitas dan subyektivitas dirinya bukanlah satu-satunya yang ada dan benar. Ia harus sadar akan keterbatasannya dan selalu membuka diri bagi hadirnya makna dengan nilai-nilainya yang baru dan berbeda. Sama sekali ia sadar bahwa dirinya tidak memiliki wewenang untuk mengarahkan, meskipun ia berwewenang menentukan posisi dirinya dan terlibat secara langsung di dalam menciptakan makna dan mewarnai nilai-nilainya.

Penikmat seni yang baik akan selalu haus dengan ragam pengalaman estetis yang sanggup menggugah gairah kehidupan dengan ragam kekayaan pengalaman batin yang mendalam. Dengan pengalaman itu, manusia akan mewarnai kehidupannya sebagai manusia berbudaya dan mampu menjadi seniman yang terbuka. Seniman yang terbuka akan selalu menerima stimulus pengembangan, juga

penghayat seni yang terbuka akan menangkap berbagai ragam kemungkinan pengalaman estetis. Adanya saling terbuka tersebut dengan sendirinya bisa di harapkan terciptanya karya-karya seni yang semakin berkembang memenuhi kebutuhan, sejalan dengan kehidupan manusia, terutama kehidupan budaya yang semakin kaya akan ragam makna dan bentuk.

#### 7. Hubungan Antarpranata

Kehidupan bermasyarakat selalu menimbulkan hubungan antarmanusia dalam suatu lingkungan kehidupan tertentu. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan manusia lain untuk berinteraksi dan saling memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri. Pada bab ini, menjelaskan tentang bentuk-bentuk interaksi atau hubungan sosial. Setelah itu, kalian akan mempelajari tentang pranata sosial.

##### Hubungan sosial

Hubungan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu proses yang asosiatif dan disosiatif. Hubungan sosial asosiatif merupakan hubungan yang bersifat positif, artinya hubungan ini dapat mempererat atau memperkuat jalinan atau solidaritas kelompok. Adapun hubungan sosial disosiatif merupakan hubungan yang bersifat negatif, artinya hubungan ini dapat merenggalkan atau menggoyahkan jalinan atau solidaritas kelompok yang telah terbangun.



## 1. Bentuk-Bentuk Hubungan Sosial Asosiatif



Sumber: *Kompas*, Februari 2008

**Gambar 12.2** Gotong royong menolong korban bencana merupakan contoh bentuk kerukunan.

Hubungan sosial asosiatif adalah proses interaksi yang cenderung menjalin kesatuan dan meningkatkan solidaritas anggota kelompok. Hubungan sosial asosiatif memiliki bentuk-bentuk berikut ini:

- a. Kerja sama; kerja sama dapat dilakukan paling sedikit oleh dua individu untuk mencapai suatu tujuan bersama. Di dalam mencapai tujuan bersama tersebut, pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama saling memahami kemampuan masing-masing dan saling membantu sehingga terjalin sinergi. Kerja sama dapat terjalin semakin kuat jika dalam melakukan kerja sama tersebut terdapat kekuatan dari luar yang mengancam. Ancaman dari pihak luar ini akan menumbuhkan semangat yang lebih besar

karena selain para pelaku kerja sama akan berusaha mempertahankan eksistensinya, mereka juga sekaligus berupaya mencapai tujuan bersama. Kerja sama dapat dibedakan atas beberapa bentuk, berikut ini:

- 1) Kerukunan; merupakan bentuk kerja sama yang paling sederhana dan mudah diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk kerukunan, misalnya kegiatan gotong-royong, musyawarah, dan tolong menolong. Contohnya gotong-royong membangun rumah, menolong korban bencana, musyawarah dalam memilih kepanitiaan suatu acara di lingkungan RT.
- 2) *Bargaining*; merupakan bentuk kerja sama yang dihasilkan melalui proses tawar-menawar atau kompromi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan. Bentuk kerja sama ini pada umumnya dilakukan di bidang perdagangan atau jasa. Contohnya kegiatan tawar-menawar antara penjual dan pembeli dalam kegiatan perdagangan.
- 3) Kooptasi (*cooptation*); proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik suatu organisasi agar tidak terjadi keguncangan atau perpecahan di tubuh organisasi tersebut. Contohnya pemerintah akhirnya menyetujui penerapan hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam yang semula masih pro kontra, untuk mencegah disintegrasi bangsa.
- 4) Koalisi (*coalition*); yaitu kombinasi antara dua pihak atau lebih yang bertujuan sama. Contohnya koalisi antara



dua partai politik dalam mengusung tokoh yang dicalonkan dalam pilkada.

- 5) *Joint venture*; yaitu kerja sama antara pihak asing dengan pihak setempat dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu. Contohnya kerjasama antara PT Exxon mobil Co.LTD dengan PT Pertamina dalam mengelola proyek penambangan minyak di Blok Cepu.
- b. Akomodasi; dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau sebagai suatu proses. Sebagai keadaan, akomodasi adalah suatu bentuk keseimbangan dalam interaksi antarindividu atau kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma sosial dan nilai sosial yang berlaku. Sebagai proses, akomodasi menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Sebagai suatu proses, akomodasi mempunyai beberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk akomodasi sebagai berikut:
  - 1) Koersi (*coercion*); suatu bentuk akomodasi yang dilaksanakan karena adanya paksaan, baik secara fisik (langsung) ataupun secara psikologis (tidak langsung). Di dalam hal ini, salah satu pihak berada pada kondisi yang lebih lemah. Contoh: Koersi secara fisik adalah perbudakan dan penjajahan, sedangkan koersi secara psikologis contohnya tekanan negara-negara donor (pemberi pinjaman) kepada negara-negara kreditor dalam pelaksanaan syarat-syarat pinjaman.
  - 2) Kompromi (*compromise*); suatu bentuk akomodasi di antara pihak-pihak yang terlibat untuk dapat saling

mengurangi tuntutan agar penyelesaian masalah yang terjadi dapat dilakukan. Contohnya perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan gerakan separatis Aceh dalam hal menjaga stabilitas keamanan stabilitas keamanan di Aceh.

- 3) Arbitrasi (*arbitration*); suatu cara mencapai kesepakatan yang dilakukan antara dua pihak yang bertikai dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut memiliki wewenang dalam penyelesaian sengketa dan biasanya merupakan suatu badan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak-pihak yang bertikai. Contohnya penyelesaian pertikaian antara buruh dengan pemilik perusahaan oleh Dinas Tenaga Kerja.



Sumber: *Harian Kompas*, 18 Agustus 2005  
Gambar 12.3 Mediasi yang dilakukan oleh pemerintah Finlandia dengan RI.

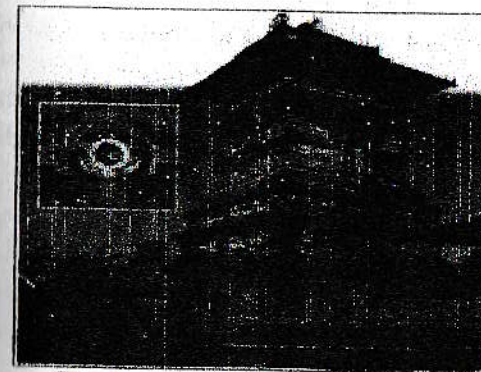
- 4) Mediasi (*mediation*); mediasi hampir sama dengan arbitrasi. Akan tetapi, dalam hal ini fungsi pihak ketiga hanya sebagai penengah dan tidak memiliki wewenang dalam penyelesaian sengketa. Contohnya mediasi yang dilakukan oleh pemerintah Finlandia dalam penyelesaian konflik antara pemerintah Indonesia dengan GAM.



- 5) Konsiliasi (*conciliation*); yaitu usaha mempertemukan keinginan dari beberapa pihak yang sedang berselisih demi tercapainya tujuan bersama. Contohnya konsultasi antara pengusaha angkutan dengan Dinas Lalu Lintas dalam penetapan tarif angkutan.
  - 6) Toleransi (*tolerance*); suatu bentuk akomodasi yang dilandasi sikap saling menghormati kepentingan sesama sehingga perselisihan dapat dicegah atau tidak terjadi. Dalam hal ini, toleransi timbul karena adanya kesadaran masing-masing individu yang tidak direncanakan. Contohnya toleransi antarumat beragama di Indonesia.
  - 7) *Stalemate*; suatu keadaan perselisihan yang berhenti pada tingkatan tertentu. Keadaan ini terjadi karena masing-masing pihak tidak dapat lagi maju ataupun mundur (seimbang). Hal ini menyebabkan masalah yang terjadi akan berlarut-larut tanpa ada penyelesaiannya. Contohnya perselisihan antara negara Amerika Serikat dengan negara Iran terkait dengan isu nuklir.
  - 8) Pengadilan (*adjudication*); merupakan bentuk penyelesaian perkara atau perselisihan di pengadilan oleh lembaga negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya penyelesaian kasus sengketa tanah di pengadilan.
- c. Asimilasi; adalah proses sosial yang timbul apabila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, saling bergaul secara interaktif dalam jangka waktu lama. Dengan demikian, lambat laun

kebudayaan asli akan berubah sifat dan wujudnya menjadi kebudayaan baru yang merupakan perpaduan kebudayaan dan masyarakat dengan tidak lagi membedakan antara unsur budaya lama dengan kebudayaan baru. Proses ini ditandai dengan adanya usaha mengurangi perbedaan yang ada. Proses asimilasi bisa timbul jika ada:

- 1) kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya;
- 2) orang perorangan sebagai anggota kelompok saling bergaul secara intensif, langsung, dan dalam jangka waktu yang lama;
- 3) kebudayaan dari kelompok-kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan. Contohnya perkawinan antarsuku sehingga terjadi pembauran dari kebudayaan masing-masing individu sehingga muncul kebudayaan baru.



Sumber: *Indonesian Heritage*, 2002  
Gambar 12.4 Salah satu contoh bentuk akulturasi budaya Islam dan Hindu.



- d. Akulturasi; adalah suatu keadaan diterimanya unsur-unsur budaya asing ke dalam kebudayaan sendiri. Diterimanya unsur-unsur budaya asing tersebut berjalan secara lambat dan disesuaikan dengan kebudayaan sendiri, sehingga kepribadian budaya sendiri tidak hilang. Contohnya akulturasi antara budaya Hindu dan Islam yang tampak pada seni arsitektur masjid Kudus .

## 2. Bentuk-Bentuk Hubungan Disosiatif

- a. Persaingan; adalah suatu proses sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam usahanya mencapai keuntungan tertentu tanpa adanya ancaman atau kekerasan dari para pelaku. Contohnya persaingan antarperusahaan telekomunikasi atau *provider* dalam menyediakan pelayanan tarif murah pulsa.
- b. Kontravensi; merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dengan pertentangan atau pertikaian. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang atau unsur-unsur budaya kelompok lain. Sikap tersembunyi tersebut dapat berubah menjadi kebencian, namun tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian. Bentuk kontravensi, misalnya berupa perbuatan menghalangi, menghasut, memfitnah, berkhianat, provokasi, dan intimidasi. Contohnya demonstrasi yang dilakukan elemen masyarakat untuk menghalangi atau menolak kenaikan BBM

- c. Pertentangan/Perselisihan; adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok menantang pihak lawan dengan ancaman dan atau kekerasan untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya pertentangan antara golongan muda dengan golongan tua dalam menentukan waktu pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan RI pada tahun 1945.

## 8. Pranata Total

Masyarakat merupakan tatanan pranata sosial. Kehidupan dalam masyarakat berarti adanya kesempatan berpindah dari satu pranata ke pranata lain. Warga masyarakat mengalami perpindahan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kehidupan siswa SMA biasanya sejak pagi hingga malam hari ditandai oleh perpindahan tsb. Pagi hari ketika bangun tidur siswa tsb berada dalam pranata keluarga. Norma-norma yang mengatur, cara berpikir, bertindak, dan berperasaan bersumber pada pranata keluarga. Kemudian pindah ke pranata pendidikan dan rekreasi. Begitu seterusnya sampai pulang ke rumah.

## 9. Pranata Dominan

Pranata dominan merupakan pranata sosial yang menuntut loyalitas penuh dari orang-orang yang berada dibawah naungannya. Contohnya militer dan pranata sekte keagamaan. Sebab-sebab terciptanya dominan atau dominasi tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Dominasi (Kewenangan) dalam politik

Situasi dominasi dapat diamati pada pola hubungan antara atasan dengan bawahan. Dominasi memerlukan staf administrasi untuk melaksanakannya.

Weber membagi dominasi menjadi tiga jenis:

#### 1. Dominasi kharismatik

Dominasi kharismatik adalah suatu dominasi yang keabsahannya didasarkan pada kharisma atau kewibawaan seseorang. Seseorang itu menjadi wibawa atau berkharisma karena adanya kepercayaan yang besar bagi para warga masyarakat kepadanya. Sebagai contoh ialah karisma dari Presiden Ir. Soekarno, yang menyebabkan beliau selalu mendapat tempat di hati rakyatnya dan rakyat selalu mendukung semua kebijakan yang merupakan ide atau gagasannya. Hal itu terjadi bukan karena rakyat mengikuti saja karena rakyat pada waktu itu percaya pada ramalan yang ada pada Jangka Jayabaya, karena rakyat sudah lelah dengan penderitaan atas penjajah. Di mata rakyat Ir. Soekarno merupakan sosok yang pantas dikaitkan dengan ramalan tersebut bahwa akan ada seseorang yang akan membebaskan Indonesia dari penjajah.

#### 2. Dominasi tradisional

Dominasi tradisional adalah Suatu dominasi yang keabsahannya didasarkan pada tradisi. Penguasa dalam dominasi ini cenderung melanjutkan tradisi-tradisi yang telah ditegakkan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Jadi, dominasi tradisional diartikan sebagai dominasi yang disebabkan karena adanya warisan dari pemimpin sebelumnya yang bersifat kharismatik.

Wewenang tradisional (*traditional authority*), yang didasarkan pada kebiasaan, merupakan ciri kelompok kesukuan. Dalam masyarakat semacam ini, kebiasaan menentukan hubungan-hubungan dasar. Kelahiran dalam suatu keluarga tertentu, misalnya, menjadi seseorang kepala, raja, atau ratu. Menurut pandangan anggota masyarakat, hal ini merupakan cara yang paling benar untuk menentukan siapa yang akan memerintah, Karena hal ini dilakukan secara terus menerus seperti itu.

#### 3. Dominasi legal-rasional

Dominasi jenis ini keabsahannya didasarkan pada aturan hukum yang dibuat dengan sengaja atas dasar pertimbangan rasional. Pemimpin ditunjuk atas dasar aturan hukum yang jelas.

Wewenang rasional-legal (*rational-legal authority*), tidak didasarkan pada kebiasaan, melainkan pada peraturan tertulis. Rasional berarti masuk akal, dan legal merupakan bagian dari hukum. Oleh karena itu, rasional legal merujuk pada hal-hal yang disepakati orang secara masuk akal dan ditulis menjadi hukum atau peraturan tertentu. Hal-hal yang disepakati dapat bersifat sangat luas, seperti suatu konstitusi yang merinci hak-hak semua anggota suatu masyarakat, atau bersifat sempit, seperti suatu kontrak antara dua individu. Karena birokrasi didasarkan pada peraturan tertulis, wewenang *rasional-legal* terkadang disebut sebagai wewenang birokrasi (*bureaucratic authority*)



## BAB VI

### HUBUNGAN PRANATA SOSIAL DENGAN GEOGRAFI

#### A. Mukaddimah

Pranata sosial merupakan sistem norma khusus yang mengatur tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pranata sosial di setiap daerah berbeda-beda. Hal ini disebabkan tuntutan hidup masyarakat di setiap daerah juga berbeda. Untuk lebih jelasnya diuraikan lebih detil sebagai berikut:

#### A.1. Pengertian Manusia Dan Lingkungan

##### A.1.1. *Pengertian Manusia*

Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik positif maupun negatif.

Manusia adalah makhluk yang terbukti berteknologi tinggi. Ini karena manusia memiliki perbandingan massa otak dengan massa tubuh terbesar diantara semua makhluk yang ada di bumi. Walaupun ini bukanlah pengukuran yang mutlak, namun perbandingan massa otak dengan tubuh manusia memang memberikan petunjuk dari segi intelektual relatif.

Manusia atau orang dapat diartikan dari sudut pandang yang berbeda-beda, baik itu menurut biologis,



rohani, dan istilah kebudayaan, atau secara campuran. Secara biologis, manusia diklasifikasikan sebagai *homo sapiens* (bahasa latin untuk manusia) yang merupakan sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi.

Manusia juga sebagai makhluk individu memiliki pemikiran-pemikiran tentang apa yang menurutnya baik dan sesuai dengan tindakan-tindakan yang akan diambil. Manusia pun berlaku sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan keterkaitannya dengan lingkungan dan tempat tinggalnya.

#### A.1.2. Manusia Sebagai Makhluk Sosial

Pengertian Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri. Karena manusia menjalankan peranannya dengan menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan pemikiran dan perasaannya. Manusia tidak dapat menyadari individualitas, kecuali melalui medium kehidupan sosial. Esensi manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya adalah kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya adalah kehidupan bersama, serta bagaimana tanggungjawab dan kewajibannya di dalam kebersamaan.

#### A.1.3. Karakteristik Manusia Sebagai Makhluk Sosial

Telah berabad-abad konsep manusia sebagai makhluk sosial itu ada yang menitik beratkan pada pengaruh masyarakat yang berkuasa kepada individu. Dimana memiliki unsur-unsur keharusan biologis, yang terdiri dari:

- a. Dorongan untuk makan
- b. Dorongan untuk mempertahankan diri
- c. Dorongan untuk melangsungkan jenis

Dari tahapan diatas menggambarkan bagaimana individu dalam perkembangannya sebagai seorang makhluk sosial dimana antar individu merupakan satu komponen yang saling ketergantungan dan membutuhkan. Sehingga komunikasi antar masyarakat ditentukan oleh peran oleh manusia sebagai makhluk sosial.

Dalam perkembangannya manusia juga mempunyai kecenderungan sosial untuk meniru dalam arti membentuk diri dengan melihat kehidupan masyarakat yang terdiri dari:

1. Penerimaan bentuk-bentuk kebudayaan, dimana manusia menerima bentuk-bentuk pembaharuan yang berasal dari luar sehingga dalam diri manusia terbentuk sebuah pengetahuan.
2. Penghematan tenaga dimana ini adalah merupakan tindakan meniru untuk tidak terlalu menggunakan banyak tenaga dari manusia sehingga kinerja manusia dalam masyarakat bisa berjalan secara efektif dan efisien.

Pada umumnya hasrat meniru itu kita lihat paling jelas di dalam ikatan kelompok tetapi juga terjadi didalam kehidupan masyarakat secara luas. Dari gambaran diatas jelas bagaimana manusia itu sendiri membutuhkan sebuah interaksi atau komunikasi untuk membentuk dirinya sendiri melalui proses meniru. Sehingga secara jelas bahwa manusia itu sendiri punya konsep sebagai makhluk sosial.



Yang menjadi ciri manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial adalah adanya suatu bentuk interaksi sosial didalam hubungannya dengan makhluk sosial lainnya yang dimaksud adalah dengan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Secara garis besar faktor-faktor personal yang mempengaruhi interaksi manusia terdiri dari tiga hal yakni:

1. Tekanan emosional. Ini sangat mempengaruhi bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain.
2. Harga diri yang rendah. Ketika kondisi seseorang berada dalam kondisi manusia yang direndahkan maka akan memiliki hasrat yang tinggi untuk berhubungan dengan orang lain karena kondisi tersebut dimana orang yang direndahkan membutuhkan kasih sayang orang lain atau dukungan moral untuk membentuk kondisi seperti semula.
3. Isolasi sosial. Orang yang terisolasi harus melakukan interaksi dengan orang yang sepaham atau sepemikiran agar terbentuk sebuah interaksi yang harmonis Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri. Sebagai makhluk sosial karena manusia menjalankan perannya dengan menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan pemikiran dan perasaannya. Manusia tidak dapat menyadari individualitas, kecuali melalui medium kehidupan sosial.

Manifestasi manusia sebagai makhluk sosial, nampak pada kenyataan bahwa tidak pernah ada manusia yang mampu menjalani kehidupan ini tanpa bantuan orang lain.

#### A.1.4. Kedudukan Manusia sebagai Makhluk Sosial.

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir, dia sudah disebut sebagai makhluk sosial.

Hakekat manusia sebagai makhluk sosial dan politik akan membentuk hukum, mendirikan kaidah perilaku, serta bekerjasama dalam kelompok yang lebih besar. Dalam perkembangan ini, spesialisasi dan integrasi atau organisasi harus saling membantu. Sebab kemajuan manusia nampaknya akan bersandar kepada kemampuan manusia untuk kerjasama dalam kelompok yang lebih besar. Kerjasama sosial merupakan syarat untuk kehidupan yang baik dalam masyarakat yang saling membutuhkan.

Kesadaran manusia sebagai makhluk sosial, justru memberikan rasa tanggungjawab untuk mengayomi individu yang jauh lebih "lemah" dari pada wujud sosial yang "besar" dan "kuat". Kehidupan sosial, kebersamaan, baik itu non formal (masyarakat) maupun dalam bentuk-bentuk formal (institusi, negara) dengan wibawanya wajib mengayomi individu.

#### A.1.5. Pengembangan Manusia Sebagai Makhluk Sosial



Di dalam kehidupannya, manusia tidak hidup dalam kesendirian. Manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Ini merupakan salah satu kodrat manusia adalah selalu ingin berhubungan dengan manusia lain. Hal ini menunjukkan kondisi yang interdependensi. Di dalam kehidupan manusia selanjutnya, ia selalu hidup sebagai warga suatu kesatuan hidup, warga masyarakat, dan warga negara. Hidup dalam hubungan antaraksi dan interdependensi itu mengandung konsekuensi-konsekuensi sosial baik dalam arti positif maupun negatif. Keadaan positif dan negatif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai sekaligus watak manusia bahkan pertentangan yang diakibatkan oleh interaksi antarindividu. Tiap-tiap pribadi harus rela mengorbankan hak-hak pribadi demi kepentingan bersama. Dalam rangka ini dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan. Pada zaman modern seperti saat ini manusia memerlukan pakaian yang tidak mungkin dibuat sendiri.

Tidak hanya terbatas pada segi badaniah saja, manusia juga mempunyai perasaan emosional yang ingin diungkapkan kepada orang lain dan mendapat tanggapan emosional dari orang lain pula. Manusia memerlukan pengertian, kasih sayang, harga diri pengakuan, dan berbagai rasa emosional lainnya. Tanggapan emosional tersebut hanya dapat diperoleh apabila manusia berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain dalam suatu tatanan kehidupan bermasyarakat. Dalam berhubungan dan berinteraksi, manusia memiliki sifat yang khas yang dapat menjadikannya lebih baik. Kegiatan mendidik merupakan salah satu sifat yang khas yang dimiliki oleh manusia. Imanuel Kant mengatakan, "Manusia hanya dapat menjadi

manusia karena pendidikan". Jadi jika manusia tidak dididik maka ia tidak akan menjadi manusia dalam arti yang sebenarnya. Hal ini telah terkenal luas dan dibenarkan oleh hasil penelitian terhadap anak terlantar. Hal tersebut memberi penekanan bahwa pendidikan memberikan kontribusi bagi pembentukan pribadi seseorang.

Dengan demikian manusia sebagai makhluk sosial berarti bahwa disamping manusia hidup bersama demi memenuhi kebutuhan jasmaniah, manusia juga hidup bersama dalam memenuhi kebutuhan rohani.

#### *A.1.2 Pengertian Lingkungan*

Lingkungan adalah suatu media dimana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinnya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks.

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernapas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan. Pengertian lain dari lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung<sup>52</sup>.

---

<sup>52</sup>(<http://afand.abatasa.com/post/detail/2405/lingkungan-hidup-kerusakan-lingkungan-pengertian-kerusakan-lingkungan-dan-pelestarian-.htm>)



Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Jika kalian berada di sekolah, lingkungan biotiknya berupa teman-teman sekolah, bapak ibu guru serta karyawan, dan semua orang yang ada di sekolah, juga berbagai jenis tumbuhan yang ada di kebun sekolah serta hewan-hewan yang ada disekitarnya. Adapun lingkungan abiotik berupa udara, meja kursi, papan tulis, gedung sekolah, dan berbagai macam benda mati yang ada disekitar.

Seringkali lingkungan yang terdiri dari sesama manusia disebut juga sebagai lingkungan sosial. Lingkungan sosial inilah yang membentuk sistem pergaulan yang besar perannya dalam membentuk kepribadian seseorang<sup>53</sup>.

## B. Hubungan Antara Manusia Dengan Lingkungan

### B.1. Pengertian Ekologi

Pengertian Ekologia yaitu ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan yang lainnya. Berasal dari kata Yunani *oikos* (habitat) dan *logos* ("ilmu"). Ekologi berarti ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Istilah ekologi pertama kali dikemukakan oleh Ernst Haeckel (1834-1914). Dalam ekologi, makhluk hidup dipelajari sebagai kesatuan atau sistem dengan lingkungannya.

Kita mengenal beberapa definisi untuk ekologi, misalnya:

<sup>53</sup>(<http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia>). Diakses pada tanggal 16 Mei 2012

- Ekologi ialah cabang biologi yang mempelajari hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya.
- Ekologi ialah studi ilmiah tentang interaksi yang menentukan penyebaran dan kepadatan makhluk hidup.
- Ekologi ialah biologi lingkungan.

Bertolak dari definisi ekologi ialah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya maka ekologi dapat juga diartikan sebagai ilmu yang membahas hubungan manusia dan lingkungannya dipandang dari kepentingan dan kebutuhan manusia terhadap lingkungan itu sendiri.

Ekologi merupakan cabang ilmu yang masih relatif baru, yang baru muncul pada tahun 70-an. Akan tetapi, ekologi mempunyai pengaruh yang besar terhadap cabang biologinya. Ekologi mempelajari bagaimana makhluk hidup dapat mempertahankan kehidupannya dengan mengadakan hubungan antara makhluk hidup dengan benda tidak hidup di tempat hidup atau lingkungannya. Ekologi, biologi dan ilmu kehidupan lainnya saling melengkapi dengan zoologi dan botani yang menggambarkan bahwa ekologi mencoba memperkirakan dan menggambarkan sebagian besar rantai makanan manusia.

Para ahli ekologi mempelajari perpindahan energi dan materi dari makhluk hidup yang satu kepada makhluk hidup yang lain dalam lingkungannya serta faktor-faktor yang menyebabkannya. Serta perubahan populasi atau spesies pada waktu yang berbeda dalam faktor-faktor yang menyebabkannya. Terjadi hubungan antarspesies (interaksi antar spesies) makhluk



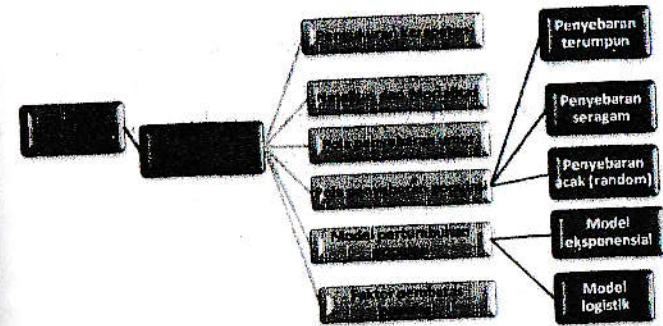
hidup dan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kini para ekolog (orang yang mempelajari ekologi) berfokus kepada ekowilayah bumi dan riset perubahan iklim.

Di samping itu manusia selalu memiliki minat yang sangat kuat pada organisme lain dan lingkungannya. Para naturalis mulai dari Aristoteles hingga Darwin membuat proses pengamatan dan pemerian organisme di habitat alamiahnya sebagai tujuan akhir, alih-alih sebagai sekedar cara untuk bertahan hidup. Sebagai suatu bidang kajian ilmiah, ekologi ini banyak sekali menggunakan pengamatan dan eksperimen-eksperimen dan merupakan kajian ilmiah mengenai interaksi antara organisme dan lingkungannya. Organisme dipengaruhi oleh lingkungannya (baik komponen abiotik maupun biotik), akan tetapi dengan adanya aktivitas di dalamnya, maka organisme-organisme yang ada di dalamnya akan mengubah lingkungan tersebut yang sering kali terjadi secara dramatis.

Lingkungan meliputi komponen abiotik (faktor-faktor kimiawi dan fisik yang hidup) seperti suhu, cahaya, air dan nutrien. Yang juga tak kalah pentingnya adalah komponen biotik (hidup), semua organisme lain yang merupakan bagian dari lingkungan suatu individu. Organisme lain bisa berkompetisi dengan suatu individu untuk mendapatkan makanan dan sumberdaya lainnya.

Ekologi organisme berhubungan dengan cara-cara berperilaku, fisiologis, dan morfologis yang digunakan oleh suatu organisme individual dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan abiotiknya. Tingkat organisasi berikutnya adalah populasi. Ekologi populasi sebagian besar terpusat pada faktor-faktor yang

mempengaruhi ukuran dan komposisi populasi. Sedangkan pada tingkatan ekologi komunitas, meliputi cara berinteraksi diantara organisme, seperti predasi, kompetisi, dan penyakit, dimana hal-hal ini dapat mempengaruhi struktur dan organisasi komunitas.



## B.2. Lingkungan Hidup Manusia

### A. Pengertian Lingkungan hidup

Lingkungan hidup dapat didefinisikan dapat didefinisikan sebagai:

- Daerah di mana sesuatu makhluk hidup berada.
- Keadaan/kondisi yang melingkupi suatu makhluk hidup.
- Keseluruhan keadaan yang meliputi suatu makhluk hidup atau sekumpulan makhluk hidup, terutama:
  - Kombinasi dari berbagai kondisi fisik di luar makhluk hidup yang mempengaruhi pertumbuhan,



perkembangan dan kemampuan makhluk hidup untuk bertahan hidup.

2. Gabungan dari kondisi sosial and budaya yang berpengaruh pada keadaan suatu individu makhluk hidup atau suatu perkumpulan/komunitas makhluk hidup.

Istilah lingkungan dan lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia seringkali digunakan silih berganti dalam pengertian yang sama. Apabila lingkungan hidup itu dikaitkan dengan hukum/aturan pengelolaannya, maka batasan wilayah wewenang pengelolaan dalam lingkungan tersebut harus jelas.

#### B. Definisi Lingkungan Hidup Indonesia

Lingkungan hidup bagi bangsa Indonesia tidak lain merupakan Wawasan Nusantara, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya.

Secara hukum maka wawasan dalam menyelenggarakan penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah Wawasan Nusantara. Persetujuan Internasional Tentang Lingkungan Hidup Indonesia termasuk dalam perjanjian: Biodiversitas, Perubahan Iklim, Desertifikasi, Spesies yang Terancam, Sampah Berbahaya, Hukum Laut, Larangan Ujicoba Nuklir, Perlindungan Lapisan Ozon, Polusi Kapal, Perakayuan Tropis 83, Perakayuan Tropis 94, Dataran basah, Perubahan Iklim - Protokol Kyoto (UU 17/2004), Perlindungan Kehidupan Laut (1958) dengan UU 19/19 Masalah Lingkungan Hidup di

Indonesia. Bahaya alam: banjir, kemarau panjang, tsunami, gempa bumi, gunung berapi, kebakaran hutan, gunung lumpur, tanah longsor.

#### C. Teori Etika Lingkungan Hidup.

Sikap dan perilaku seseorang terhadap sesuatu sangat ditentukan oleh bagaimana pandangannya terhadap sesuatu itu. Kalau sesuatu hal dipandang sebagai berguna dan penting, maka sikap dan perilaku terhadap sesuatu itu lebih banyak bersifat menghargai. Sebaliknya jika sesuatu hal dipandang dan dipahami sebagai sesuatu yang tidak berguna dan tidak penting, maka sikap dan perilaku yang muncul lebih banyak bersifat mengabaikan, bahkan merusak.. Manusia memiliki pandangan tertentu pada alam, dimana pandangan itu telah menjadi landasan bagi tindakan dan perilaku manusia terhadap alam. Dari beberapa pandangan etika yang telah berkembang tentang alam disini akan dibahas tiga teori utama, yang dikenal dengan *Shallow environmental Ethics*, *Intermediate Environmental ethics*, dan *Deep Environmental ethics*. Ketiga teori ini dikenal juga sebagai antroposentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme. Ketiganya akan dicoba diterangkan satu persatu, sambil meninjaunya secara kritis.



## 1. Antroposentrisme

Antroposentrisme (antropos = manusia<sup>54</sup>) adalah suatu pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Pandangan ini berisi pemikiran bahwa segala kebijakan yang diambil mengenai lingkungan hidup harus dinilai berdasarkan manusia dan kepentingannya. Jadi, pusat pemikirannya adalah manusia. Kebijakan terhadap alam harus diarahkan untuk mengabdikan kepada kepentingan manusia. Pandangan moral lingkungan yang antroposentrisme disebut juga sebagai *human centered ethic*, karena mengandaikan kedudukan dan peran moral lingkungan hidup yang terpusat pada manusia. Maka tidak heran kalau fokus perhatian dalam pandangan ini terletak pada peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dalam alam semesta. Alam dilihat hanya sebagai obyek, alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan manusia dan kepentingan manusia. Dengan demikian alam dilihat sebagai alat bagi pencapaian tujuan manusia.

## 2. Tinjauan kritis atas teori antroposentrisme

Antroposentrisme didasarkan pada pandangan filsafat yang mengklaim bahwa hal yang bernuansa moral hanya berlaku pada manusia. Manusia di agungkan sebagai yang mempunyai nilai paling tinggi dan paling penting dalam kehidupan ini, jauh melebihi semua makhluk lain. Ajaran yang telah menempatkan manusia sebagai pusat suatu sistem alam semesta ini telah membuat arogan terhadap alam, dengan menjadikan sebagai objek untuk dieksploitasi.

<sup>54</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi pertama cet. I, 1991, hlm. 16

- a. Antroposentrisme sangat bersifat instrumental, dimana pola hubungan manusia dengan alam hanya terbatas pada relasi instrumental semata. Alam dilihat sebagai alat pemenuhan dan kepentingan manusia. Teori ini dianggap sebagai sebuah etika lingkungan yang dangkal dan sempit (*shallow environmental ethics*).
- b. Antroposentrisme sangat bersifat teologis<sup>55</sup> karena pertimbangan yang diambil untuk peduli terhadap alam didasarkan pada akibat dari tindakan itu bagi kepentingan manusia. Konservasi alam misalnya, hanya dianggap penting sejauh hal itu mempunyai dampak menguntungkan bagi kepentingan manusia.

Teori antroposentrisme telah dituduh sebagai salah satu penyebab bagi terjadinya krisis lingkungan hidup. Pandangan inilah yang menyebabkan manusia berani melakukan tindakan eksploitatif terhadap alam, dengan menguras kekayaan alam demi kepentingannya. Kepedulian lingkungan hanya muncul sejauh terkait dengan kepentingan manusia, dan itupun lebih banyak berkaitan dengan kepentingan jangka pendek saja.

Walaupun kritik banyak dilontarkan terhadap teori antroposentrisme, namun sebenarnya argumen yang ada didalamnya cukup sebagai landasan kuat bagi pengembangan sikap kepedulian terhadap alam. Manusia membutuhkan lingkungan hidup yang baik, maka demi

<sup>55</sup>Teleologis, dari kata "tele" = tujuan, dan "logos" = pengetahuan. Jadi, suatu pandangan yang melihat dan memandang sesuatu dari segi tujuan atau akibatnya saja



kepentingan hidupnya, manusia memiliki kewajiban memelihara dan melestarikan alam lingkungannya. Kekurangan pada teori ini terletak pada pendasaran dari tindakan memberi perhatian pada alam, yang tidak didasarkan pada kesadaran dan pengakuan akan adanya nilai ontologis yang dimiliki oleh alam itu sendiri, melainkan hanya kepentingan manusia semata.

### 3. Biosentrisme

Etika lingkungan Biosentrisme adalah etika lingkungan yang lebih menekankan kehidupan sebagai standar moral. Salah satu tokoh penganutnya adalah Kenneth Goodpaster. Menurut Kenneth rasa senang atau menderita bukanlah tujuan pada dirinya sendiri. Bukan senang atau menderita, akhirnya, melainkan kemampuan untuk hidup atau kepentingan untuk hidup. Kepentingan untuk hidup yang harus dijadikan standar moral. Sehingga bukan hanya manusia dan binatang saja yang harus dihargai secara moral tetapi juga tumbuhan. Menurut Paul Taylor, karenanya tumbuhan dan binatang secara moral dapat dirugikan dan atau diuntungkan dalam proses perjuangan untuk hidup mereka sendiri, seperti bertumbuh dan bereproduksi.

Biosentrisme adalah suatu pandangan yang menempatkan alam sebagai yang mempunyai nilai dalam dirinya sendiri, lepas dari kepentingan manusia. Dengan demikian biosentrisme menolak antroposentrisme yang menyatakan bahwa manusialah yang mempunyai nilai dalam dirinya sendiri. Teori biosentrisme berpandangan bahwa makhluk hidup bukan hanya manusia saja. Ada banyak hal dan jenis makhluk hidup yang memiliki kehidupan. Hanya saja, hal yang rumit dari biosentrisme, atau yang disebut juga

*life-centered ethic*, terletak pada cara manusia menanggapi pertanyaan: "Apakah hidup itu?". Pandangan biosentrisme mendasarkan moralitas pada keluhuran kehidupan, entah pada manusia atau pada makhluk hidupnya. Karena yang menjadi pusat perhatian dan ingin dibela dalam teori ini adalah kehidupan, maka secara moral berlaku prinsip bahwa setiap kehidupan dimuka bumi ini mempunyai nilai moral yang sama, sehingga harus dilindungi dan diselamatkan. Oleh karena itu, kehidupan setiap makhluk hidup pantas diperhitungkan secara serius dalam setiap keputusan dan tindakan moral, bahkan lepas dari pertimbangan untung rugi bagi kepentingan manusia.

### Tinjauan kritis atas teori biosentrisme

Biosentrisme menekankan kewajiban terhadap alam bersumber dari pertimbangan bahwa kehidupan adalah sesuatu yang bernilai, baik kehidupan manusia maupun spesies lain dimuka bumi ini. Prinsip atau perintah moral yang berlaku disini dapat dituliskan sebagai berikut: "adalah hal yang baik secara moral bahwa kita mempertahankan dan memacu kehidupan, sebaliknya, buruk kalau kita menghancurkan kehidupan".

Biosentrisme melihat alam dan seluruh isinya mempunyai harkat dan nilai dalam dirinya sendiri. Alam mempunyai nilai justru karena ada kehidupan yang terkandung didalamnya. Kewajiban terhadap alam tidak harus dikaitkan dengan kewajiban terhadap sesama manusia. Kewajiban dan tanggung jawab terhadap alam semata-mata didasarkan pada pertimbangan moral bahwa segala spesies di alam semesta mempunyai nilai atas dasar bahwa mereka



mempunyai kehidupan sendiri, yang harus dihargai dan dilindungi.

Biosentrisme memandang manusia sebagai makhluk biologis yang sama dengan makhluk biologis yang lain. Manusia dilihat sebagai salah satu bagian saja dari keseluruhan kehidupan yang ada di muka bumi, dan bukan merupakan pusat dari seluruh alam semesta. Maka secara biologis manusia tidak ada bedanya dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu tokoh yang menghindari penyamaan begitu saja antara manusia dengan makhluk hidup lainnya adalah Leopold. Menurut dirinya, manusia tidak memiliki kedudukan yang sama begitu saja dengan makhluk hidup lainnya. Kelangsungan hidup manusia mendapat tempat yang penting dalam pertimbangan moral yang serius. Hanya saja, dalam rangka menjamin kelangsungan hidupnya, manusia tidak harus melakukannya dengan cara mengorbankan kelangsungan dan kelestarian komunitas ekologis.

Manusia dapat menggunakan alam untuk kepentingannya, namun dia tetap terikat tanggung jawab untuk tidak mengorbankan integrity, stability dan beauty dari makhluk hidup lainnya. Untuk mengatasi berbagai kritikan atas klaim pertanyaan antara manusia dengan makhluk biologis lainnya, salah seorang tokoh biosentrisme, Taylor, membuat pembedaan antara pelaku moral (*moral agents*) dan subyek moral (*moral subjects*). Pelaku moral adalah manusia karena dia memiliki kemampuan untuk bertindak secara moral, berupa kemampuan akal budi dan kebebasan. Maka hanya manusialah yang memikul kewajiban dan tanggung jawab moral atas pilihan-pilihan, dan tindakannya. Sebaliknya, subyek moral adalah makhluk yang bisa diperlakukan secara baik atau buruk, dan itu berarti

menyangkut semua makhluk hidup, termasuk manusia. Dengan demikian semua pelaku moral adalah juga subyek moral, namun tidak semua subyek moral adalah pelaku moral, di mana pelaku moral memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap mereka.

Teori biosentrisme, yang disebut juga *intermediate environmental ethic*, harus dimengerti dengan baik, khususnya menyangkut kehidupan manusia dan makhluk-makhluk hidup yang lain di bumi ini. Teori ini memberi bobot dan pertimbangan moral yang sama kepada semua makhluk hidup. Disini dituntut bahwa alam dan segala kehidupan yang terkandung didalamnya haruslah masuk dalam pertimbangan dan kepedulian moral. Manusia tidak mengorbankan kehidupan lainnya begitu saja atas dasar pemahaman bahwa alam dan segala isinya tidak bernilai dalam dirinya sendiri.

#### 4. Ekosentrisme

Etika Lingkungan Ekosentrisme adalah sebutan untuk etika yang menekankan keterkaitan seluruh organisme dan anorganisme dalam ekosistem. Setiap individu dalam ekosistem diyakini terkait satu dengan yang lain secara mutual. Planet bumi menurut pandangan etika ini adalah semacam pabrik integral, suatu keseluruhan organisme yang saling membutuhkan, saling menopang dan saling memerlukan. Sehingga proses hidup-mati harus terjadi dan menjadi bagian dalam tata kehidupan ekosistem. Kematian dan kehidupan haruslah diterima secara seimbang. Hukum alam memungkinkan makhluk saling memangsa di antara semua spesies. Ini menjadi alasan mengapa manusia boleh memakan unsur-unsur yang ada di alam, seperti binatang maupun tumbuhan. Menurut salah satu tokohnya, John B. Cobb, etika ini mengusahakan keseimbangan antara



kepentingan individu dengan kepentingan keseluruhan dalam ekosistem.

Ekosentrisme dapat dikatakan sebagai lanjutan dari teori etika lingkungan biosentrisme. Kalau biosentrisme hanya memusatkan perhatian pada kehidupan seluruhnya, ekosentrisme justru memusatkan perhatian pada seluruh komunitas biologis, baik yang hidup maupun tidak. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa secara ekologis, baik makhluk hidup maupun benda-benda antibiotik lainnya saling terkait satu sama lainnya. Jadi ekosentrisme, selain sejalan dengan biosentrisme-di mana keduanya sama-sama menentang pandangan antroposentrisme- juga mencakup komunitas ekologis seluruhnya. Jadi ekosentrisme, menuntut tanggungjawab moral yang sama untuk semua realitas biologis.

Tinjauan kritis atas teori ekosentrisme.

- a. Ekosentrisme, yang disebut juga *deep environmental ethics*, semakin dipulerkan dengan versi lain setelah diperkenalkan oleh Arne Naes, seorang filsuf Norwegia dengan menyebutnya sebagai *Deep Ecology* ini adalah suatu paradigma baru tentang alam dan seluruh isinya. Perhatian bukan hanya berpusat pada manusia melainkan pada makhluk hidup seluruhnya dalam kaitan dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup. Manusia bukan lagi pusat dari dunia moral. *Deep Ecology* memusatkan perhatian kepada semua kehidupan di bumi ini, bukan hanya kepentingan seluruh komunitas ekologi.

- b. Arne Naes bahkan juga menggunakan istilah *ecosophy* untuk memberikan pendasaran filosofi atas *deep ecology*. "Eco" berarti rumah tangga dan "sophy" berarti kearifan atau kebijaksanaan. Maka *ecosophy* berarti kearifan dalam mengatur hidup selaras dengan alam sebagai sebuah rumah tangga dalam arti luas. Dalam pandangan *ecosophy* terlihat adanya suatu pergeseran dari sekedar sebuah ilmu (*science*) menjadi sebuah kearifan (*wisdom*). Dalam arti ini, lingkungan hidup tidak hanya sekedar sebuah ilmu melainkan sebuah kearifan, sebuah cara hidup, sebuah pola hidup selaras dengan alam. Ini adalah cara untuk menjaga dan memelihara lingkungannya secara arif, layaknya sebuah rumah tangga.
- c. *Deep ecology* menganut prinsip biospheric egalitarianism, yaitu pengakuan bahwa semua organisme dan makhluk hidup adalah anggota yang sama statusnya dari suatu keseluruhan yang terkait sehingga mempunyai martabat yang sama. Ini menyangkut suatu pengakuan bahwa hak untuk hidup dan berkembang untuk semua makhluk (baik hayati maupun nonhayati) adalah sebuah hak universal yang tidak bisa diabaikan.
- d. Sikap *deep ecology* terhadap lingkungan sangat jelas, tidak hanya memusatkan perhatian pada dampak pencemaran bagi kesehatan manusia, tetapi juga pada kehidupan secara keseluruhan. Pendekatan yang dilakukan dalam menghadapi berbagai issue lingkungan hidup bukan bersifat antroposentris, melainkan biosentris dan bahkan ekosentris. Isi alam semesta tidak dilihat hanya sebagai sumberdaya dan



menilainya dari fungsi ekonomis semata. Alam harus dipandang juga darisegi nilai dan fungsi budaya, sosial, spiritual, medis dan biologis.

#### D. Bumi sebagai kesatuan ekosistem

Untuk mengembangkan pandangan yang semakin tepat terhadap lingkungan hidup diperlukan pemahaman yang semakin baik tentang keadaan dan keberlangsungan berbagai lapisan kehidupan yang terjadi di bumi ini. Sikap terhadap lingkungan juga merupakan sikap yang secara langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar diarahkan kepada diri sendiri dan umat manusia seluruhnya. Hal tersebut terjadi karena bumi merupakan suatu keanekaragaman hayati yang saling bergantung satu dengan yang lainnya.

##### 1. Ekosistem bumi

Ekosistem (dari kata yunani oikos = rumah, dan systema = keseluruhan) dimaksud sebagai suatu unsur kehidupan sebuah lingkungan (organisme), yang merupakan sebuah sistem, yakni keseluruhan yang terdiri atas bagian yang saling terkait, dan saling mempengaruhi. Bumi dapat dipandang sebagai suatu ekosistem yang besar yang didalamnya terdapat berbagai ekosistem yang lebih kecil, ada ekosistem lautan, ekosistem hutan, ekosistem pegunungan, ekosistem sungai, ekosistem kawasan pantai, dan sebagainya. Semua ekosistem itu mencakup seluruh bentuk kehidupan yang ada didalamnya, yang saling berinteraksi satu sama lain dan saling mempengaruhi, sehingga keseluruhan biosfer, atau keseluruhan lapisan kehidupan merupakan satu ekosistem bumi.

##### 2. Manusia hanya sebagai salah satu unsur

Walaupun manusia merupakan makhluk yang paling maju, namun manusia hanyalah merupakan salah satu lapisan kehidupan yang berlangsung di bumi ini, tidak lebih dari itu. Manusia tidak memiliki independensi mutlak, di mana tidak mengalamim pengaruh langsung atau tidak langsung dari lingkungan hidup sekitarnya. Kenyataan yang tidak bisa di bantah bahwa ada hubungan dan saling pengaruh antara manusia dan lingkungannya. Manusia dapat mempengaruhi lingkungannya, dan sebaliknya juga, lingkungan pasti mempengaruhi manusia. Kalau lingkungan rusak maka kehidupan manusia akan terancam, dan pada akhirnya bisa punah

##### 3. Peran manusia terhadap lingkungan

Menurut para ahli bumi, bahwa bumi kita ini sudah berusia 5 milyar tahun. Dua milyar tahun pertama belum ada kehidupan di atasnya karena saat itu bumi hanya terdiri atas benda-benda tak hidup seperti batbatuan, gas, dan partikel-partikel debu. Namun bumi bersifat dinamis dengan berlangsungnya proses-proses seperti: pergerakan tektonik, vulkanik, perubahan iklim dan sebagainya. Proses-prose tersebut mempunyai daya destruktif sekaligus konstruktif, mengubah sekaligus memantapkan. Semuanya terjadi silih berganti dalam kurun waktu yang lama. Dari proses dinamis yang terjadi di bumi, muncullah dalam alam ini unsur-unsur dasar pembentuk organisme hidup, seperti hydrogen ( $H_2$ ), oksigen ( $O_2$ ) dan nitrogen ( $N_2$ ). Dengan adanya unsur-unsur tersebut mulailah muncul kehidupan di bumi ini, diperkirakan sekitar 3 milyar tahun yang lalu. Pada awalnya bentuk kehidupan yang ada masih terbatas pada jenis



tumbuh-tumbuhan dan hewan tingkat rendah. Melalui prose dinamis, kurang lebih 2 juta tahun yang lalu, lahirlah jenis organisme baru yang dinamakan manusia. Manusia memiliki otak dan sistem syaraf yang mampu menghasilkan kehendak dan perasaan, sehingga membuatnya lebih mampu menyesuaikan diri dan bertahan dalam situasi lingkungannya, bahkan juga mampu mencari alternatif untuk beradaptasi serta mengatur lingkungannya sedikit demi sedikit.

Dengan demikian maka manusia tidak hanya menerima pengaruh dari lingkungannya, tetapi juga memberikan pengaruh yang semakin lama semakin besar terhadap alam. Kehadiran manusia semakin memperkaya proses dinamis bumi yang sudah berlangsung sejak awal keberadaannya. Kemampuan otak manusia dalam menemukan pemikiran-pemikiran baru untuk menemukan teknologi yang semakin beragam membawa dampak pengaruh besar terhadap alam. Manusia dapat mengeringkan lautan, menciptakan hujan dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa bumi tidak lagi mengalami proses dinamis tersebut pada dirinya sendiri, melainkan sudah melibatkan manusia dan makhluk-mahluk hidup dalam proses interaksi yang saling mempengaruhi. Pengaruh tersebut akan semakin besar sejalan dengan berjalannya waktu. Hanya saja peran dan pengaruh yang ditunjukkan manusia terhadap alam tidak membantu alam berkembang kearah kesempurnaan. Intervensi manusia telah membawa dampak negatif terhadap alam, dan berbagai lapisan kehidupan didalamnya.

## E. Kesatuan Manusia dengan Lingkungan Hidupnya

### 1. Pengaruh Seleksi Alam

Seperti halnya makhluk hidup lainnya, manusia terus berinteraksi dengan lingkungannya. Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya, dan sebaliknya, ia juga dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Manusia seperti adanya, yaitu fenotipenya terbentuk oleh interaksi antara *Genotipe* dan lingkungan hidupnya. *Genotipe* juga tidaklah konstan, melainkan terus menerus mengalami perubahan karena adanya mutasi adanya mutasi pada gen dalam kromosomnya, baik mutasi spontan maupun mutasi karena pengaruh lingkungan. Dengan mutasi gen yang terjadi, maka manusia, walaupun hanya terdiri atas satu jenis, yaitu homo sapiens, namun keanekaan (*diversity*) genotipenya sangatlah besar. Ini terjadi pada nenek moyang manusia dimana dengan adanya keanekaan genotipenya maka terbuka peluang besar untuk terjadinya seleksi alam. Seleksi itu terjadi melalui faktor alam, dan tentu juga melalui kekuatan sosial budaya. Kenyataan yang terjadi Hanya individu yang sesuai atau dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dapat berkembang. Hal itulah yang menyertai evolusi manusia dari nenek moyangnya, *Australopithecus africanus*, menjadi manusia modern, homo sapiens.

### 2. Gambaran Kedudukan Manusia dalam alam lingkungan

Tempat kedudukan manusia ditengah lingkungannya dapat dilihat dari dua segi:

Pertama: dari segi struktur perilaku dan kemampuan. Dapat diurutkan sebagai berikut:

- a. Tingkatan anorganik (benda mati): hanya memiliki berat dan gaya, bergerak bukan atas kemauan sendiri.



- b. Tingkatan tumbuh-tumbuhan: sudah memiliki kehidupan untuk bertumbuh, tetapi masih bergantung pada kekuatan diluar dirinya.
- c. Tingkatan hewan: ada kehidupan dan pertumbuhan, ada semangat dan kehendak yang berdasarkan keteraturan (insting, naluri).
- d. Tingkatan manusia: mempunyai kelengkapan sebagai mahluk hidup yang berkehendak dan berakal budi, yang pada prinsipnya dapat berbuat menurut kemauan diri sendiri.

Urutan ini dapat digambarkan sbb:

Manusia  
Tingkatan Hewan  
Tingkatan Organik  
Tingkatan anorganik

Dalam pandangan ini manusia berada pada kedudukan yang lebih tinggi daripada benda atau mahluk lainnya.

Kedua: Dari segi kedudukan dalam keseluruhan ekosistem dapat digambarkan sebagai berikut:

Ekosistem  
Lingkungan  
biotik  
Lingkungan  
abiotik  
Manusia

Dalam gambar diatas kelihatan bahwa manusia berada di unsur-unsur lainnya, tidak diatas dan tidak juga

dibawah yang lainnya. Nampak semua unsur membentuk suatu lingkaran ekosistem yang berkaitan satu sama lain. Manusia dan unsur-unsur lainnya memberi sumbangan kepada seluruh ekosistem dari tempatnya masing-masing. Kedudukan seperti inilah yang lebih mencerminkan hubungan antar unsur-unsur dalam suatu hubungan saling ketergantungan satu sama lain.

#### F. Mengembangkan Paham yang tepat tentang lingkungan

Dari beberapa pemaparan mengenai teori-teori etika tentang lingkungan, ditambah dengan gambaran mengenai hubungan dan kedudukan manusia dalam alam semesta, perlu dirumuskan suatu pemahaman dan sikap yang semakin baik dan bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup. Pemahaman yang semakin tepat adalah pemahaman yang mendorong pada sikap dan perilaku yang semakin menjamin keberlangsungan segala proses kehidupan yang terdapat di dalam alam semesta ini, termasuk diantaranya, manusia.

#### 1. Teori-teori etika lingkungan

Sudah diuraikan mengenai ketiga teori utama etika lingkungan: antroposentrisme, biosentrisme dan ekosentrisme. Ketiganya sama-sama menuntut kewajiban dan tanggung jawab manusia terhadap alam. Antroposentrisme, banyak dituduh sebagai sumber terjadinya eksploitasi lingkungan. Namun teori ini tetap menuntut kesediaan manusia untuk memelihara lingkungannya. Teori biosentrisme, memusatkan perhatian pada keseluruhan kehidupan yang memiliki nilai pada dirinya sendiri, perhatian bukan hanya ditujukan kepada manusia melainkan juga kepada mahluk hidup lain selain manusia.



Teori ekosentrisme menawarkan pemahaman yang semakin memadai tentang lingkungan. Kepedulian moral diperluas, sehingga mencakup komunitas ekologis seluruhnya, baik yang hidup maupun tidak. Ekosentrisme yang semakin diperluas dalam *deep ecology* dan *ecosophy*, sangat menggugah pemahaman manusia tentang kepentingan seluruh komunitas ekologis. *Deep ecology* menuntut suatu etika baru yang tidak berpusat kepada manusia, melainkan berpusat pada keseluruhan kehidupan dalam kaitan dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup. Yang menjadi pusat dunia moral bukan hanya lagi manusia, melainkan semua spesies, termasuk spesies bukan manusia. *Deep ecology* bukan hanya sekedar pemahaman filosofis tentang lingkungan hidup, melainkan sebuah gerakan konkrit dan praktis penyelamatan lingkungan hidup. Inilah pandangan yang sebaiknya kita kembangkan secara konsisten.

## 2. *Deep ecology* dan pengembangannya

Paham ekosentrisme semakin diperluas dan diperdalam melalui teori *deep ecology*, sebagaimana dipopulerkan oleh Arne Naess, yang menyebut dasar dari filosofinya tentang lingkungan hidup sebagai *ecosophy*, yakni kearifan mengatur hidup selaras dengan alam. Dengan demikian manusia dengan kesadaran penuh, diminta untuk membangun suatu kearifan budi dan kehendak, suatu gaya hidup yang semakin selaras dengan alam.

Ada 8 prinsip *deep ecology* yang dapat dilihat sebagai pandangan yang rata-rata dianut oleh pendukung *deep ecology*.

1. Kesejahteraan dan keadaan baik dari kehidupan manusiawi maupun kehidupan bukan manusiawi di bumi, mempunyai nilai intrinsik. Nilai-nilai ini tak tergantung dari bermanfaat tidaknya dunia bukan manusiawi untuk tujuan manusia.
2. Kekayaan dan keanekaan bentuk-bentuk hidup, menyumbangkan kepada terwujudnya nilai-nilai ini dan merupakan nilai-nilai sendiri.
3. Manusia tidak berhak mengurangi kekayaan dan keanekaan ini, kecuali untuk memenuhi kebutuhan vitalnya.
4. Keadaan baik dari kehidupan dan kebudayaan manusia dapat dicocokkan dengan dikurangnya secara substansia jumlah penduduk. Keadaan baik kehidupan bukan-manusiawi memerlukan dikurangnya jumlah penduduk itu.
5. Campur tangan manusia dengan dunia bukan-manusia kini terlalu besar, dan situasi memburuk dengan pesat.
6. Karena itu kebijakan umum harus berubah. Kebijakan itu menyangkut struktur-struktur dasar dibidang ekonomi, teknologi dan ideologi. Keadaan yang timbul sebagaimana hasilnya akan berbeda secara mendalam dengan struktur-struktur sekarang.
7. Perubahan ideologis adalah terutama menghargai kualitas kehidupan (artinya, manusia dapat tinggal dalam situasi-situasi yang bernilai inheren), dan bukan berpegang pada standar kehidupan yang semakin



tinggi. Akan timbul kesadaran mendalam akan perbedaan antara *big* (= kuantitas) dan *great* (= kualitas).

8. Mereka yang menyetujui butir-butir sebelumnya berkewajiban secara langsung dan tidak langsung untuk mengusahakan mengadakan perubahan-perubahan yang perlu.

Manusia dapat saja menggunakan alam ini demi kegunaan pada dirinya sambil memperhatikan tetap terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup. Keselarasan yang betul serta keseimbangan yang sehat antara kebutuhan manusia dan pelestarian lingkungan menuntut juga penaklukan alam oleh kearifan teknik manusia. Oleh karena dua sikap ekstrim berikut harus ditolak: Pertama, memandang dan memperlakukan alam sejauh berguna bagi manusia dan menguasainya sejauh dimungkinkan oleh kemampuan teknologi semata; dan yang kedua adalah, faham 'misticisme alam' sejauh faham itu menganggap bahwa dunia ini harus diterima begitu saja dan tak boleh di apa-apakan oleh manusia. Kedua pandangan ini yang pertama, memutlakkan campur tangan manusia terhadap alam, dan yang kedua menolak sama sekali campur tangan manusia terhadap alam.

3. Kedudukan tepat manusia dalam alam.

Pandangan *deep ecology* patut dihargai karena menempatkan manusia sebagai bagian dari alam. Pandangan ekosentrisme juga bisa dibenarkan sejauh pandangan itu tidak melepaskan manusia dari alam. Alam memang mempunyai nilai intrinsik, yang tidak tergantung pada manfaatnya untuk manusia. Akan tetapi, kita perlu juga

realistis melihat bahwa pendekatan teknokratis telah membawa manfaat yang tidak perlu bahkan tidak perlu dihilangkan lagi. Yang harus ditolak adalah pendekatan teknokratis yang merusak alam dan tidak memeliharanya. Sebaliknya, jika kita menerima ekosentrisme, kita tidak boleh jatuh dalam ekstrem lain, yaitu "ekofasisme", di mana manusia sebagai individu dikorbankan kepada alam sebagai keseluruhan. Hanya manusialah yang kita sebut 'persona' yang mempunyai martabat khusus, yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. *Biospherical egalitarianisme* tidak bisa dibenarkan bila dimaksudkan sebagai penyamaan martabat semua makhluk hidup. Pengakuan bahwa segenap makhluk mempunyai nilai dalam dirinya sendiri, termasuk dalam hal ini manusia, tidak boleh membawa konsekuensi pengurangan derajat dan martabat manusia sebagai satu-satunya makhluk di bumi ini yang memiliki akal budi dan kehendak bebas. Akan tetapi pengenaan martabat istimewa kepada pribadi manusia, martabat alam tidak dikurangi sedikitpun, tetapi justru ditingkatkan. Dengan keistimewaan yang dimilikinya itu, manusia menjadi satu-satunya makhluk hidup yang memiliki tanggungjawab moral, terhadap dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Maka, melalui manusia, alam bertanggung jawab atas nasibnya sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 Angka 1 mengartikan Lingkungan Hidup sebagai "kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya".



Manusia hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan alam dan budayanya. Dalam lingkungan alamnya manusia hidup dalam sebuah ekosisten yakni, suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosisten terdapat komponen abiotik pada umumnya merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi makhluk-makhluk hidup diantaranya: tanah, udara atau gas-gas yang membentuk atmosfer, air, cahaya, suhu atau temperatur, Sedangkan komponen biotik diantaranya adalah: produsen, konsumen, pengurai.

#### C. Pengaruh Manusia Pada Alam Lingkungan Hidupnya

Manusia sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan diri pada alam lingkungan hidupnya maupun komunitas biologis di tempat mereka hidup. Perubahan alam lingkungan hidup manusia tampak jelas di kota-kota, dibanding dengan pelosok dimana penduduknya masih sedikit dan primitif.

Perubahan alam lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik secara positif ataupun negatif. Berpengaruh bagi manusia karena manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut, dan berpengaruh tidak baik karena dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk menyokong kehidupannya.

Manusia merupakan komponen biotik lingkungan yang memiliki kemampuan berfikir dan penalaran yang tinggi. Disamping itu manusia memiliki budaya, pranata sosial dan pengetahuan serta teknologi yang makin berkembang. Peranan manusia dalam lingkungan ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Peranan manusia yang bersifat negatif adalah peranan yang merugikan

lingkungan. Kerugian ini secara langsung atau pun tidak langsung timbul akibat kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, peranan manusia yang bersifat positif adalah peranan yang berakibat menguntungkan lingkungan karena dapat menjaga dan melestarikan daya dukung lingkungan.

Peranan Manusia yang bersifat negatif terhadap lingkungan antara lain sebagai berikut:

1. Eksploitasi yang melampaui batas sehingga persediaan Sumber Daya Alam makin menciut (*depletion*);
2. Punah atau merosotnya jumlah keanekaan jenis biota;
3. Berubahnya ekosistem alami yang mantap dan seimbang menjadi ekosistem binaan yang tidak mantap karena terus menerus memerlukan subsidi energi;
4. Berubahnya profil permukaan bumi yang dapat mengganggu kestabilan tanah hingga menimbulkan longsor;
5. Masuknya energi bahan atau senyawa tertentu ke dalam lingkungan yang menimbulkan pencemaran air, udara, dan tanah. hal ini berakibat menurunnya kualitas lingkungan hidup. Pencemaran dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan terhadap manusia itu sendiri;

Peranan Manusia yang menguntungkan lingkungan antara lain:

1. Melakukan eksploitasi Sumber Daya Alam secara tepat dan bijaksana terutama SDA yang tidak dapat diperbaharui;



2. Mengadakan penghijauan dan reboisasi untuk menjaga kelestarian keaneka jenis flora serta untuk mencegah terjadinya erosi dan banjir;
3. Melakukan proses daur ulang serta pengolahan limbah agar kadar bahan pencemar yang terbuang ke dalam lingkungan tidak melampaui nilai ambang batasnya;
4. Melakukan sistem pertanian secara tumpang sari atau multi kultur untuk menjaga kesuburan tanah. Untuk tanah pertanian yang miring dibuat sengkedan guna mencegah derasnya erosi serta terhanyutnya lapisan tanah yang mengandung humus;
5. Membuat peraturan, organisasi atau undang-undang untuk melindungi lingkungan dan keanekaan jenis makhluk hidup.

#### D. Sumber Alam

Sumber alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) atau disebut pula sumber-sumber alam biotik. Yang tergolong ke dalam sumber alam ini adalah semua makhluk hidup, hutan, hewan-hewan, dan tumbuhan-tumbuhan. Sumber alam yang tidak diperbaharui (*nonrenewable resources*) atau disebut pula sebagai golongan sumber alam abiotik. Yang tergolong ke dalam sumber abiotik adalah tanah, air, bahan-bahan galian, mineral, dan bahan-bahan tambang lainnya.

Sumber alam biotik mempunyai kemampuan diri atau bertambah, misalkan tumbuhan dapat berkembang biak dengan biji atau spora, dan hewan-hewan menghasilkan keturunannya dengan telur atau melahirkan. Oleh karena itu sumber daya alam tersebut dikatakan sebagai sumber daya alam yang masih dapat diperbaharui. Lain halnya dengan sumber daya alam abiotik yang tidak dapat memperbaharui

dirinya. Bila sumber minyak, batu bara atau bahan-bahan lainnya telah habis digunakan manusia, maka habislah bahan-bahan tambang tersebut.

Sumber alam biotik dapat terus digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia, bila manusia menggunakannya secara bijaksana dalam penggunaan berarti memperhatikan siklus hidup sumber alam tersebut, dan diusahakan jangan sampai sumber alam itu musnah. Sebab, jika suatu jenis spesies di bumi musnah, maka jenis tersebut tidak dapat muncul kembali. Seharusnya manusia menggunakan dengan baik sumber daya biotik dan abiotik secara tepat dan bertanggung jawab.

Manusia memandang alam lingkungannya dengan bermacam-macam kebutuhan dan keinginan. Manusia bersaing dengan spesies lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini manusia memiliki kemampuan lebih besar dibandingkan organisme lainnya, terutama dalam penggunaan sumber-sumber alamnya.

Berbagai cara telah dilakukan manusia dalam menggunakan sumber-sumber alam berupa tanah, air, fauna, flora, bahan-bahan galian, dan sebagainya. Namun sesuai dengan kondisi lingkungan saat ini manusia susah seharusnya melakukan perubahan. Perubahan yang dimaksud disini bukanlah transformasi yang diartikan sebagai perubahan seluruhnya (dari teknologi, sosial budaya dan ekonomi). Perubahan disini lebih kepada perubahan hidup berperilaku, kebiasaan dalam hidup yang menunjang pada penyelamatan lingkungan, perilaku hidup manusia.



### E. Manusia Sebagai Penentu Nilai

Manusia atau penduduk tidak lagi tergantung pada alam dalam batas-batas tertentu. manusia sejak saat itu merupakan tenaga dalam alam yang waktu relatif singkat dapat merubah relief features, bila dibandingkan dengan kekuata-kekuatan lain seperti kekuatan-kekuatan geologis, geomorfologis, klimatologis, dan sebagainya.

Perubahan-perubahan dalam lingkungan alam yang disebabkan adanya pengaruh manusia dapat terlaksana karena:

1. Kemajuan akal dan teknik manusia.
2. Aktivitas daya pencipta dan keuletan manusia sehingga kedudukan manusia
3. Primitif menjadi manusia modern.

Jika manusia tidak dapat menaklukkan alam maka manusia tidak dapat mengatasi kerumitan-kerumitan yang dialami dalam hidupnya seperti:

1. Turunnya kesuburan tanah pertanian
2. Habisnya persediaan sumber daya alam
3. Pertambahan penduduk dengan segi-segi negatifnya seperti bahaya erosi, banjir dan sebagainya

Tetapi bagaimanapun manusia masih selalu terikat pada bumi yang dipijak ini. Air, tanah dan udara tidak terlepas dari manusia, kecuali jika manusia dapat hidup tanpa unsur-unsur tersebut atau hidup dalam alam lain (planet lain). Dan dengan jika memang demikian halnya maka perumusan geografi akan mengalami perubahan.

### F. Individu Dengan Golongan

Di dalam Human Geografi adad perbedaan pendapat mengenai dasar-dasar ilmu ini. Paul Vidal de Blace memakai dasar human group sedang J. Brunhes memakai dasar individu sebagai titik tolak.

Jika ditinjau manusia sebagai pengertian individu, maka tidak terikat pada atau dalam kehidupan golongan, sehingga ada kebebasan melaksanakan kehendak dan cita-citanya, sedangkan human group terikat pada adat kebiasaan masyarakat, sehingga tidak boleh dikata tidak terlepas dari sosial control masyarakat.

Bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang dasar kehiupannya adalah gotong royong, maka persoalan ini tidak menjadi soal yang prinsipil lagi, sebab baik individu maupun golongan sangat erat hubungannya masing-masing mengabdikan diri pada Negara.

Dalam hal ini yang penting ialah sikap atau tindakan penduduk dalam usahanya dalam menyesuaikan dan menguasai lingkungan alam. Dengan demikian Geografi Sosial memperhatikan kedua-duanya sebagai titik tolak pembahasan dan pengupasannya, dengan tidak memandang tingkatan dari masyarakat itu. Apakah dalam tingkat *Naturalwirtschaft* ataupun *Geldwirtschaft*.

### G. Interaksi Manusia Dengan Lingkungan

#### G.1. Manusia dengan Lingkungan

Lingkungan dan masyarakat merupakan dua konsep yang memiliki keterkaitan secara fungsional dalam konteks ekologi dan ekosistem. Secara konseptual bahwa manusia merupakan faktor dominan terhadap lingkungannya (*man ecological dominant concept*) telah menampilkan fenomena



kehidupan yang antar wilayah dan antar masyarakat. Beragam aktivitas, perbedaan tingkat kesejahteraan dan dinamika perubahan masyarakat merupakan konsekuensi logis dari konsep tersebut.

Banyaknya pendapat yang menyatakan bahwa di permukaan bumi ini terdapat hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan alam. Pada garis besarnya adalah:

1. Kehidupan manusia dan kebudayaan ditentukan oleh alam
2. Manusia dan kebudayaan tidak ditentukan oleh alam, tetapi manusia mempunyai peranan aktif terhadap alam sehingga manusia dapat memilih kebudayaannya sedangkan alam hanya memberikan kemungkinan-kemungkinan saja.

Pendapat pertama merupakan paham determinis yang menyatakan bahwa faktor-faktor geografik atau alam sering memainkan peranan yang dinamik dalam perkembangan kebudayaan manusia berarti alam tidak memerankan peranan yang pasif. Sedangkan pendapat kedua merupakan pandangan possibilis bahwa hampir semua praktek kebudayaan yang spesifik tidak dengan logis dikembalikan langsung pada alam sebagai habitat geografis semata-mata, melainkan manusia yang memegang peranan dalam menentukan budayanya (aktif). Dengan demikian bahwa setiap pernyataan yang dimiliki oleh paham determinis dan paham possibilis tidak selalu benar dan tidak selalu salah karena tergantung dengan keadaan alam atau manusia sendiri.

#### *G.2. Fisis Determinis*

Para ahli fisis determinis berpendapat bahwa keadaan alam suatu daerah seperti cuaca, iklim, persediaan air, jenis tanah, jenis batuan lingkungan sosial serta fauna flora dimana manusia itu berada akan menentukan sifat lahir dan rohaniannya. Apabila manusia tidak menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut maka manusia yang bersangkutan akan binasa. Pandangan tersebut jenas sekali bahwa tidak ada tawar menawar antara manusia dengan alam sehingga kreatifitas manusia untuk mengubah alam tidak nampak, seolah olah manusia sebagai manusia yang pasif di dunia.

Paham determinis ini dipengaruhi oleh pendapat Charles Darwin yang berpendapat bahwa manusia untuk mencapai tujuannya dengan jalan merencanakan sedangkan alam dapat mencapai tujuannya dengan jalan seleksi. Dengan demikian untuk lolos dari seleksi alam maka muncul apa yang dinamakan dengan perjuangan hidup, hanya hewan (manusia) paling ulet yang mampu menyesuaikan diri dengan iklim dan suasana disekitarnya maka mereka lah yang berhasil mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pandangan ahli fisis determinis mengenai manusia dengan lingkungannya adalah sebagai berikut:

#### *Aristoteles*

Menyatakan bahwa bangsa-bangsa yang terdapat di benua Eropa terutama mereka yang menempati wilayah dingin mempunyai semangat yang tinggi tetapi intelegensinya kurang dan masyarakatnya dalam mengelola alam tidak terampil sehingga organisasi sosialnya lemah, secara politis tidak dapat mengalahkan negara tetangga mereka. Sedangkan penduduk di Asia cukup terampil dan mempunyai intelegensi yang tinggi tetapi mempunyai



semangat yang lemah sehingga mudah di jajah oleh bangsa lain. adapun bangsa Yunani berada di antara benua Asia dan Eropa mempunyai sifat-sifat yang terbaik daripada bangsa-bangsa Asia dan Eropa

#### Le Lannau

Berdapat bahwa manusia di lingkungan tempat tinggalnya tidak aktif secara sendiri-sendiri dan setiap aktivitas manusia akan membekas dipermukaan bumi. Pengaruh manusia terhadap lingkungan alam menjadi semakin dominan sehingga terjadi timbal balik antara manusia dengan alam maupun dengan kehidupan manusia seperti adanya kerusakan lingkungan maupun bencana alam akibat dari hasil aktivitas manusia. Komponen M (manusia) dilingkungan alam dapat digolongkan kedalam masyarakat yang sedang berkembang atau masyarakat maju, sehingga mereka mampu untuk mengelola alam.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan bentuk dari mata pencaharian yang tidak dapat terlepas dari lingkungan, hubungan antara manusia dengan lingkungan merupakan bentuk interaksi baik saling menguntungkan maupun merugikan lingkungan akibat terlalu dieksploitasi yang berlebihan sehingga merugikan manusia.

Soerjani mengatakan bahwa di dalam sistem lingkungan hidup terdapat tiga komponen utama yaitu:

#### *Lingkungan Hidup Alami*

Manusia yang terdapat di dalamnya hidup selaras dengan alam sehingga manusia tersebut tunduk kepada hukum-hukum alam yang berlaku. Manusia tidak hanya

hukum-hukum alam yang berlaku. Manusia tidak hanya melakukan perubahan terhadap lingkungan dan didalamnya hidup secara immanen.

#### *Lingkungan Hidup Buatan*

Manusia dapat hidup dan berkembang berkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya sehingga kebudayaannya pun semakin berkembang. Dalam perkembangannya lingkungan budaya mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya dukung sumber daya alam terhadap kualitas hidup manusia.

#### *Lingkungan Hidup Sosial*

Manusia dipermukaan bumi tidak hidup sendiri melainkan bersama-sama dengan manusia lain. Kehidupan bersama ini merupakan jaringan hubungan sosial antara manusia yang melahirkan pranata-pranata sosial yang berfungsi mengatur kehidupannya.



## KESIMPULAN

Dalam kesimpulan disini yang ingin disampaikan adalah bahwa sebuah pranata sosial memberikan makna kepada kita bentuknya yang abstrak yang tidak dapat dilihat, akan tetapi mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi tingkah laku kita khususnya tindakan-tindakan yang harus dilakukan berdasar pada aktivitas yang mengikatnya.

Pranata sosial yang ada di masyarakat pada prinsipnya adalah mengacu pada kebudayaan yang dipedomannya, sehingga ketika terjadi suatu perubahan pada tingkah laku nyata yang terlihat maka biasanya aturan dalam pranata sosial dapat menetralsirnya, akan tetapi terkadang perubahan dapat juga terjadi ketika muncul hubungan antar budaya yang berbeda.

Di dalam pranata sosial kita dapat menganalisa adanya masalah-masalah sosial dengan cara menganalisa modal sosial yang ada pada masyarakat, dan modal sosial ini pada dasarnya terletak pada masing-masing pranata sosial yang berlaku di masyarakat. Kadang-kadang kita sering dikacaukan antara istilah pranata sosial dengan lembaga sosial. Akan tetapi pada dasarnya bila kita mengacu pada lembaga artinya suatu bentuk pranata sosial yang bersifat resmi dan mempunyai struktur yang jelas serta tertulis.



## KESIMPULAN

Dalam kesimpulan disini yang ingin disampaikan adalah bahwa sebuah pranata sosial memberikan makna kepada kita tentang yang abstrak yang tidak dapat dilihat, akan tetapi mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi tingkah laku kita khususnya tindakan-tindakan yang harus dilakukan berdasar pada aktivitas yang mengitarinya.

Pranata sosial yang ada di masyarakat pada umumnya adalah terbagi pada kebudayaan yang ada di masyarakat, sehingga kita terjadi suatu perbedaan pada tingkah laku kita yang terlihat pada dasarnya. Prana dalam pranata sosial dapat mempengaruhi, dan dapat mengubah perilaku kita yang terjadi pada perilaku hubungan antar individu yang berbeda.

Di dalam pranata sosial kita dapat mengetahui adanya interaksi sosial dengan cara menggunakan simbol-simbol yang ada pada masyarakat dan pranata sosial. Prana dalam pranata sosial pada masing-masing pranata sosial yang berbeda di masyarakat. Kadang-kadang kita dapat menemukan suatu pranata sosial dengan simbol-simbol yang berbeda. Akan tetapi pada dasarnya kita dapat menemukan suatu pranata sosial dengan simbol yang berbeda yang terlihat dari lingkungan sekitar yang ada di sekitar kita.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulwahid, Idat, dkk, *Pranata Sosial Dalam Masyarakat Sunda*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2003.
- Abdullah, Mulat Wigati, *Sosiologi*, Jakarta: Grasindo, 2006.
- Ali, Achmad, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan artikel hukum Dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ardiwinata, S. Jajat. dkk, *Sosiologi Antropologi Pendidikan*, Bandung: UPI Press, 2008.
- A. Yunus, *Filsafat Pendidikan*, Bandung: CV. Citra Sarana Grafika. 1999.
- Basah, Sjahan, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985.
- Bintarto, R. *Geografi Sosial*, Yogyakarta: U.P.Spring, 1977.
- Brittner, Egon, *The Functions of the Police in Modern Society*, Cambridge, Mass. : Oelgeschlager, Gunn & Main, 1980.



- Duvender, Maurice, *Sosiologi Politik*, Jakarta: Pt.Raja Grafindo, 2002.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi pertama cet. I, 1991.
- Effendi, Marwan, *Kejaksaan RI, Posisi Dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum*, Jakarta: Gramedia, 2005.
- Gillin, John Levis and John Phillpe Gillin, *Cultural Sociology*, New York: The Macmillan, 1954,
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hidayati, Khairul dkk, *Sosiologi*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Hermawan, Ruswandi. dkk, *Perkembangan Masyarakat dan Budaya*, Bandung: UPI Press, 2006.
- Horton, Paul B, dan Chester L Hunt, *Sosiologi*, Edisi 6, Terj. Aminudin, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Karjadi, *Polisi (Filsafat dan Perkembangan Hukumnya)*, Bogor Politeia, 1978
- Kartika, Dharsono Sony, *Seni Rupa Modern*, Bandung: Rekayasa sains, 2004.
- Koentjaraningrat, *Mamusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1979.
- , *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Jakarta: PT. Gramedia, 1974.

- Kuper, Adam dan Jessica Kuper, *Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial*, Jilid. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Kusnadi dan Ibrahim Hermaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Sastra Hudaya, 1983.
- Kusumaatmaja, Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi Fakultas Hukum Unpad, Bandung.
- Lev, Daniel S., *Islamic Court In Indonesia*, Barkeley University Of California Press, 1972.
- , *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009.
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Lukito, Ratno, *Hukum sacral dan Hukum sekuler, Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Ciputat Tangerang: Pustaka Alvabet, anggota IKAPI, 2008
- Mansour, Fakih, 1997 "Seni Rupa Penyadaran Moelyono" yayasan bantang budaya; Yogyakarta



- Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Dan Kekuasaan, Menegakkan Supremasi Hukum Melalui Demokratisasi*, Cetakan I, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998.
- Melville, J Herskovits, *Cultural Anthropology*, New York: Alfred A. Knopf, 1955.
- Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Mansyur, Ali, *Aneka Persoalan Hukum, (Masalah Perjanjian, Konsumen & Pembaharuan Hukum)*, Semarang: UNISSULA Press, 2007.
- Manan, Bagir, *Moral Penegak Hukum di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) Dalam Pandangan Islam*, Bandung: Agung Ilmu, 2004.
- Nasution, Harun dan Bahtiar effendi, *Hak Azasi dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.
- Ningrum, Epon dkk, *Tempat Ruang dan Sistem Sosial*, Bandung: UPI Press, 2006.
- Plato, *The Laws*, Penguin Classics, edisi tahun, diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders, 1986.

- Pound, Roscoe, *The Task of Law*, Pennsylvania: Franklin and Marshal College, 1994).
- Rahardi, Pudi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme Dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.
- Rambe, Rapaun, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta: Grasindo, 2001.
- Rukandi, Kanda.dkk. 2006. *Perspektif Sosial Budaya*, Bandung : UPI Press.
- Rohman, Arif.dkk, 2003, *Sosiologi*, Klaten: PT Intan Prawira.
- Raharjo, Satjipto, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Sinar Biru, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, Cetakan VI, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- \_\_\_\_\_, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Hukum Indonesia Menurut UUD 1945*, Cetakan IV, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989.
- Schmandt, Hanri J, *Filsafat Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Teori Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta CV. Rajawali, 1984.



-----, *Sosiologi Suatu Pengantar*,  
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Sudarma, Momon, *Sosiologi untuk Kesehatan*, Jakarta:  
Selemba Medika, 2003.

Suparlan, Parsudi, *Orang Sakai Di Riau: Masyarakat  
Terasing dalam Masyarakat Indonesia: Kajian  
Mengenai Perubahan dan Kelestarian  
Kebudayaan Sakai dalam Proses Transformasi  
Mereka ke dalam Masyarakat Indonesia melalui  
Proyek Pemulihan Pembinaan Kesejahteraan  
Masyarakat Terasing*, Departemen Sosial,  
Republik Indonesia, Jakarta, Yayasan Obor  
Indonesia, 1995.

-----, "Kata Pengantar" dalam *Ketakwaan  
terhadap Tuhan Yang Maha Esa* (Parsudi  
Suparlan dan Harisun Arsyad, eds.), Jakarta:  
Badan Penelitian Pengembangan Agama  
Departemen Agama, 2004.

Suyanto, Bagong, *Sosiologi Teks Pengantar dan  
Terapan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Pt  
Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Unger, Roberto Mangabeira, *Law In Modern Society*,  
New York, The Free Press, A Division of  
Macmullan Publishing Co, 1975.

Utsman, Sabian, *Memuju Penegakan Hukum Responsif*,  
Cet. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara  
Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962.

Waluya, Bagja, *Menyelami Fenomena Sosial di  
Masyarakat*, Bandung: Setia Purna Inves, 2007.

Warassih, Esmi, *Pranata Hukum sebuah Telaah  
Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang,  
2005.

Widodo, Chomsin S. dan Jasmadi, *Panduan Menyusun  
Bahan Ajar Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Elex  
Media Komputindo, 2008.

Zanden, James W. Vender, *Sociology*, New York: John  
Willey & Sons, 1979.

#### **B. Disertasi, Jurnal, Makalah, dan Artikel Bebas.**

Asshiddiqie, Jimly, Orasi ilmiah Pada Wisuda Sarjana  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Palembang, 23 Maret 2004.

Lev, Daniel S, *Cita Negara Hukum Indonesia  
Kontemporer*, Orasi ilmiah Pada Wisuda Sarjana  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Palembang, 23 Maret 2004.

Lotulung, Paulus Effendi, *Peradilan Tata Usaha Negara  
dalam Kaitannya dengan Rechtsstaat Republik  
Indonesia*, dalam majalah Hukum dan  
Pembangunan. No. 6 Tahun XXI, Desember,  
1991.



Syair, Iryan, "Tabloit Pituluik" Pers ISI Padangpanjang:  
Padangpanjang Inves, 2011.

Soemantri, Sri, *Pembangunan Hukum Nasional Dalam  
Perspektif Kebijakan*, Makalah untuk  
Praseminar Hukum Identitas Hukum Nasional, di  
Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, tanggal 19-21  
Oktober 1987.

### C. Perundang-Undangan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional

Undang-undang No.14 th 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

### D. Internet

Eka Gunawan, *Pranata Sosial*, Minggu, Februari 08,  
2009, Sumber:  
[http:// pranata-sosial.html](http://pranata-sosial.html) (akses 22 Desember  
2009).

[http://members.fortunecity.com/senirupa/senirupa/id1.ht  
ml](http://members.fortunecity.com/senirupa/senirupa/id1.ht<br/>ml)

[http://anhar.dosen.isi-  
ska.ac.id/archives/category/artikel/sosiologi-seni](http://anhar.dosen.isi-<br/>ska.ac.id/archives/category/artikel/sosiologi-seni)

<http://www.artikata.com/arti-333138-karya.html>

[http://www.google.com/search?q=kritik+seni+adalah&ie  
=utf-8&oe=utf-8&aq=t &rls=org.mozilla:en-  
US:official&client=firefox-a](http://www.google.com/search?q=kritik+seni+adalah&ie<br/>=utf-8&oe=utf-8&aq=t &rls=org.mozilla:en-<br/>US:official&client=firefox-a)

Sofa, Struktur Sosial Budaya, Pranata Sosbud, dan Proses  
Sosial Budaya, Sumber  
:<http://massofa.wordpress.com> (akses 14  
Desember 2009)

Yahoo ! Answers. *Pengertian Pranata Pendidikan*, oleh:  
Rayhana Aisyah. 18 November 2011.09:59:57  
pm.

[http://komunitasmahasiswa.info/2009/01/ciri-ciri-negara-  
hukum/](http://komunitasmahasiswa.info/2009/01/ciri-ciri-negara-<br/>hukum/)

[www.uny.ac.id/akademik/sharefile](http://www.uny.ac.id/akademik/sharefile). di unduh pada 21  
November 201 10:35:47 am.



http://www.google.com/search?q=kritik+seni+adalah&ie  
=utf-8&oe=utf-8&ad=1  
US:official&client=firefox-a

Sosiologi Struktur Sosial Budaya Prinsip dan Proses  
Sosial Budaya  
http://massola.wordpress.com (akses 14  
Desember 2009)

Yahya, A. Answer: Jawaban Prinsip dan Proses  
Sosial Budaya (18 Desember 2011) 20 22  
p.1

http://www.massola.wordpress.com (akses 14  
Desember 2009)

Yahya, A. Answer: Jawaban Prinsip dan Proses  
Sosial Budaya (18 Desember 2011) 20 22  
p.1

## Indeks

### A

Achmad Ali 57

Adam Kuper dan Jessica  
Kuper 43

Ali Mansyur 79

Arif Rohman dkk 67

A. Yunus 42

### B

Bagja Waluya 43

Bagir Manan 76

Bagong Suyanto 67

### C

Chomsin S Widodo dan  
Jasmadi 44

### D

Daniel S Lev 119

Dharsono Sony Kartika  
93  
Departemen Pendidikan  
Nasional

Depdiknas 42

### E

Egon Brittner 44

Epon Ningrum 21, 22

Esmi Warassih 55

### F

Fakih Mansour 88

Franz Magnis Suseno 44

F Fukuyama 70

### H

Hanri J Schmandt 39

Harun Nasution dan  
Bahtiar effendi 66

Hamdan Mansoer 27

### I

Idat Abdulwahid 56

Iryan Syair 94



## Indeks

Ismail Suny 87

### J

Jajat Ardiwinata S. dkk  
23

James W. Vender Zanden  
40

J Herskovits Melville 54

Jimly Asshiddiqie 37

John Levis Gillin and  
John Phillpe Gillin 20,  
22, 40

### K

Kanda Rukandi 44

Karjadi 88

Khairul Hidayati dkk 43

Koentjaraningrat 2, 15,  
11, 16

Kusnadi dan Ibrahim  
Hermaily 77

### M

Mahfud MD 39, 78

Marwan Effendi 67

Maurice Duvender 39

Melville, J Herskovits  
13

Mulat Wigati Abdullah  
29

Moeljatno 47

Moctar Kusumaatmaja  
127

Momon Sudarma 43

### N

Notonagoro 67

### P

Paulus Effendi Lotulung  
59

Paul B Horton, dan  
Chester L Hunt 11  
, 27

## Indeks

Parsudi Suparlan 29

Philipus M Hadjon 59

Plato 39

Pudi Rahardi 33

### R

Ramlan Surbakti 113

Rapaun Rambe 20

Ratno Lukito 56

R Bintarto 74

Roberto Mangabeira  
Unger 34

Roscoe Pound 77

Ruswandi Hermawan  
dkk 67

### S

Sabian Utsman 86

Satjipto Raharjo 56, 71,  
77

Sjahran Basah 58, 91

Sri Soemantri 59

Soerjono Soekanto 10,  
11, 12, 19, 29

### T

### U

Utrecht 28

### W

### Z

Zainuddin Ali 59



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama lengkap penulis, yaitu Dr. Paisol Burlian, S.Ag, M. Hum, Penulis sekarang berdomisili di Jln. Sapta Marga Lrg. Pancasila No.61 Rt.51 Palembang. Sehari-hari beraktivitas sebagai tenaga pengajar di lingkungan Kota Palembang Negeri maupun swasta, antara lain: di Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Fatah Palembang, PPS IAIN Raden Fatah Palembang, PPS UNSRI Pada Program Ilmu Hukum, Universitas Bina Darma pada Program Megister Manajemen, Universitas Taman Siswa pada Megister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah pada Program Megister Hukum, STIA Satya Negara dan STIE Musi Palembang.

Pendidikan terakhir calon Profesor ini adalah S.3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, diselesaikan pada tahun 2013 dengan kepakaran bidang perundang-undangan (legislasi).

Penulis pernah menulis berbagai buku, jurnal dan media massa serta tampil sebagai pemakalah diberbagai seminar dan pelatihan. Karya tulis yang telah diterbitkan berupa buku, antara lain: Patologi Sosial Ditinjau dari Sosiologis, Yuridis dan Filosofis. Sedangkan karya tulis yang dimuat dalam jurnal, antara lain: Tranformation: Historial



Analysis Towards Egalitarian Characters, Aspek Hukum dan Teknologi, Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Moral, Penulis disamping sibuk menulis juga menyempatkan diri dalam berorganisasi, baik organisasi sosial keagamaan, maupun sosial kemasyarakatan, antara lain: Sekretaris BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) Kota Palembang, Ketua Bidang Advokasi Hukum BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) Prov. Sumatera, Anggota DKG (Dewan Kehormatan Guru Indonesia) PGRI Kota Palembang, Ketua Bidang Pembinaan Umat BAMUKOI (Badan Musyawarah Keluarga Ogan Ilir) Pusat,

## RIWAYAT HIDUP EDITOR



Nama lengkap editor ini adalah Dr. Hamidah, M.Ag. Sehari-hari beraktivitas sebagai Dosen Tetap IAIN Raden Fatah Palembang pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi mata kuliah Sosiologi. Sampai sekarang masih dengan pangkat IV/a. Editor ini yang pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi selama dua periode, yaitu 2004-2008 dan 2008-2012.

Pendidikan tinggi yang pernah dilalui adalah tingkat strata satu (S.1) pada Fakultas Usuluddin Jurusan Perbandingan Agama, diselesaikan pada tahun 1990, setelah itu merantau ke Padang (Sumatera Barat) menuntut ilmu di IAIN Iman Bonjol tahun 1998 menganmbil strata dua (S.2) dengan program Sejarah Peradaban Islam, dan tingkat Doktor (S.3) di selesaikan di UIN Jakarta dengan mendalami Kajian Islam. Ditenga-tengah kesibukannya Doktor Hamidah menyempatkan diri untuk menulis baik buku ajar maupun jurnal, antara lain: Buku Sosiologi (tahun 2012) dan Gerakan Wanita Islam Indonesia: Kajian Historis Aisyiah/Nasyiatul Aisyiah dan Muslimat-Fa



Sebuah pranata atau lembaga sebuah bangunan, bukan sekelompok orang dan bukan juga sebuah organisasi. Pranata atau lembaga adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting atau secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Pranata adalah proses terstruktur untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu perlu dijelaskan bahwa pranata-pranata sosial bersifat abstrak. Kegiatan atau interaksi orang dalam hidup sehari-hari bersifat kongret dan dapat ditinjau oleh panca indera. Prilaku kongret itu disadari dan dijiwai oleh konsep-konsep pikiran dan pengalaman kolektif lama, yang tidak langsung tampil dan diketahui. Pranata sosial tidak memiliki anggota tapi memiliki pengikut. Perbedaan anggota dengan pengikut sangat halus namun penting. Yang perlu diingat adalah bahwa pranata selalu merupakan sistem gagasan dari prilaku yang terorganisir yang ikut sert dalam prilaku itu. Karena pranata adalah sistem hubungan sosial yang terorganisir yang mengejawantahkan nilai-nilai serta prosedur umum tertentu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Tiga kata kunci didalam setiap pembahasan mengenai pranata sosial yakni:

1. Nilai dan Norma.
2. Pola perilaku yang dibakukan atau yang disebut prosedur umum.
3. Sistem hubungan, yakni jaringan peran serta status yang menjadi wahana untuk melaksanakan perilaku sesuai dengan prosedur umum berlaku.

Pusat Penerbitan dan Percetakan Raden Fatah (P3RF)  
**RAFAH PRESS**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM.3.5 Palembang  
(Gedung BAAK Lama) IAIN Raden Fatah  
Telp.(0711)314 387 Mobile.0812 73 96 290  
Email : radenfatahpress@yahoo.co.id



ISBN : 978-979-1339-95-7